



STUDI *FINANCIAL INCLUSION* DAN *FINANCIAL DEEPENING* DI INDONESIA

SKRIPSI

**Oleh:
Cintya Meidia Tama
NIM 11081010101**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



STUDI *FINANCIAL INCLUSION* DAN *FINANCIAL DEEPENING* DI INDONESIA

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
Cintya Meidia Tama
NIM 110810101001

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Swt, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sri Winarnik dan Ayahanda Edi Winarno Raharjo tercinta, yang telah mendoakan, memberi kasih sayang, dan semangat untuk meraih asa serta seluruh pengorbanan yang tucurahkan selama ini.
2. Adikku Sigit Dwi Raharjo yang telah memberikan dukungan sepenuh hati.
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain,
tanpa kita kehilangan semangat.

(Abraham Lincoln)

The rule number one for the people who truly civilized man is to let different

(David Grayson)

The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams

(Oprah Winfrey)

Jika kita memikirkan orang lain maka Allah akan memikirkan kita dan dengan
sendirinya alam akan menunjukkan segala kebenaran

(Adhitya Wardhono)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cintya Meidia Tama

NIM : 110810101001

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Studi *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening* di Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2015

Yang menyatakan,

Cintya Meidia Tama
NIM 110810101001

SKRIPSI

STUDI *FINANCIAL INCLUSION* DAN *FINANCIAL DEEPENING* DI INDONESIA

Oleh:
Cintya Meidia Tama
NIM. 110810101001

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Adhitya Wardhono, SE., M.Sc., Ph.D

Dosen Pembimbing II : Dr. Siswoyo Hari S., SE, M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *STUDI FINANCIAL INCLUSION DAN FINANCIAL DEEPENING* DI INDONESIA
Nama Mahasiswa : Cintya Meidia Tama
N I M : 110810101001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Moneter
Tanggal Persetujuan : 18 Februari 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Adhitya Wardhono, SE., M.Sc., Ph.D
NIP. 19710905 199802 1 001

Dr. Siswoyo Hari S., SE, M.Si
NIP. 19680715 199303 1 001

Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

STUDI *FINANCIAL INCLUSION* DAN *FINANCIAL DEEPENING* DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Cintya Meidia Tama

NIM : 110810101001

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

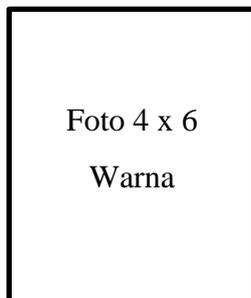
telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

13 Maret 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes (.....)
NIP. 19641108 198902 2 001
2. Sekretaris : Dr. Siti Komariyah, M.Si (.....)
NIP. 19710610 200112 2 002
3. Anggota : Dr. I. Wayan Subagiarta, M.Si (.....)
NIP. 19600412 198702 1 001



Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, SE.,M.Si
NIP. 19630614 199002 1001

Studi Financial Inclusion dan Financial Deepening di Indonesia

Cintya Meidia Tama

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas
Jember*

ABSTRAK

Sistem keuangan menjadi relatif penting di dalam suatu perekonomian untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari bank dan bukan bank dimana penguasaan aset finansial tertinggi dikuasai oleh bank di Indonesia. Fenomena terjadinya akses masyarakat yang rendah terhadap perbankan dan menciptakan industri perbankan yang kuat menjadi bukti pembangunan institusional merupakan prasyarat yang harus dipenuhi didukung dengan regulasi yang tepat. Kedua fenomena tersebut yaitu inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan (*financial deepening*) dalam sistem kelembagaan keuangan. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengukur inklusi dan pendalaman keuangan melalui indeksisasi dan tujuan kedua adalah menganalisis *vis a vis* hubungan yang terjadi antara *financial inclusion* dan *financial deepening*. Metode analisis yang digunakan antara lain, indeksisasi *financial inclusion* dan *financial deepening* dan sintesa *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory*. Besaran *financial inclusion* dan *financial deepening* secara tentatif menunjukkan bahwa *financial inclusion* di Indonesia berada pada level rendah (*low*) dan menengah (*medium*) dan *financial deepening* pada level rendah (*low*), dan teknik selanjutnya yaitu mengumpulkan data primer dari responden yang ahli (*expert*) berdasarkan sintesa yang telah disusun dengan AHP dan *Game Theory* menghasilkan dua strategi yang bermain menghadapi inklusi yaitu *banking penetration* (BPE) dan *availability of banking service* (ABS) dan strategi yang digunakan menghadapi aksi inklusi adalah *domestic financial asset* (DFA). Berdasarkan kondisi tersebut, tidak adanya strategi dominan yang dimiliki *player* untuk dihadapkan dalam permainan interaksi, maka tidak terdapat titik keseimbangan yang terjadi baik *Nash Equilibrium* dan *Prisoner's Dilemma*.

Kata kunci: sistem keuangan, *financial inclusion*, *financial deepening*, indeksisasi, ahp dan *game theory*

Study of Financial Inclusion and Financial Deepening in Indonesia

Cintya Meidia Tama

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

Financial system to be relatively important in an economy to support economic activities through financial institutions. Financial institutions consist of bank and non-bank in which financial assets be the mastery of the highest occupied by banks in Indonesia. The phenomenon of the low public access to banking and create a strong banking industry is evidence that institutional development is a prerequisite that must be met and supported by appropriate regulation. Both of these phenomenon are financial inclusion and (financial deepening in the financial institution system. The first aim of this study is to measure the financial inclusion and financial deepening through an index and the second is to analyze vis-à-vis the relationship between financial inclusion and financial deepening. The method of analysis used among others are index of financial inclusion and financial deepening and synthesis of Analytic Hierarchy Process (AHP) and Game Theory. The tentative results of calculations on the financial inclusion and financial deepening in Indonesia shows that it is between low and medium level and low level respectively. Also further techniques that collect primary data from respondents who are experts (expert) based synthesis that has been prepared with AHP and Game Theory produces two strategies are playing against inclusion namely banking penetration (BPE) and availability of banking services (ABS) and the strategies used to face the action of inclusion is domestic financial assets (DFA). Under these conditions, the absence of a dominant strategy owned player in the game to face interaction, then there is a good balance point occurs Nash Equilibrium and the Prisoner's Dilemma.

Keywords: *financial system, financial inclusion, financial deepening, index, analytic hierarchy process (ahp), and game theory.*

RINGKASAN

Studi *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening* Di Indonesia; Cintya Meidia Tama; 110810101001; 2015: 110 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pembangunan keuangan dilakukan pada berbagai struktur kebijakan keuangan. Sistem keuangan menjadi relatif penting dalam suatu pembangunan ekonomi suatu negara. Sistem yang baik dapat menjadi *bumper* dalam menjalankan aktivitas perekonomian dengan pendanaan yang stabil dan kuat. Pendanaan yang dilakukan dalam suatu negara tidak hanya bersumber dari pemerintah saja namun dari lembaga keuangan yang dimiliki. Salah satunya adalah perbankan sebagai lembaga jasa keuangan formal. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki berbagai permasalahan dibidang keuangan. Jumlah penduduk yang banyak dan tersebar di enam pulau besar mengakibatkan hanya setengah dari populasi penduduk yang terakses layanan jasa keuangan formal. Seiring dengan fluktuasi ekonomi yang dinamis, peran perbankan menjadi sektor dominan dengan menguasai aset keuangan tertinggi di seluruh bidang industri keuangan lainnya di Indonesia. Fungsi bank sebagai lembaga yang mengakomodir dana masyarakat dan berkewajiban mendistribusikan kembali dana tersebut melalui kredit dan pinjaman.

Transaksi ekonomi membutuhkan suatu sistem keuangan yang baik agar tidak salah dalam pemilihan layanan keuangan yang berkembang dimasyarakat yang sifatnya merugikan. Ekspansi layanan keuangan dibutuhkan untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan dengan beberapa strategi yang dipergunakan oleh pengambil keputusan, sebangun dengan hal tersebut kondisi perbankan menjadi perhatian khusus yaitu menjaga perbankan dalam keadaan yang sehat dan kuat sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang baik. Oleh sebab itu, strategi *financial inclusion* dan *financial deepening* dianggap tepat dalam merespon masalah

keuangan dan melakukan pembangunan keuangan secara kontinyu sehingga menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh *financial inclusion* dan *financial deepening* terhadap stabilitas sistem keuangan yang dirinci untuk mengetahui besaran ukuran *financial inclusion* dan *financial deepening* di Indonesia serta mengamati *vis a vis* antara keduanya dalam proses pembangunan keuangan di Indonesia. Oleh karena itu digunakan metode perhitungan eklektik dengan indeksisasi dengan menggunakan beberapa indikator didalamnya untuk mengetahui besaran suatu inklusi keuangan dan pendalaman keuangan dalam perekonomian Indonesia selama sepuluh tahun dari tahun 2004 hingga 2013 dan suatu sintesa *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory* dalam menganalisa interaksi pada *financial inclusion* dan *financial deepening* di Indonesia.

Fenomena keuangan yang terjadi digolongkan atas perilaku ekonomi yang terdiri dari aspek permintaan dan penawaran oleh agen-agen ekonomi dalam aktivitas perekonomian (Leyshon, *et al*, 1998; Levine, *et al*, 1998, 2005). Ekspektasi masyarakat atas proses pembangunan yang dicanangkan masyarakat adalah terwujudnya distribusi yang merata sehingga tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah, khususnya di Indonesia yang terdiri dari enam pulau besar yang memiliki karakteristik masing-masing. Hasil atas sebuah susunan pembentukan hirarki dalam menangkap fenomena keuangan. Profil wilayah di Indonesia mempertegas analisis inklusi yang dihitung atas perilaku ekonomi dari aspek permintaan, kondisi pertumbuhan, jumlah penduduk hingga luas area yang dimiliki menjadi hal-hal yang mendeterminasi perhitungan inklusi yang dilakukan. Sebuah kontinuitas pembangunan ekonomi dalam meredam fenomena inklusi dan pendalaman keuangan adalah dengan melakukan harmonisasi antara keduanya dalam mengatasi masalah ekonomi keuangan. Dalam prakteknya bahwa langkah pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan prosedur tetapi seiring dengan bertambahnya tahun dan jumlah penduduk di Indonesia, permasalahan tersebut semakin berkembang luas, di pertegas dengan

data survei oleh World Bank (2011) yang hanya setengah dari populasi penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap layanan keuangan.

Perekonomian Indonesia yang sesungguhnya belum mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan, kontinuitas besaran pertumbuhan yang stabil dan menunjukkan tren meningkat menjadi tujuan bersama dalam perekonomian, maka secara umum pembangunan institusional merupakan prasyarat yang harus dipenuhi Indonesia guna mencapai tujuan pertumbuhan yang ambisius didukung dengan regulasi yang tepat (Mohan, 2004). Kondisi ini menjadi landasan bagi pemangku kebijakan dalam berkoordinasi mencapai tujuan yang optimal.

Hasil analisis pada perhitungan dengan indeksisasi menunjukkan bahwa *financial inclusion* dan *financial deepening* di Indonesi terkategori *low* (rendah) secara keseluruhan, analisa *spatial financial inclusion* di enam pulau di Indonesia memperlihatkan bahwa terjadinya aglomerasi dalam pembangunan keuangan yaitu terletak di Pulau Jawa yang memiliki kondisi *financial inclusion* yang lebih tinggi dibandingkan lima pulau lainnya, hal ini dikarenakan mudahnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan serta mudah dalam menjangkau faktor produksi di daerah tersebut. Sedangkan hasil perhitungan sintesa AHP dan *Game Theory* memaparkan bahwa tidak ada strategi yang dominan yang digunakan *player* sehingga tidak terjadi titik keseimbangan *Nash Equilibrium* maupun *Prisoner's Dilemma*. Pada *financial inclusion* terdapat dua strategi yang paling efektif dalam menghadapi *financial deepening* yaitu *banking penetration* (BPE) dan *availability of banking services* (ABS) dengan nilai *pay-off* tertinggi.

Banking Penetration (penetrasi perbankan) berupa keberadaan lembaga keuangan ditinjau dari kuantitas dan jumlah distribusi layanan keuangan dalam sistem keuangan. Kondisi ini menjembatani masyarakat yang belum tersentuh pada layanan keuangan. Eksistensi lembaga keuangan dalam fungsinya sebagai intermediasi aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan optimal. Perwujudan fisik lembaga keuangan dalam roda perekonomian dinilai belum mampu menjalankan fungsinya secara penuh dalam melayani keuangan masyarakat tanpa didasari pada *avaibility of banking service*

(ketersediaan layanan perbankan) sebab di era teknologi yang terjadi pergerakan masyarakat dalam transaksi keuangan meningkat ditandai dengan kepemilikan *mobile money* sebagai media transaksi.

Teknologi telah diterapkan secara massif pada berbagai layanan perbankan sehingga mempermudah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memproduksi, konsumsi, maupun investasi (Nkoro dan Uko, 2012). Layanan keuangan oleh perbankan yaitu *e-banking* maupun program yang sejenis menjangkau masyarakat lebih dalam yang dapat menjaring dana pihak ketiga lebih tinggi terhadap aset perbankan yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Sinkronisasi antara penetrasi perbankan dan ketersediaan layanan perbankan dapat menjadi sebuah mitigasi dalam rendahnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Bauran penerapan keduanya menjadi sebuah reformasi pemecahan masalah keuangan yang terjadi di masyarakat yaitu disebabkan pada kondisi geografis yang tidak mendukung dengan kurangnya akses jalan ataupun infrastruktur, keterbatasan modal dalam pendistribusian layanan keuangan masyarakat sebab biaya transaksi yang ditimbulkan tinggi. Sehingga hasil atas sintesa *financial inclusion* dan *financial deepening* menghasilkan dua strategi yang muncul pada *financial inclusion* sebagai upayanya melakukan sebuah intermediasi keuangan. Kondisi sebaliknya terjadi pada *financial deepening* yang hanya *domestic financial asset* (DFA) paling efektif dalam merespon *financial inclusion* sebab memiliki nilai *pay-off* tertinggi. *Domestic Financial Asset* (aset keuangan domestik) yaitu rasio modal bank berperan melakukan intermediasi keuangan dengan keberadaan aset keuangan domestik. Oleh karenanya penguatan aset dalam bentuk penambahan jumlah aset perbankan menjadi cukup penting pada sistem keuangan.

Perbankan menjalankan perannya dengan baik dalam mendistribusikan dana kepada pelaku ekonomi sebagai bentuk injeksi perekonomian dengan melakukan produksi (Papadimitrious dan Steiglitz, 1982). Kedua aktor yaitu *financial inclusion* dan *financial deepening* merumuskan sebuah strategi atas sintesa yang dilakukan dengan AHP dan *Game Theory*, dalam menghadapi

strategi satu sama lain aktor menggunakan strategi *banking penetration* (penetrasi perbankan), *availability of banking service* (ketersediaan layanan perbankan), dan *domestic financial asset* (aset keuangan domestik). Analisis terhadap ketiga strategi tersebut mengindikasikan bahwa pengambil kebijakan perlu mengedepankan *service and fund oriented* terhadap pembangunan keuangan di Indonesia. Dalam sistem keuangan terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek permintaan dan penawaran. Aspek permintaan merupakan sebuah gambaran oleh pelaku ekonomi, dan aspek penawaran merupakan tugas perbankan sebagai institusi yaitu pemegang dana masyarakat.

Strategi yang dihasilkan oleh *financial inclusion* menggambarkan bahwa masyarakat membutuhkan sebuah ekspansi kebijakan untuk mengatasi permasalahan rendahnya akses keuangan dengan mengutamakan *service* (pelayanan) oleh pengambil kebijakan dengan melakukan penetrasi perbankan dan peningkatan layanan keuangan masyarakat dalam bentuk distribusi pembangunan keuangan yang merata. Dalam aspek penawaran yang ditangkap pada sebuah fenomena *financial deepening* maka strategi yang dibutuhkan adalah penguatan modal perbankan dengan jumlah modal yang mengalami peningkatan dapat menjadi *bumper* dalam menghadapi krisis keuangan. Mitigasi risiko atas sebuah krisis keuangan yang diakibatkan oleh lemahnya struktur keuangan negara dan rendahnya akses keuangan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi faktor yang menderteminasi sebuah krisis (Shinasi, 2006; Rajan dan Zingales, 2003). Institusi secara makro belum mampu menopang seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat dengan jalur kredit maupun jenis pinjaman lainnya dan rendahnya literasi masyarakat atas urgensi sebuah layanan keuangan bagi kehidupan dengan melakukan produksi yang memiliki ekspektasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita. Perhatian dalam mengatasi permasalahan pembangunan keuangan adalah meninjau aspek yang berada pada sebuah sistem keuangan dengan menangkap fenomena yang terjadi dalam suatu perekonomian.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada suri tauladan Nabi Muhammad Saw atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening* Di Indonesia”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Adhitya Wardhono, SE., M.Sc., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, saran, kritik dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini dan semua inspirasi serta ilmu kehidupan yang tidak pernah didapat di bangku kuliah, serta untuk kesempatan luar biasa yang diberikan mengukir prestasi internasional. Sebagai maha guru anda telah benar-benar menginspirasi;
2. Bapak Dr. Siswoyo Hari S., SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah bersedia membimbing penulis dengan arahan dan semangat dalam menyusun skripsi ini;
3. Ibu Ciplis Gema Qori'ah, SE., M.Sc, terima kasih atas motivasi, bantuan dan dukungan yang tidak pernah dapat dikuantifikasikan sehingga penulis dapat memperoleh wawasan yang luas tidak hanya bersifat formal dalam bangku kuliah serta memperlihatkan bahwa perjuangan masih sangat panjang untuk meraih cita-cita;
4. Bapak Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;

5. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Ibu Dr. Lilis Yuliati, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
7. Orang tuaku tercinta Ibunda Sri Winarnik dan Ayahanda Edi Winarno Raharjo yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan baik moral maupun material dengan penuh ketulusan, kesabaran, keiklasan, dan pengorbanan yang tiada batas;
8. Teman-teman konsentrasi ekonomi moneter angkatan 2011, terima kasih telah menjadi bagian sebuah coretan kisah yang manis dan seluruh perjuangan bersama yang tidak pernah terlupakan;
9. Kakak angkatan di konsentrasi ekonomi moneter, terima kasih atas bantuan dan dukungannya dalam segala hal;
10. Teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2011, terima kasih atas diskusi, *sharing* ilmu selama bangku kuliah;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna didunia, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun bagi penulis diharapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan .

Jember, 18 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Pembangunan Keuangan	7
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Life-Cycle</i> Tabungan dan Investasi	9
2.1.3 Teori Intermediasi Keuangan	11
2.1.4 Teori Perilaku Perbankan	14
2.1.5 Teori Lembaga dan Sistem Keuangan	16

2.1.6 Teori Stabilitas Sistem Keuangan	17
2.1.7 Teori Hubungan Keuangan-Pertumbuhan	20
2.1.8 Teori <i>Financial Inclusion</i> (inklusi keuangan)	21
2.1.9 Teori <i>Financial Deepening</i> (pendalaman keuangan)	23
2.2 Penelitian Sebelumnya	25
2.3 Kerangka Konseptual	36
2.4 Hipotesis Penelitian.....	40
2.5 Asumsi Penelitian	40
BAB 3. METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis dan Sumber Data	41
3.2 Desain Metode Penelitian	42
3.3 Metode Analisis Data	44
3.2.1 Metode eklektik untuk perhitungan indeks inklusi dan pendalaman keuangan	44
3.2.2 Sintesa <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP) dan <i>Game Theory</i>	45
3.2.2.a <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP)	47
3.2.2.b Teori Permainan (<i>Game Theory</i>)	54
3.3.3 Analisis Preskripsi	60
3.4 Definisi Variabel Operasional	60
3.5 Limitasi Penelitian	62
BAB 4. PEMBAHASAN	63
4.1 Konfigurasi Perkembangan Sistem Keuangan dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia	63
4.1.1 Sistem Keuangan di Indonesia	63
4.1.2 Deskripsi Interaksi Sistem Keuangan dan Pembangunan Ekonomi	67
4.1.3 Karakteristik Lembaga Keuangan di Indonesia	70
4.2 Analisis Hasil <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Deepening</i> di Indonesia.....	73

4.2.1 <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Deepening</i> di Indonesia	73
4.2.2 Sintesa <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) dan <i>Game Theory</i>	86
4.3 Pembahasan <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Deepening</i>	92
4.3.1 Dinamika <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Deepening</i> di Indonesia	93
4.3.2 Harmonisasi Sintesa <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) dan <i>Game Theory</i>	98
4.3.3 Preskripsi Interaksi <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Deepening</i>	102
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	111
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Sebelumnya	32
Tabel 3.1	Skala Komparasi Berpasangan	50
Tabel 3.2	Indeks Random (RI)	52
Tabel 3.3	<i>Matriks Pairwise comparison (Z)</i>	53
Tabel 4.1	Dinamika Kinerja Perbankan di Indonesia (%).....	66
Tabel 4.2	Pangsa Kredit dan DPK (Dana Pihak Ketiga) Pulau di Indonesia 2011-2013 dalam persen (%).....	69
Tabel 4.3	Dimensi 1 Penetrasi Perbankan (<i>Financial Inclusion</i>) 2004-2013 di Indonesia.....	76
Tabel 4.4	Dimensi 2 Ketersediaan Layanan Perbankan (<i>Financial Inclusion</i>) 2004-2013 di Indonesia.....	78
Tabel 4.5	Dimensi 3 Penggunaan (<i>Financial Inclusion</i>) 2004- 2013 di Indonesia	80
Tabel 4.6	Prioritas Strategi <i>Financial Deepening</i> Sehubungan dengan Tujuan	86
Tabel 4.7	Proses Normalisasi	87
Tabel 4.8	Prioritas Strategi <i>Financial Deepening</i> Sehubungan dengan Strategi <i>Financial Inclusion</i>	88
Tabel 4.9	<i>Pay-off Financial Deepening</i>	89
Tabel 4.10	Prioritas Strategi	90
Tabel 4.11	Proses Normalisasi	90
Tabel 4.12	Prioritas Strategi <i>Financial Inclusion</i> Sehubungan dengan Strategi <i>Financial Deepening</i>	91

Tabel 4.13	<i>Pay-off Financial Inclusion</i>	92
Tabel 4.14	Perhitungan Tentatif <i>Financial Inclusion</i> di Indonesia... ..	94
Tabel 4.15	Hasil Perhitungan IFD dan IFI di Indonesia	97
Tabel 4.16	Matriks <i>pay-off</i> Interaksi <i>Financial Deepening</i> dan <i>Financial Inclusion</i>	98

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Karakteristik sistem keuangan Indonesia 2012 (dalam persen).....	3
Gambar 2.1 Kondisi efek dan level pertumbuhan.....	8
Gambar 2.2 Pendapatan Seumur Hidup, Konsumsi, Tabungan, dan Kesejahteraan di Model <i>Life-Cycle</i>	10
Gambar 2.3 Transmisi Dana dalam Sistem Keuangan.....	13
Gambar 2.4 Siklus Pengawasan Risiko.....	15
Gambar 2.5 Keuangan Eksklusi dalam Keseimbangan Pasar.....	22
Gambar 2.6 Paradigma Empiris	31
Gambar 2.7 Kerangka Konseptual	39
Gambar 3.1 Desain Metode Penelitian.....	43
Gambar 3.2 Hirarki Interaksi Pendalaman dan Inklusi Keuangan.....	46
Gambar 3.3 <i>Matriks Pay-off</i> Suatu <i>Games</i>	56
Gambar 3.4 <i>Matriks Pay-off</i> suatu <i>Games</i>	56
Gambar 3.5 <i>Matriks pay-off</i>	57
Gambar 4.1 Pendekatan Teoritis Perkembangan Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	64
Gambar 4.2 Perkembangan kredit dan pertumbuhan ekonomi 2004-2013 di Indonesia (%).....	68
Gambar 4.3 Komposisi Aset Lembaga Keuangan di Indonesia.....	71
Gambar 4.4 Perkembangan jumlah bank umum di Indonesia	72
Gambar 4.5 <i>Index of Financial Inclusion</i> 2004-2013 di Indonesia	74
Gambar 4.6 Peran Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional di Indonesia 2008-2014	77
Gambar 4.7 Jumlah Penduduk Per Pulau di Indonesia 2014	79
Gambar 4.8 Luas Pulau di Indonesia	81

Gambar 4.9	<i>Index of Financial Deepening</i> 2004-2013 di Indonesia	82
Gambar 4.10	Inklusi dan pendalaman terhadap pertumbuhan ekonomi 2004-2013.....	83
Gambar 4.11	Peta Financial Inclusion di Indonesia.....	91
Gambar 4.12	<i>Index of Credit Depth</i> di Indonesia 2006-2014	93
Gambar 4.13	Perkembangan <i>Domestic Financial Asset</i> 2004-2013 (dalam persen) di Indonesia	98
Gambar 4.14	Perkembangan <i>Banking Penetration</i> (BPE) dan <i>Availability of Banking Service</i> (ABS) (Strategi Financial Inclusion) 2004-2013 di Indonesia.....	99
Gambar 4.15	Faktor-Faktor Pendukung Stabilitas Sistem Keuangan.....	101
Gambar 4.16	Skema Strategi <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Deepening</i> di Indonesia 2015	102
Gambar 4.17	Simulasi Hasil dan Kebijakan <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Deepening</i> di Indonesia. 2015.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran A	Kuesioner	120
Lampiran B	Matriks <i>pairwise comparison</i> sehubungan dengan tujuan <i>financial deepening</i>	132
Lampiran C	Matriks <i>pairwise comparison</i> sehubungan dengan <i>financial inclusion</i> dengan <i>financial deepening</i> : <i>Domestic Finacial Asset (DFA)</i>	137
Lampiran D	Matriks <i>pairwise comparison</i> sehubungan dengan <i>financial inclusion</i> dengan <i>financial deepening</i> : <i>Domestic Liabilities (DLA)</i>	142
Lampiran E	Matriks <i>pairwise comparison</i> sehubungan dengan <i>financial inclusion</i> dengan <i>financial deepening</i> : <i>Foreign Finacial Asset (FFA)</i>	147
Lampiran F	Matriks <i>pairwise comparison</i> sehubungan dengan <i>financial inclusion</i> dengan <i>financial deepening</i> : <i>Foreign Liabilites (FLA)</i>	152
Lampiran G	Matriks <i>pairwise comparison</i> sehubungan dengan tujuan <i>financial inclusion</i>	157
Lampiran H	Matriks <i>pairwise comparison</i> sehubungan dengan <i>financial deepening</i> dengan <i>financial inclusion</i> : <i>Banking Penetration (BPE)</i>	162
Lampiran I	Matriks <i>pairwise comparison</i> sehubungan dengan <i>financial deepening</i> dengan <i>financial inclusion</i> : <i>Availiability of Banking Service (ABS)</i>	167
Lampiran J	Matriks <i>pairwise comparison</i> sehubungan dengan <i>financial deepening</i> dengan <i>financial inclusion</i> : <i>Usage Credit and Deposito to Private Sector (UCD)</i>	172
Lampiran K	Matriks <i>pairwise comparison</i> sehubungan dengan <i>financial deepening</i> dengan <i>financial inclusion</i> : <i>Usage Credit and Deposito to Households (UCH)</i>	177

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan sistem keuangan menjadi relatif penting dalam suatu perekonomian negara di era globalisasi dewasa ini. Sektor keuangan dengan beragam produk-produk derivatifnya telah menjadi media penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin massif, sehingga seringkali perputaran dalam sistem keuangan mengakibatkan biaya transaksi yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan adanya *asymmetric information* yang dapat menimbulkan *adverse selection* dan *moral hazard* yang akhirnya akan menyebabkan inefisiensi (Schumpeter, 1934; Levine (1997,2000)). Pendapat lain memberi argumentasi yang berbeda seperti studi Meier dan Seers (1984). Studi tersebut menganggap sistem keuangan memiliki peran relatif kecil dalam pembangunan ekonomi, temuan ini sebangun dengan studi Lucas (1988) bahwa dalam kegiatan transaksi ekonomi tidak menyinggung peran sektor keuangan di dalamnya. Seiring dengan fluktuasi ekonomi yang dinamis, perbankan menjadi sektor dominan pada sistem keuangan yang akan meningkatkan tabungan dan mengakomodir pendanaan untuk investasi sehingga meningkatkan produktivitas modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai akibat adanya intermediasi keuangan (Fritzer, 2004; Kularatne, 2002).

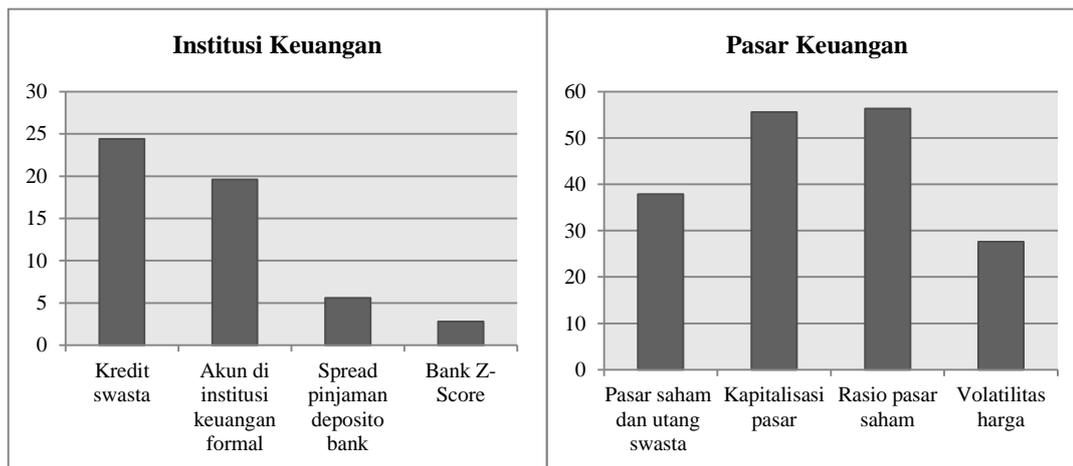
Stabilitas sistem keuangan merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi untuk memperbaiki alokasi sumber daya perekonomian. Sehingga untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi diperlukan dukungan sikronisasi aspek keuangan yakni *financial deepening* (pendalaman keuangan) dan *financial inclusion* (inklusi keuangan) untuk menciptakan keadaan yang seimbang dalam sistem keuangan sehingga berfungsi efisien dalam alokasi sumber dan mengelola risiko dan menjalankan fungsi pembayaran, mampu mengatasi *shock*, kebangkrutan dan perubahan struktural yang mendasar (McFarlane, 1999; Houben, *et, al*, 2004; Schinasi, 2006; Sharma, 2012; Nguena, 2013). Alokasi sumber pendanaan pembangunan dilakukan dengan melakukan peningkatan peran sektor keuangan untuk mewujudkan pembangunan secara

mandiri dan tidak bergantung dari bantuan luar negeri. Investasi sebagai salah satu dari upaya pemecahan masalah kekurangan modal (World Bank, 1994:235). Selanjutnya Aquist (2006), Nkoro dan Uko (2012) memiliki kesamaan pemikiran bahwa investasi menjadi faktor penting pembentukan modal dalam rangka pembangunan ekonomi yang menjadi bagian dari aktivitas transaksi keuangan. Transaksi ekonomi membutuhkan sistem keuangan yang baik yang akan dengan cepat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan baik sehingga memperluas akses pinjaman masyarakat; sebaliknya dalam sistem keuangan yang belum berkembang, akses pinjaman terbatas dan orang-orang yang dibatasi oleh ketersediaan dana diharuskan mencari sumber informal seperti rentenir (Kar dan Pentecost, 2000; Kar, Agir, dan Peker, 2010).

Salah satu kunci pendalaman keuangan adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses bagi yang memiliki keuangan yang kurang memadai. Pendalaman keuangan akan menimbulkan sektor industri keuangan, seperti industri perbankan yang secara kelembagaan akan kuat, sementara disisi lain inklusi keuangan didorong untuk menciptakan akses yang luas terhadap layanan keuangan masyarakat (Mohan, 2004; Andrianaivo dan Kpodar, 2011). Sehingga permasalahan utama interaksi pendalaman dan inklusi keuangan terletak pada terjadinya *trade off* antara pencapaian industri perbankan yang kuat dan kemudahan akses layanan keuangan masyarakat. Sinyal elemen yang dikemukakan World Bank (2011) mendisposisi bahwa Indonesia sebagai negara yang berkembang memiliki berbagai dinamika masalah ekonomi ditandai dengan 50 persen penduduknya tidak memiliki akun pada institusi keuangan formal dan dengan penyerapan kredit sebesar 9 persen di tahun yang sama. Sebesar 22 persen dari total populasi penduduk Indonesia yang menyimpan uangnya di institusi keuangan formal dan jumlah lainnya pada keuangan informal.

Peran industri perbankan di Indonesia di dalam perekonomian dikemukakan oleh Priyarsono, *et, al* (2011) yang melakukan analisa terhadap konsentrasi industri perbankan dengan metode *The Hirschman-Hefindahl* (HHL) dan *Concentration Ratio Four* (CR4) memaparkan bahwa penguasaan pasar dari kelompok perbankan mengalami penguatan dalam struktur perekonomian di

Indonesia. Sebagai negara yang sedang berkembang cenderung memiliki tujuan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi karena bagian dari upaya pencapaian penggunaan optimal pada sumber daya yang dimiliki, Indonesia memiliki target pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu 7 hingga 9 persen namun dalam proses pembangunan yang dihadapi memiliki keterbatasan modal (Djunedi, 2014).



Gambar 1.1 Karakteristik sistem keuangan Indonesia 2012 (dalam persen). Sumber: Global Financial Development Report 2014.

Gambar 1.1 menggambarkan suatu karakteristik sistem keuangan di Indonesia pada tahun 2012 dimana terdapat dua aspek yakni institusi dan pasar keuangan. Secara keseluruhan pasar keuangan mengalami pergerakan transaksi dibandingkan aktivitas institusi keuangan. Institusi dalam hal ini adalah lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam mendukung berjalannya aktivitas keuangan (Mc Kinnon, 1973). Jumlah akun di institusi keuangan formal lebih rendah dibandingkan kredit yang tumbuh pada gambar 1.1, kondisi ini menggambarkan bahwa dalam sistem keuangan formal dapat memberi kemudahan untuk mengakses jasa keuangan mulai dari tabungan, pembayaran, dan transfer ke kredit dan asuransi (Hannig dan Jansen, 2010). Hal tersebut mewujudkan suatu proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk seluruh pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta (Sarma, 2008).

Tahapan inklusivitas Indonesia yang belum mapan ditinjau dari rendahnya akses disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional

lembaga keuangan yang rumit, lemahnya edukasi keuangan, biaya administrasi lembaga keuangan yang tinggi serta jauhnya lokasi lembaga keuangan dari masyarakat (King dan Levine, 1993; Rajan dan Zingales, 1998; Chami, Fullenkamp dan Sharma, 2009; Goswami dan Sharma, 2011). *Financial inclusion* (Inklusi keuangan) merupakan upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Untuk mewujudkan program inklusi keuangan maka peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung perluasan akses kepada masyarakat miskin dan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Akses masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi salah satu kunci berfungsinya sistem keuangan secara optimal. Jika masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan dengan mudah, maka akan mendorong peningkatan perputaran modal. Lembaga keuangan dapat melaksanakan pemerataan modal di dalam masyarakat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Soetiono, K.S, 2014).

Struktur keuangan di Indonesia cenderung mengacu pada *bank based* yang *underdeveloped* (Kunt dan Levine, 1999) sebelum dan pasca deregulasi yang dilakukan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan sebagai bagian dari reformasi keuangan (Nasution, 1991). Sejarah sistem keuangan mengalami perubahan dan perkembangan setelah era deregulasi pada akhir dekade 1980-an. Bank Indonesia pada tahun 2004 memutuskan pertama kalinya melakukan konsolidasi perbankan pasca krisis. Sejalan dengan itu pada tahun 2011 dijuluki dimensi baru karena pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan bukan bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 tahun 2011). Pengalihan tugas ini menjadi bentuk sinergitas BI selaku otoritas moneter yang menangani kebijakan keuangan secara makro dan OJK yang cenderung melakukan tugas yaitu mengatur keuangan secara mikro dalam bentuk pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan terkait pada pendalaman suatu keuangan. Perekonomian Indonesia yang sesungguhnya belum mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan, kontinuitas besaran pertumbuhan yang stabil dan menunjukkan tren meningkat menjadi tujuan bersama dalam perekonomian, maka secara umum pembangunan institusional merupakan prasyarat yang harus dipenuhi Indonesia guna mencapai tujuan

pertumbuhan yang ambisius didukung dengan regulasi yang tepat (Mohan, 2004). Kondisi ini menjadi landasan bagi pemangku kebijakan dalam berkoordinasi mencapai tujuan yang optimal. Interaksi yang terbangun dengan melakukan evaluasi kebijakan keuangan secara baik dapat menciptakan harmonisasi dalam proses koordinasi. Kontinuitas pembangunan sektor industri keuangan melalui inklusi dan pendalaman keuangan dalam perannya sebagai fungsi intermediasi keuangan menjadi salah satu peran penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *financial inclusion* dan *financial deepening* terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia?. Dari pertanyaan tersebut, dapat dirinci menjadi:
 - 1.a. seberapa besar ukuran *financial inclusion* di Indonesia?
 - 1.b. seberapa besar ukuran *financial deepening* di Indonesia?
2. Bagaimana paparan harmonisasi antara fenomena *financial inclusion* dan *financial deepening* terhadap kemungkinan stabilitas sistem keuangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh inklusi dan pendalaman keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Tujuan penelitian dapat dirinci yaitu:
 - 1.a. mengukur inklusi keuangan di Indonesia.
 - 1.b. mengukur pendalaman keuangan di Indonesia.
2. Menganalisis paparan harmonisasi antara fenomena *financial inclusion* dan *financial deepening* terhadap kemungkinan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan tidak sekedar menjadi pelengkap memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan namun lebih dari itu diharapkan memberi kemanfaatan bagi berbagai pihak yaitu berupa:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan tambahan verifikasi empiris pengujian eksistensi teori yang ada.
 - b. Dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang ilmu ekonomi dan telaah konsepsional ekonomi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menjadi tolak ukur terbaru atas implikasi kebijakan dalam pengukuran, penghitungan, dan pengimplementasian kondisi yang ada terhadap tingkat *inclusion* dan *deepening* suatu kinerja keuangan di Indonesia dengan pernik persipsional yang dihadirkan oleh pakar yang terhimpun dalam eksplorasi data yang dilakukan dalam penelitian ini.
 - b. Dapat menjadi wacana tambahan dan menyemai pertanyaan empiris yang lebih kritis dari para agen ekonomi praktis terkait studi *financial inclusion* dan *financial deepening* di Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

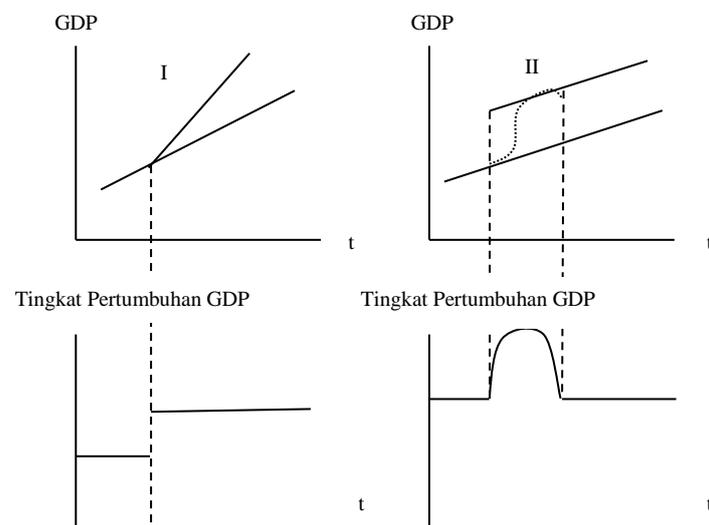
2.1.1 Teori Pembangunan Keuangan

Berbagai jenis unsur pembangunan yang ada untuk memperbaiki friksi pasar, bahwa sistem keuangan secara alami memengaruhi alokasi sumber daya di seluruh ruang dan waktu (Merton dan Bodie, 1995:12). Misalnya, munculnya bank yang meningkatkan perolehan informasi tentang perusahaan dan manajer akan mengubah alokasi kredit. Demikian pula, kontrak keuangan yang membuat investor lebih percaya diri bahwa perusahaan akan membayar kembali yang kemungkinan akan memengaruhi orang mengalokasikan tabungan. Terdapat lima fungsi yang luas yang disediakan oleh sistem keuangan untuk pembangunan keuangan dalam mengatur sistem keuangan memengaruhi tabungan dan keputusan investasi dan pertumbuhan (Merton, 1992; Merton dan Bodie, 1995, 2004). Secara khusus, sistem keuangan diyakini dapat menghasilkan informasi investasi dan mengalokasikan modal dan memantau Investasi serta mengerahkan tata kelola perusahaan setelah memberikan pembiayaan, memfasilitasi perdagangan, diversifikasi, dan manajemen risiko, memobilisasi tabungan, kemudahan pertukaran barang dan jasa.

Integrasi hubungan antara keuangan dan teori pertumbuhan ekonomi terlihat dari dua poin umum yang layak ditekankan sejak terdahulu yaitu (Levine, 1998; 2005). Pertama, dalam sebuah literatur akuntansi pertumbuhan yang besar ditunjukkan oleh akumulasi modal fisik tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Jorgenson, 1995, 2005). Pertama, dalam sebuah literatur akuntansi pertumbuhan yang besar ditunjukkan oleh akumulasi modal fisik tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Jorgenson, 1995, 2005). Dengan demikian, pengaturan keuangan yang meningkatkan alokasi sumber daya dan risiko yang lebih rendah dapat menurunkan tingkat tabungan. Dalam model pertumbuhan dengan eksternalitas modal fisik, oleh karena itu, pengembangan keuangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih rendah jika penurunan tabungan dan eksternalitas

bergabung untuk menghasilkan efek yang cukup besar. Ambiguitas ini adalah masalah umum pada hampir semua model pembangunan keuangan.

Studi Thiel (2001) dengan menggunakan pendekatan hubungan lembaga keuangan dengan informasi dan biaya agen asimetris memberikan peran sistem keuangan yang lebih menonjol dalam mencapai alokasi modal yang efisien. Lembaga keuangan cenderung menumpuk pengetahuan khusus dalam evaluasi dan memantau proyek-proyek investasi dan memiliki keunggulan komparatif dalam evaluasi risiko dan merancang kontrak keuangan. Pada kasus tertentu aktivitas industri perbankan mendapatkan keuntungan dari informasi yang berlangsung dalam kaitannya dengan pelanggan yang memiliki pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, sebuah peningkatan dalam efisiensi sistem keuangan dapat menyebabkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Penjabaran pada gambar 2.1 adalah kondisi level dan efek pertumbuhan yang diawali dengan kuadran satu (I) yaitu tingkat kenaikan pertumbuhan yang permanen kemudian diturunkan menghasilkan keadaan tingkat pertumbuhan tertentu, lain halnya pada kuadran kedua (II) yang merupakan pergeseran dari jalur pertumbuhan akan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.



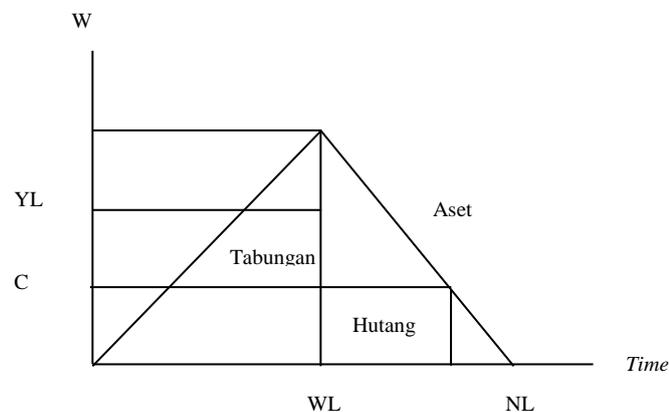
Gambar 2.1 kondisi efek dan level pertumbuhan

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi dan *Life-Cycle* Tabungan dan Investasi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada (Kuznets, 1971). Pembangunan kelembagaan dalam hal ini cenderung ditinjau dari sektor industri keuangan menunjukkan bahwa, pembentukan suatu sistem yang teratur dapat mendukung terwujudnya pembiayaan transaksi ekonomi pada pelaku ekonomi. Sistem keuangan terdiri atas unit-unit lembaga keuangan baik institusi perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank serta pasar yang saling berinteraksi secara rumit dengan tujuan memobilisasi dana untuk investasi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran untuk aktivitas yang produktif (Beck, *et al*, 2000; Buckland, *et al*, 2005).

Logika diatas secara rinci dapat dipaparkan dalam kerangka fungsi sistem keuangan seperti yang diperinci oleh Merton (1995) sebagaimana berikut: (1) Memudahkan terjadinya perdagangan atau perpindahan barang dan jasa, (2) Diversifikasi produk, (3) Mekanisme untuk mengatasi akibat informasi yang tidak berimbang (*asymmetric information*) yang muncul pada transaksi keuangan dimana tidak semua pihak mempunyai informasi yang sama, (4) Mengelola potensi risiko yang mungkin terjadi dengan menyediakan informasi untuk keputusan alokasi sumber daya, (5) Mengelola ketidakpastian dan melakukan kontrol terhadap risiko, (6) Mobilisasi tabungan, dan (7) Sistem pembayaran. Institusi-institusi di dalam pasar keuangan (*financial market*) merupakan pihak yang dapat mensuplai dana secara langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut. Sedangkan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) adalah institusi-institusi keuangan dimana pihak yang menabung menyediakan dana secara tidak langsung kepada pihak peminjam. Istilah perantara (*intermediary*) mencerminkan peranan dari institusi-institusi ini dalam mempertemukan pihak penabung dengan pihak peminjam.

Pemahaman atas konsepsi pertumbuhan ekonomi dalam dinamika agen ekonomi yang mengedepankan perilaku portofolio keuangannya dalam rupa investasi dan tabungan dalam *The life-cycle permanent income theory of consumption and saving* yang dikemukakan (Modigliani, 1986), dimana menjelaskan tentang pilihan bagaimana memelihara standar hidup yang stabil dalam menghadapi perubahan pendapatan dalam waktu hidup seseorang. Hal ini menggambarkan hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. *The life cycle hypothesis* melibatkan individu dalam merencanakan perilaku konsumsi dan perilaku tabungan dalam jangka panjang.



Gambar 2.2 Pendapatan Seumur Hidup, Konsumsi, Tabungan, dan Kesejahteraan di Model *Life-Cycle*.

- WR = Kesejahteraan
- WL = Kehidupan kerja
- YL = Pendapatan tenaga kerja tahunan
- NL = Jumlah tahun hidup
- C = Konsumsi

Gambar 2.2 memaparkan bahwa konsumsi terlihat konstan sepanjang waktu selama masa kerja (WL tahun), sehingga individu menabung dan mengumpulkan aset. Perilaku ini pada akhir masa kerjanya menimbulkan sikap individu yang mulai menarik kembali aset-aset tersebut, tidak menabung pada masa sisa hidupnya (NL-WL) sehingga aset tersebut akan bernilai nol pada akhir hidupnya.

2.1.3 Teori Intermediasi Keuangan

Studi intermediasi keuangan berawal dari konsepsi asimetri informasi yang diyakini menghasilkan ketidaksempurnaan pasar dengan biaya transaksi tambahan yang hadir. Studi Diamond (1984) menunjukkan bahwa sebuah intermediasi dalam meningkatkan skala ekonomi serta sebagai monitoring atas transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Begitu pula studi empiris yang mengemuka seperti Hart (1995), Hart dan Moore (1995), Qi (1998), Diamond dan Rajan (2001) menyatakan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga (*households*) secara perlahan akan memengaruhi iklim investasi yang menciptakan perbaikan dalam manajemen perbankan dengan bertambahnya modal yang diterima oleh pihak lembaga keuangan. Pada titik ini maka pembangunan dalam intermediasi keuangan lebih pada pemahaman proses pelaksanaan sebuah intermediasi dengan mengedepankan tujuan utama perekonomian.

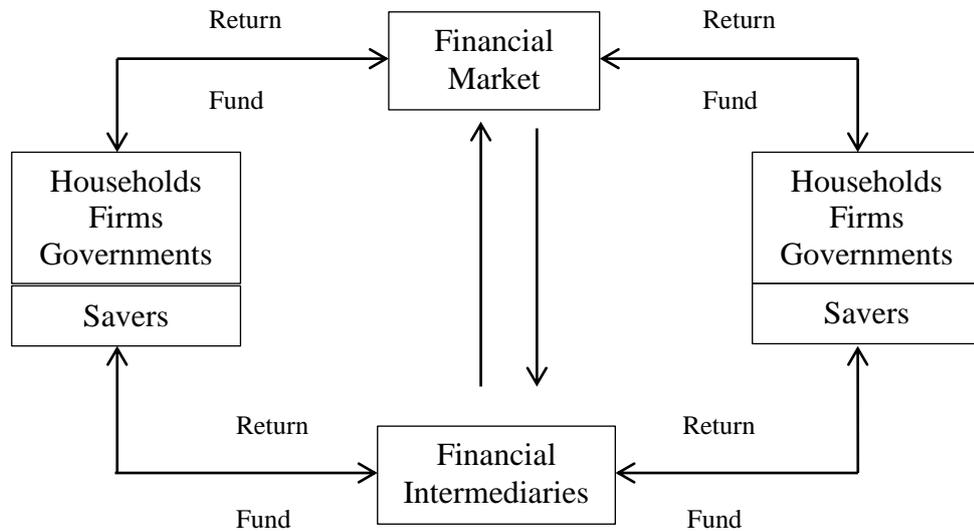
Intermediasi keuangan merupakan pengalihan dana dari penabung (*ultimate lenders*) kepada peminjam (*ultimate borrowers*). Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan dalam lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain dapat berupa saham, obligasi, *commercial paper*, perjanjian kredit dan sebagainya. Sementara yang termasuk sekuritas sekunder adalah giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana dan sebagainya.

Perantara keuangan mempunyai peran ganda dalam kegiatan ekonomi yaitu peran transmisi dan intermediasi (Insukindro, 1990). Kedua peran tersebut dalam rangka untuk meniadakan transaksi tambahan yang terjadi antar agen ekonomi dalam perekonomian. Proses intermediasi yang tidak berjalan dengan baik maka menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan program keuangan di masyarakat dan terhambatnya bantuan masyarakat yang digunakan untuk proses produksi yang dapat menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. Bikker dan Wesseling (2003) menyatakan bahwa fungsi intermediasi perbankan mengalami perubahan akibat lingkungan ekonomi dan perkembangan pasar terutama di negara-negara maju (*industrialized countries*) seperti Uni Eropa.

Faktor-faktor yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi, deregulasi, liberalisasi, internasionalisasi menjadi penyebab tidak relevan dengan praktik bisnis yang terjadi saat ini. Globalisasi dan tingkat persaingan yang terjadi diantara lembaga perbankan dan pasar modal juga memengaruhi aktivitas intermediasi perbankan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *merger* dan akuisisi untuk meningkatkan asset perbankan dan hal ini tidak saja terjadi pada negara-negara maju tetapi pada negara-negara berkembang (Mian, 2003; Bikker dan Wesseling, 2003).

Fungsi intermediasi dapat dilaksanakan dengan optimal jika memiliki permodalan yang cukup, meskipun dana pihak ketiga yang dihimpun besar apabila tidak diimbangi dengan tambahan modal maka bank akan memiliki hambatan dalam menyalurkan kredit. Senada dengan hal tersebut Kishan dan Opiela (2000) menemukan bahwa pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh aset dan modal bank. Oleh karenanya lembaga keuangan membutuhkan sebuah inovasi keuangan dalam pelaksanaan transaksi ekonomi yang terjadi (Miller, 1986).

Sebuah inovasi diperlukan untuk menggalang sejumlah dana pihak ketiga untuk dapat disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat dalam menjalankan proses produksi. Dana yang terdapat di perbankan merupakan intermediasi keuangan pada jalur tidak langsung diaman perantara keuangan menghubungkan antara penabung dan peminjam. Perantara keuangan memainkan peran yang cukup penting bagi intermediasi keuangan bank dan intermediasi keuangan *non-bank*. Penyaluran dalam bentuk kredit oleh perbankan tidak sedikit menimbulkan risiko pengembalian sehingga penyerapan risiko adalah fungsi utama dari lembaga intermediasi seperti perbankan. Berikut adalah alur dalam transmisi dana sistem keuangan yang terjadi pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Transmisi Dana dalam Sistem Keuangan. Sumber: [Hubbart, 2002](#).

Berdasarkan Gambar 2.3 menunjukkan keberadaan transmisi antara dua elemen penting sistem keuangan dan juga perbedaan mendasar antara dua elemen penting tersebut yaitu logika pada pasar keuangan yang menghubungkan secara langsung antara penabung (*savers*) dan peminjam (*borrowers*). Pihak penabung individu memegang instrumen keuangan yang diterbitkan secara langsung oleh pihak peminjam individu. Sedangkan lembaga keuangan menghubungkan penabung dan peminjam secara tidak langsung. Lembaga ini memfasilitasi perdagangan keuangan dengan mengumpulkan dana dari penabung dan kemudian menginvestasikannya dalam bentuk utang yang diterbitkan oleh peminjam.

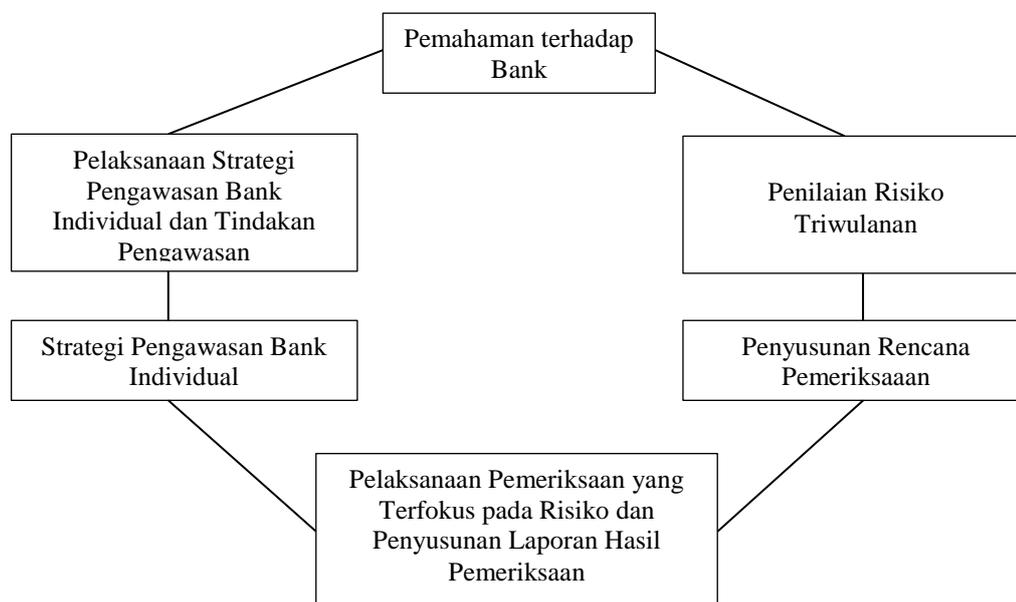
2.1.4 Teori Perilaku Perbankan

Tugas utama perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali melalui kredit atau pinjaman lainnya dan kegiatan jasa bank lainnya. Secara spesifik fungsi bank yaitu pertama, *agent of trust* adalah kepercayaan baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dana dilandasi oleh unsur kepercayaan. Kedua, *agent of development* sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran di sektor riil.

Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi dan juga konsumsi yang selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Ketiga, *agent of service* adalah jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank dengan kegiatan perekonomian secara umum. Jasa tersebut berupa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan. Jangka pendek bank menghadapi masalah dalam manajemen likuiditas dan memaksimalkan komposisi portofolio dalam mendapatkan tingkat keuntungan yang maksimal. Sedangkan dalam jangka panjang perbankan akan berhubungan dengan risiko gejolak perekonomian sebagai bentuk penurunan investasi akibat risiko kegagalan pasar keuangan. Oleh karenanya perbankan perlu diawasi dalam menjalankan tugas pengawasan bank.

Bagi Indonesia pelaksanaan sistem pengawasan keuangan dikaitkan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu berdasarkan kepatuhan dan berdasarkan risiko. Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

Pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan. Implementasi menggunakan pendekatan tersebut menghasilkan suatu bank untuk difokuskan pada risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko. Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank. Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko memiliki siklus pengawasan sebagai berikut pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Siklus Pengawasan Risiko

Berdasarkan Gambar 2.4 yaitu mengenai siklus pengawasan risiko tentang perbankan bahwa penilaian risiko terhadap jenis-jenis risiko perbankan patut diketahui sebagai bentuk peringatan dini terhadap krisis sehingga perbankan mampu menyusun strategi dalam tindakan pengawasan dalam suatu sistem keuangan bank. Kondisi perekonomian yang terbuka menyebabkan integrasi diberbagai sektor perekonomian oleh perilaku perbankan domestik yang menjadi perdebatan para ahli. Globalisasi di sektor keuangan dan perbankan akan memberikan manfaat berupa perbaikan kelembagaan dan peraturan maupun pengawasan yang mengarahkan penggunaan modal menjadi lebih produktif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perilaku bank saat menanggapi adanya gejolak yang dimiliki menyebabkan berkurangnya deposito karena ketatnya kebijakan moneter maupun kondisi sistemik pada perekonomian. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya sumber pendanaan yang ditransmisikan ke perekonomian riil dengan penurunan jumlah pinjaman. Saat pinjaman mengalami penurunan maka dalam skema transaksi ekonomi melalui aktivitas produksi akan berpengaruh ditandai atas penurunan produktivitas yang berakibat pada laju pertumbuhan ekonomi (Levine, 1997).

2.1.5 Teori Lembaga dan Sistem Keuangan

Sistem keuangan berfungsi untuk mengalihkan dana dari penabung (*lender/savers*) kepada peminjam (*borrower/spender*) untuk membiayai kegiatan yang produktif. Dana dapat berpindah dari penabung (unit surplus) ke peminjam (unit defisit) dalam 3 (tiga) cara, yaitu Pembiayaan Langsung (*Direct Finance*), Pembiayaan Semi Langsung (*Semi Direct Finance*), dan Pembiayaan Tidak Langsung (*Indirect Finance*). Berikut ini akan dijelaskan masing masing cara.

1. Pembiayaan Langsung adalah pemberian kredit/pembiayaan langsung dilakukan oleh pemilik dana (unit surplus) ke peminjam (unit defisit) tanpa melibatkan lembaga intermediasi keuangan, sehingga ada penyerahan bukti hutang, seperti obligasi, saham atau promes kepada unit surplus. Bukti hutang atau surat berharga ini merupakan sekuritas primer.
2. Pembiayaan Semi Langsung merupakan proses pemindahan dana yang dipinjamkan dari unit surplus ke unit defisit menggunakan perantara perorangan atau institusi. Pembiayaan dapat dilakukan dalam dua cara yaitu melalui bank investasi (*investment bank*) atau broker/dealer. Jika dilakukan dengan menggunakan jasa bank investasi dan bank tersebut berfungsi sebagai *underwriting* surat berharga, maka transaksi ini dikenal sebagai pasar perdana (*primary market*). Pasar perdana merupakan pasar keuangan dimana surat berharga pertama kali dikeluarkan dan dijual kepada pembeli awal yang disebut dengan IPO (*Initial Public Offering*). *Underwriting* surat berharga merupakan institusi yang menjamin suatu harga dari surat berharga tertentu dan kemudian menjualnya kepada masyarakat. Jika dilakukan dengan menggunakan jasa broker/dealer maka transaksi ini dikenal dengan pasar sekunder (*secondary market*). Pasar sekunder merupakan pasar keuangan dimana surat berharga diperdagangkan setelah dikeluarkan oleh bursa. Broker merupakan agen dari investor yang mempertemukan pembeli dan penjual surat berharga; sedangkan dealer merupakan penghubung pembeli dan penjual surat berharga dengan cara membeli dan menjual pada saat transaksi.
3. Pembiayaan Tidak Langsung merupakan proses pemindahan dana pinjaman dari unit surplus ke unit defisit melalui lembaga intermediasi keuangan seperti

bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, pembiayaan sekuritas dan reksadana. Penggunaan lembaga intermediasi penting dalam perekonomian karena dapat mengatasi kelemahan yang ada dalam pembiayaan langsung.

Lembaga keuangan memegang peranan penting dalam sistem keuangan negara dimana lembaga keuangan bank maupun bukan bank menjadi pondasi struktur keuangan yang diakses oleh masyarakat dan agen-agen ekonomi yang ada (Cheng dan Degryse, 2006). Agen-agen ekonomi mendapatkan pasokan dana dari lembaga keuangan yang didistribusikan pada aktivitas ekonomi yang terjadi seperti produksi, konsumsi, dan investasi sebagai tambahan pendapatan masyarakat. Lembaga keuangan bank sebagai lembaga formal yang menjadi perantara intermediasi pemilik dan peminjam dana bertindak aktif dalam hal pengawasan serta evaluasi penggunaan keuangan di pasar sehingga alur dana yang digunakan memiliki efek ganda yang menambah pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Peachey dan Roe, 2004; Vaona, 2005).

2.1.6 Teori Stabilitas Sistem Keuangan

Aras teoritis stabilitas sistem keuangan menjadi begitu penting dalam suatu kompleksitas perekonomian. Paling tidak studi Chant (2003) menyatakan instabilitas adalah keadaan pasar yang merugikan perekonomian yang mengancam kinerja ekonomi sehingga melumpuhkan kondisi keuangan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah dan membuat arus dana terbatas. Keadaan juga mengganggu fungsi dan operasi lembaga keuangan. Crockett (1996) mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai ketiadaan instabilitas. Instabilitas sebagai situasi ekonomi yang terganggu karena fluktuasi harga aset keuangan yang besar atau ketika lembaga keuangan gagal memenuhi kewajiban yang sudah diperjanjikan. Sementara Deutsche Bundesbank (2003) menggambarkan stabilitas keuangan sebagai keadaan seimbang sistem keuangan sehingga berfungsi efisien dalam alokasi sumber dan mengelola risiko dan menjalankan fungsi pembayaran, mampu mengatasi kejutan ekonomi, kebangkrutan dan perubahan struktural yang mendasar.

Mishkin (1999) menyatakan instabilitas keuangan terjadi ketika kejutan terhadap sistem keuangan karena masalah arus informasi sehingga sistem keuangan tidak mampu menjalankan fungsinya menyalurkan dana ke dalam investasi produktif. Sementara itu, Schinasi (2006) mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai kondisi di mana sistem keuangan: (1) secara efisien memfasilitasi alokasi sumber daya dari waktu ke waktu, dari deposan ke investor, dan alokasi sumber daya ekonomi secara keseluruhan; (2) dapat menilai/mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko keuangan; (3) dapat dengan baik menyerap gejolak yang terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi. Dari semua definisi di atas dapat diringkas secara sederhana kestabilan keuangan adalah tidak adanya krisis yang berarti situasi di mana ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian, sehingga fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran risiko tetap berjalan dengan semestinya.

Houben, Kakes & Schinasi (2004) menyatakan tiga alasan SSK penting: (1) stabilitas moneter hanya dapat terwujud dengan adanya stabilitas keuangan, karena sistem keuangan merupakan transmisi kebijakan moneter; (2) perkembangan ekonomi ditandai dengan meningkatnya risiko bagi perekonomian suatu negara di antaranya adalah perkembangan sektor keuangan yang sangat signifikan dibanding perkembangan ekonomi, proses *financial deepening* sangat cepat yang ditandai dengan berubahnya komposisi aset dalam sistem keuangan di mana pangsa *monetary assets* (agregat) semakin turun sementara pangsa *non-monetary assets* sehingga semakin meningkatkan *monetary base*. Keadaan diperparah dengan Globalisasi dan *cross border integration* menyebabkan semakin terintegrasinya sistem keuangan nasional ke dalam sistem keuangan global yang biasa dikatakan tanpa sistem; (3) keterkaitan terjadinya kenaikan transaksi antar industri dan antar pasar antar negara membuat makin terintegrasinya pasar keuangan sehingga kegagalan satu pasar di luar negeri biasa menjadi sumber krisis di dalam negeri; (4) sistem keuangan makin kompleks di mana unsur menyembunyikan risiko, keragaman aktivitas dan investasi serta siapa yang menanggung risiko akhir makin tidak jelas. Dari keempat alasan tersebut terlihat bahwa stabilitas keuangan makin rawan karena sistem keuangan

berkembang lebih cepat dari ekonomi riil dan bahkan cenderung terjadi pemisahan (*decoupling*), terjadinya kenaikan kedalaman keuangan (*financial deepening*) dan komposisi aset yang berubah serta pasar yang makin luas dan terkait menyebabkan proses penularan (*contagion*) berjalan makin cepat.

Sistem keuangan yang stabil akan menjadi fondasi berjalannya aktivitas ekonomi keuangan yang efisien. Tengara sistem keuangan yang stabil juga menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan, termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah kecil. Pada akhirnya mendorong fungsi intermediasi keuangan yang efisien sehingga pada akhirnya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi efisiensi alokasi, stabilitas sistem keuangan yang terjaga juga mendorong beroperasinya pasar dan memperbaiki alokasi sumber daya perekonomian.

Dalam mencapai stabilitas sistem keuangan, McFarlane (1999) menyatakan ada beberapa syarat yang harus ada yaitu: (1) stabilitas lingkungan makroekonomi yang dicirikan dengan rendah dan stabilnya inflasi, stabilnya suku bunga dan kuatnya keseimbangan internasional; (2) kesehatan kondisi lembaga keuangan terkait aspek prudensial, efisiensi dan tata kelola; (3) efisiensi pasar keuangan yang ditandai dengan bekerjanya lembaga keuangan secara efisien; (4) pengawasan yang baik dan pruden oleh otoritas pengawas keuangan; (5) sistem pembayaran yang aman dan akurat.

2.1.7 Teori Hubungan Keuangan-Pertumbuhan

Sebuah kesepakatan umum di antara para ekonom bahwa perkembangan keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sistem keuangan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Rajan dan Zingales, 2003). Kenyataan ini dipertegas oleh bukti empiris yang menekankan hubungan antara keuangan dan pertumbuhan yang ada. Menurut King dan Levine (1993a), Levine dan Zervos (1998) pada beberapa negara menunjukkan bahwa langkah-langkah pembangunan keuangan berhubungan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain juga membangun hubungan afirmatif antara pembangunan

keuangan dan pertumbuhan ditunjukkan oleh studi Beck, *et al* (2006) yang menggunakan pendekatan Rajan dan Zingales (1998) telah memberikan bukti tambahan bahwa perkembangan keuangan memengaruhi pertumbuhan pada sebagian besar sektor prioritas melalui pinjaman pada kegiatan ekonomi di India. Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa akses ke keuangan memiliki hubungan langsung dengan inovasi yang diciptakan (Levine dan Beck, 2000).

Temuan bahwa keuangan mendorong pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas (Ayyagari, Demirguc-Kunt, dan Maksimovic, 2007). Selanjutnya, juga telah mengungkapkan bahwa pembangunan keuangan memainkan peran penting dalam memoderasi dampak guncangan eksternal terhadap perekonomian domestik (Beck, Lundberg, dan Majnoni, 2006). Selain perdebatan mengenai peran keuangan dalam pembangunan ekonomi, ekonom juga memperdebatkan kepentingan relatif dari sistem keuangan berbasis bank dan untuk waktu yang lama (Demirguc-Kunt dan Levine, 2001). Schumpeter (1934) berpendapat bahwa bank mengendalikan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut perspektif ini, sektor perbankan menyebabkan transformasi di jalur kemajuan ekonomi dengan menenangkan alokasi tabungan dan, tentu saja, tidak harus dengan mengubah tingkat tabungan. Sebagian besar, pandangan keuangan dan pembangunan menyoroati dampak bank pada pertumbuhan produktivitas.

Sektor perbankan dapat berpengaruh positif pada perekonomian secara keseluruhan, dan, karenanya, adalah penting bagi struktur makroekonomi (Jaffe dan Levonian, 2001; Rajan dan Zingales, 1998). Hal ini ditetapkan bahwa bank dikembangkan lebih baik dan pasar yang terkait erat dengan pertumbuhan yang lebih cepat (Christopoulos dan Tsionas, 2004). Peningkatan fungsi bank dapat meningkatkan alokasi sumber daya dan mempercepat pertumbuhan (Levine, dan Zervous, 1998). Sejalan dengan itu, dengan membantu manajemen risiko, meningkatkan likuiditas aset yang tersedia untuk penabung, dan dengan menurunkan biaya perdagangan, bank dapat meramaikan investasi dalam kegiatan ekonomi yang potensial (Greenwood dan Smith, 1997). Arah hubungan pada produktivitas suatu negara dan pertumbuhan menjadi ukuran perbankan dalam

menyalurkan pendanaan pada kegiatan produktif masyarakat yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan jangka panjang (Vaona, 2005).

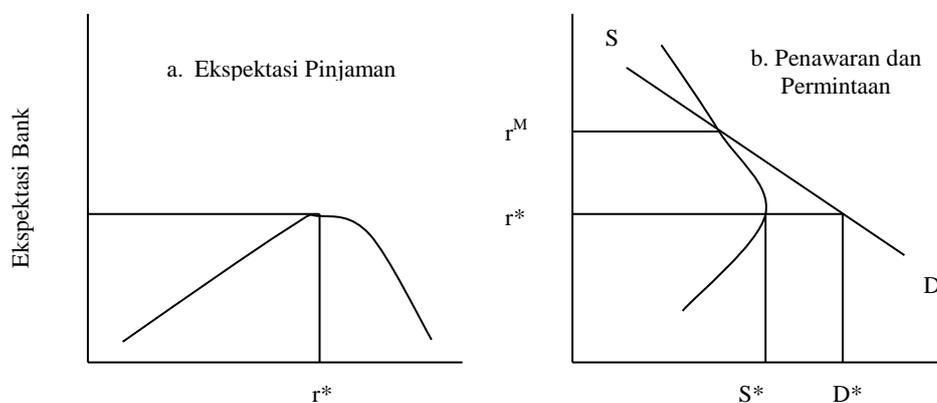
2.1.8 Teori *Financial Inclusion* (Inklusi Keuangan)

Keuangan inklusi diawali dengan *financial exclusion* dengan hampir 3 miliar orang dari jasa keuangan formal di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap lembaga jasa keuangan. Pengecualian keuangan adalah konsep yang rumit dan masalah terhadap perbedaan antara akses dan penggunaan. (Kempson dan Whyley, 1999). Dalam tataran Bank Dunia (2005) pengecualian keuangan meliputi empat bidang penting yakni tabungan, kredit, transaksi perbankan, dan asuransi. Secara umum, pengecualian keuangan dapat didefinisikan secara luas sebagai ketidakmampuan untuk mengakses layanan keuangan dasar karena komplikasi yang menyertai dengan akses, kondisi, harga, pemasaran atau pengecualian diri dalam menanggapi pengalaman yang tidak menguntungkan atau persepsi individu maupun entitas.

Bagian yang umumnya dikecualikan adalah petani marjinal, buruh tani, sektor yang tidak terorganisir, penghuni daerah kumuh perkotaan, migran, etnis minoritas dan perempuan. Beberapa alasan untuk pengecualian adalah kurangnya kesadaran, berpenghasilan rendah, pengucilan sosial, buta huruf, penduduk jarang di daerah terpencil dan berbukit dengan infrastruktur yang buruk dan kurangnya akses fisik, susahya prosedur kredit informal memerlukan bukti identitas dan alamat, biaya dan denda yang tinggi, produk generik yang saat ini di pasar tidak memenuhi kebutuhan bagian yang dikecualikan secara finansial.

Salah satu isu yang lebih menarik mengenai rendahnya tingkat inklusi keuangan dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan tinggi (Kempson et al., 2004). Beck et al. (2007) telah meneliti penjangkauan sektor keuangan dan faktor-faktor yang dengan menggunakan data lintas negara. Bahkan, di negara maju juga, penelitian telah mengungkapkan bahwa pengecualian dari sistem keuangan terjadi untuk kelompok berpenghasilan rendah, etnis minoritas, imigran dan lain-lain (Barr, 2004; Kempson dan Whyley, 1998; Connolly dan Hajjaj, 2001). Dengan demikian, negara-negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan rendah

cenderung memiliki tingkat inklusi keuangan yang relatif tinggi (Buckland et al, 2005; Kempson dan Whyley, 1998).



Gambar 2.5 Keuangan eksklusif dalam keseimbangan pasar. Sumber: Stiglitz dan Weiss (1961).

Sementara Leyshon dan Thrift (1995) menjelaskan pengecualian keuangan merupakan proses seperti bantuan untuk mencegah beberapa kelompok sosial dan individu dari mendapatkan akses ke sistem keuangan formal, studi yang dilakukan oleh Carbo et al. (2005) dan Conroy (2005) berpendapat bahwa itu adalah keadaan ketidakmampuan beberapa kelompok masyarakat miskin dan kurang beruntung untuk mengakses sistem keuangan. Penuturan Mohan (2006) lebih spesifik yaitu adanya alasan bahwa pengecualian keuangan menyiratkan kurangnya akses oleh beberapa segmen masyarakat untuk, murah cocok, adil dan aman produk dan jasa keuangan dari penyedia utama. Berikutnya alasan yang dibuat di atas, dapat menjadi indikasi bahwa pengecualian keuangan terjadi terutama untuk orang-orang yang berkelas ekonomi menengah ke bawah. Di sisi permintaan, orang yang dicegah dari mengakses dan memanfaatkan layanan perbankan untuk berbagai alasan psikologis dan budaya.

Tingkat inklusi keuangan dapat meningkat sebagai respon terhadap kemakmuran dan ketidaksetaraan yang menurun. Faktor lain yang dapat berhubungan dengan pengecualian keuangan adalah sektor kerja (Goodwin et al., 2000). Sektor informal menyumbang bagian besar dari pekerjaan di beberapa negara kurang berkembang (ILO, 2002) yang tidak memfasilitasi proses inklusi

keuangan. Pekerjaan formal juga memerlukan inklusi dan, karenanya, proporsi tenaga kerja sektor formal akan menjadi indikator penting dari tingkat inklusi keuangan. Di negara-negara maju, sektor keuangan formal melayani sebagian besar penduduk, sedangkan segmen besar masyarakat, di negara-negara berkembang, terutama kelompok berpenghasilan rendah, memiliki akses yang sederhana untuk jasa keuangan, baik formal maupun informal dan pada negara-negara maju telah mengalami tingkat yang baik inklusi (Peachy dan Roe, 2004).

2.1.9 Teori *Financial Deepening* (Pendalaman Keuangan)

Sistem keuangan yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan secara mendalam *financial deepening* dianggap sebagai prasyarat penting dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Berbagai literatur menunjukkan bahwa perkembangan sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan investasi, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Kondisi tersebut diperjelas oleh Gregorio (1999) dan Alejandro (1985) yang mengemukakan bahwa pendalaman sistem keuangan suatu negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat mengalokasikan dana secara efektif ke sektor-sektor yang potensial, meminimalkan risiko dengan diversifikasi produk keuangan, meningkatnya jumlah faktor produksi atau meningkatnya efisiensi dari penggunaan faktor produksi tersebut, dan meningkatnya tingkat investasi atau marginal produktifitas akumulasi modal dengan penggunaan yang semakin efisien. Suatu perekonomian yang sehat dan dinamis membutuhkan sistem keuangan yang mampu menyalurkan dana secara efisien dari masyarakat yang memiliki dana lebih ke masyarakat yang memiliki peluang-peluang investasi produktif (Mishkin, 2008).

Penjelasan secara umum oleh Mckinnon dan Shaw (1973) mengutarakan bahwa *financial development* memiliki efek ganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertama, *financial development* dapat meningkatkan efisiensi dari akumulasi modal. Kedua, *financial development* berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat tabungan dan tingkat investasi

suatu negara. Sistem keuangan yang dapat menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediaries*, baik *direct* atau *indirect finance* dengan dapat memfasilitasi pihak yang memiliki kebutuhan likuiditas jangka pendek ataupun jangka panjang dan dapat mengalokasikan tingkat tabungan dan akumulasi modal terhadap aktivitas kegiatan ekonomi yang produktif pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bencivenga dan Smith, 1991). Lebih jauh lagi, menurut Nasution (2003), untuk menjamin bahwa sistem keuangan (lembaga keuangan dan pasar modal) dapat menjalankan perannya dengan baik, maka semua unsur yang mempengaruhi lembaga keuangan dan pasar modal dimaksud diharapkan dalam kondisi yang kondusif dan tidak bermasalah, misalnya sektor riil yang mendukung, kebijakan moneter tidak menimbulkan distorsi, kebijakan fiskal juga kondusif, integritas sistem pembayaran tetap terjaga, dan semua komponen lainnya memberikan dorongan terciptanya lembaga keuangan yang sehat dan integritas pasar keuangan.

Kondisi pasar mendeterminasi perilaku agen ekonomi yang ditangkap oleh fenomena *deepening* yang dipertegas oleh teori dasar *financial deepening* bahwa pembangunan keuangan menciptakan, meningkatkan dan memungkinkan kondisi keuangan untuk pertumbuhan, baik dengan pasokan terkemuka (pengembangan keuangan memacu pertumbuhan) atau permintaan berikut (pertumbuhan menghasilkan permintaan untuk produk-produk keuangan) channel (Levine, 1997; Liu, 2003; Lynch, 1996; Kiyotaki dan Moore, 2005; dan Mohan, 2006). Sebuah sistem berfungsi dengan baik sistem keuangan menurut definisi memungkinkan untuk alokasi yang efisien dana untuk keperluan yang paling produktif, melayani tujuan penting, dan mengurangi dampak informasi dan biaya transaksi asimetris. Hal ini juga menawarkan portofolio dan risiko diversifikasi yang lebih baik yang pada akhirnya mendorong ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan. Meningkatkan kemampuan layanan sistem keuangan juga mencerminkan tingkat yang lebih tinggi inklusi keuangan kendala yang dihadapi oleh beberapa anggota masyarakat, misalnya usaha kecil dan menengah diminimalkan. Singkatnya, manfaat *financial deepening* untuk pengembangan

pasar keuangan (1) mengatasi friksi insentif pasar dan merapikan transaksi keuangan; (2) memanfaatkan skala ekonomi dalam pengumpulan data dan Keuangan Pendalaman untuk Mendukung Stabilitas Moneter dan Pertumbuhan Berkelanjutan pemantauan (debitur); (3) memungkinkan penabung individu akses ke besar, risiko tinggi, proyek-proyek investasi jangka panjang, dan karenanya (4) meningkatkan alokasi sumber daya.

Hasil empiris tentang hubungan sebab akibat antara pembangunan keuangan, pertumbuhan, dan kemiskinan menunjukkan hasil yang positif. Hubungan positif ini disebabkan efisiensi dalam alokasi dana (King dan Levine, 1993; Levin dan Zervos, 1998), yang kemudian memberikan insentif bagi investasi langsung (Gurley dan Shaw, 1967; Goldsmith, 1969; Jung, 1986). Hal ini juga menunjukkan bahwa *financial deepening* berkorelasi dengan tingkat *financial inclusion* (Mohan, 2006). Temuan terbaru menunjukkan bahwa *financial deepening* dan pertumbuhan memiliki hubungan *bi-directional* dan memaksa kembali satu sama lain (Calderon dan Liu, 2003). Namun, Loayza dan Ranciere (2001) menemukan bahwa hubungan positif hanya ada dalam jangka panjang. Dalam teori pembangunan, telah mendukung penerapan kebijakan publik redistributif untuk meningkatkan distribusi kekayaan dan pertumbuhan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Financial Inclusion dan *Financial Deepening* telah banyak memberikan gambaran dalam penelitian ini. Suatu hal yang berbeda adalah peneliti berusaha melihat perilaku keduanya untuk menemukan suatu *Design Strategi* bagi suatu perekonomian untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Chakravarty dan PAL (2010) mengukur *Financial Inclusion* dengan pendekatan aksioma dimana variabel yang digunakan adalah penetrasi perbankan, kredit, dan deposit yang menunjukkan hasil bahwa pendekatan aksioma berhasil membangun ukuran inklusi keuangan dan dapat segera diimplementasikan menggunakan data yang sesuai serta ukuran keuangan inklusif dapat digunakan untuk tujuan pengambilan kebijakan. Senada dengan studi Sarma (2012) dalam penelitiannya menunjukkan dengan mengukur *Financial Inclusion* dalam bentuk suatu indeks

dengan metode *Multidimensional index of financial inclusion* menggunakan tiga variabel yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan layanan perbankan, dan penggunaan yang hasilnya adalah IFI dapat digunakan untuk membandingkan tingkat inklusi keuangan di negara yang berbeda dan untuk memantau kemajuan ekonomi sehubungan dengan inklusi keuangan dari waktu ke waktu yang dihadapi oleh suatu negara.

Sebangun dengan dua penelitian Chakravarty dan Sarma maka studi (Andrianaiyo dan Kpodar, 2011) dengan menggunakan *Generalized Method of Moment* (GMM) mengukur ICT, *Financial Inclusion*, dan Pertumbuhan dengan studi kasus Negara-negara di Afrika dengan empat variabel didalamnya yaitu tingkat penetrasi dari penggunaan telepon, biaya komunikasi, deposit, dan kredit menghasilkan interaksi antara penetrasi ponsel dan *Financial Inclusion* ditemukan positif dan signifikan dalam regresi pertumbuhan dan pentingnya pengembangan ICT, khususnya peluncuran ponsel untuk negara-negara Afrika sebagai sumber pertumbuhan dan dapat meningkatkan inklusi keuangan yang dengan sendirinya akan menguntungkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pendalaman keuangan menjadi salah satu ukuran intermediasi keuangan di suatu negara maka (Onwumere et.al, 2012) dengan metode *Multiple Regression Model* (MRM) meneliti dampak *Financial Deepening* pada pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus Negara Nigeria dengan variabel pertumbuhan ekonomi, perputaran uang, difersifikasi uang, volatilitas ekonomi, kapitalisasi pasar, dan likuiditas suatu pasar menghasilkan bahwa kecepatan uang beredar dan likuiditas pasar oleh pasar saham Nigeria mendorong pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Sebuah perluasan dari sektor keuangan akan berdampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Arah kenaikan pertumbuhan diawali dengan pembangunan sektor keuangan sehingga (Chakraborty, 2007) dengan menggunakan tes *Augmented Dicky Fuller* (ADF) sebagai tes *Phillips Peron* melihat pembangunan finansial yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus India. Hasil dari penelitian tersebut adanya kausalitas dari tingkat pertumbuhan riil PDB pada kapitalisasi pasar saham yang memiliki implikasi bahwa pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan pembangunan keuangan di

India namun koefisien tersebut diperkirakan kecil dan menunjukkan bahwa hubungan antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi terlihat lemah, kointegrasi menunjukkan hubungan negatif antara volatilitas harga saham dan tingkat pertumbuhan dari sektor industri. Goyal et.al (2011) mengukur *Financial Deepening* dan stabilitas moneter internasional dengan menggunakan *Index of Financial Depth*. Menghasilkan bahwa *Financial Deepening* dapat memberi banyak manfaat bagi ekonomi menunjukkan bahwa pendalaman terkait dengan adanya insiden menjadi berkurang dan biaya yang lebih rendah dari krisis.

Negara yang bersifat terbuka atas negara lain maka relatif dapat berinteraksi dengan baik untuk membangun ekonomi mencapai tahap pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan (Abimbola, 2013) dengan judul *Dinamika Financial Deepening* dan implikasi koordinasi kebijakan finansial menggunakan *Hypothetical-deductive theoretical approach* dan *Panel Data Econometrics* dengan variabel perdagangan terbuka, keuangan terbuka, inflasi, tingkat suku bunga, tingkat PDB per kapita, densitas populasi, tingkat nilai tukar, Cadangan, dan transfer bahwa suatu negara harus menerapkan kebijakan ekspansif keuangan pada tingkat pertumbuhan PDB, kepada tingkat tanbunga dan nilai tukar. Keterbukaan keuangan memengaruhi positif pendalaman keuangan.

Keadaan perekonomian yang tidak menentu menandai keberadaan sektor keuangan yang kurang baik dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah dalam akses masyarakat ke keuangan. (Barajas, *et al*, 2013) menyatakan bahwa terdapat bukti yang konsisten dengan adanya pengukuran indeks kedalaman keuangan diluar menjadi terlalu panas karena risiko ketidakstabilan keuangan yang berlebihan. Hal ini sebangun dengan studi Mohan (2006) membuktikan bahwa sektor keuangan harus dijaga dengan kebijakan ukuran yang tepat guna menjadi penyeimbang dalam perekonomian sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik. Masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah akan sulit mendapat akses keuangan di lingkungan tempat tinggalnya, kondisi tersebut bukan disebabkan atas kondisi sosial dan budaya namun kekurangan akses yang menjadi kendala.

Sesuai dengan hasil penelitian (Johnson dan Morduch, 2008) dengan *multidimensional index* memberikan pernyataan bahwa rumah tangga miskin menggunakan layanan lembaga keuangan mikro di Indonesia dan terjadi kesenjangan antara penggunaan keuangan dan penyaluran kredit sehingga pembuat kebijakan dapat melakukan ekspansi pada akses keuangan untuk masyarakat miskin. Kharchenko, 2011 menyatakan dengan *theoretical* dan *empirical findings* bahwa faktor utama yang memengaruhi literasi keuangan di Ukraina adalah *gender*, tingkat pendidikan, pekerjaan, wilayah, dan kekayaan serta faktor lain yaitu usia dan tempat tinggal tidak signifikan memengaruhi literasi keuangan. Literasi keuangan mungkin akan memiliki dampak langsung pada penghematan dan memengaruhi kekayaan masyarakat. Tingkat pembangunan manusia yang biasa diukur dengan indeks pembangunan manusia memiliki korelasi yang signifikan dengan *financial inclusion* (inklusi keuangan) di Ghana. *Financial inclusion* menjadi *main policy* (kebijakan utama) dalam menata sektor keuangan bagi penyediaan layanan jasa keuangan masyarakat dengan penguatan yang dilakukan dari segi kelembagaan perbankan.

Pembangunan manusia diperlukan dalam ekspansi pembangunan ekonomi suatu negara. Jaising (2013) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki korelasi yang signifikan dengan inklusi keuangan di Ghana dan *financial inclusion* menjadi *main policy* dalam menata kembali sektor keuangan dalam penyediaan layanan jasa keuangan bagi masyarakat dengan perhitungan *multidimensional index*. Pada negara sedang berkembang, kasus kekurangan terhadap akses layanan keuangan masyarakat terjadi secara luas, salah satunya adalah Afrika. Allen, *et al* (2013) mengeksplorasi faktor-faktor penentu perkembangan keuangan dan sebuah inklusi keuangan menemukan bahwa kepadatan penduduk tampaknya jauh lebih penting dalam perkembangan sektor keuangan di Afrika. Inovasi terbaru di bidang jasa keuangan membantu mengatasi masalah infrastruktur dan meningkatkan akses keuangan dengan *simplest cross-country regressions*. Hubungan antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dianalisis dalam literatur.

Studi empiris menyimpulkan bahwa dengan sistem perbankan yang efisien maka akses masyarakat dapat lebih baik (Levine, 1997, 2005; Wachtel, 2001). Model interaksi dinamis antara keuangan dan pertumbuhan dan menekankan dua arah kausalitas diantara keduanya. Perantara keuangan menghasilkan informasi yang lebih baik dan meningkatkan alokasi sumber daya. Sebuah sistem diperluas sebagai suatu intermediasi keuangan yang mampu mengalokasikan modal untuk investasi yang efisien dengan demikian mendorong pertumbuhan ekonomi (Greenwood dan Jovanovic, 1990). Risiko likuiditas perbankan yang dapat dihilangkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bencivenga dan Smith (1991) menyoroti fakta bahwa perantara keuangan meningkatkan produktivitas, akumulasi modal, dan pertumbuhan dengan meningkatkan tata kelola perusahaan.

Risiko yang dimiliki oleh perbankan dapat memungkinkan adanya krisis keuangan dalam perekonomian apabila pihak yang terkait belum menangani dengan baik. Dampak luas penyebaran krisis keuangan terhadap pertumbuhan dan lapangan kerja setelah krisis menunjukkan bahwa guncangan rasio *financial deepening* menyebabkan fluktuasi makroekonomi dengan *venn diagram* dibuktikan oleh Bhattarai (2013). Sektor perbankan menjadi sektor dominan dalam perekonomian dalam mendorong produktivitas masyarakat dengan menyalurkan kredit pada sektor produktif. Caporale, *et al* (2009) menunjukkan bahwa sektor perbankan lebih efisien untuk mempercepat pertumbuhan. Pasar saham dan kredit belum berkontribusi baik dalam pertumbuhan ekonomi. Era, *et al* (2014) menunjukkan bahwa dimensi *financial deepening* memiliki dampak yang berbeda pada *growth* dan *inequality*. Faktor tersebut dikarenakan karakteristik spesifik negara mengenai *finance*, *growth*, dan interaksi *inequality* memegang peranan penting dalam sektor keuangan suatu negara dengan metode *model of micro level data*.

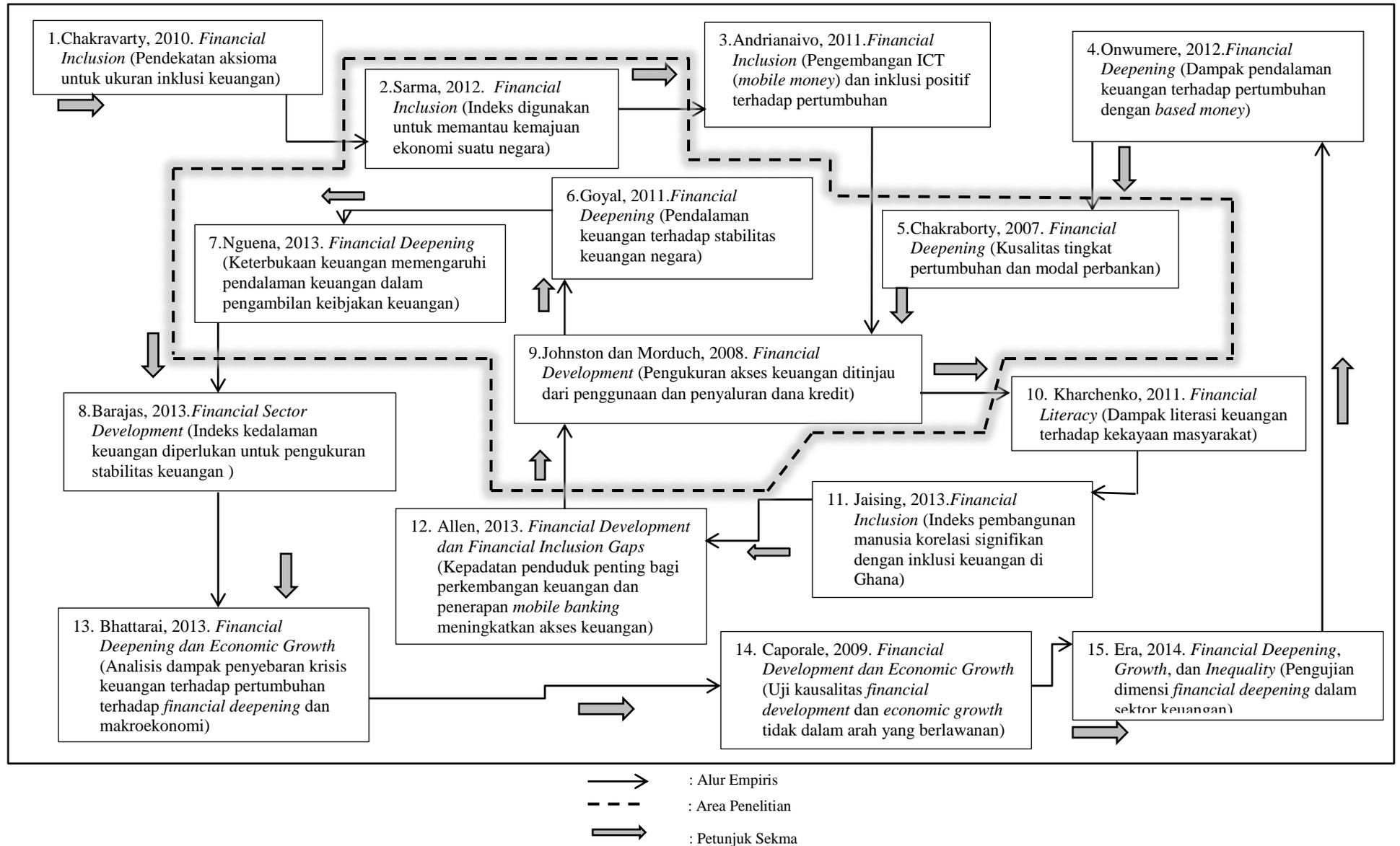
Kekuatan struktur perbankan diperlukan dalam membangun sebuah wadah intermediasi dalam perekonomian. Sistem tersebut tercakup dalam sebuah fenomena *financial deepening* didampingi dengan sebuah fenomena *financial inclusion* untuk mempermudah akses layanan keuangan kepada masyarakat. Sehingga *demand* dan *supply side* dalam suatu intermediasi keuangan dapat

mencapai dalam tujuan akhir perekonomian yaitu stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan inklusif merupakan proses yang kompleks. Berdasarkan studi empiris sebelumnya bahwa terdapat lima bentuk utama dari *financial exclusion* dimana segmen populasi tetap dikeluarkan dari sistem keuangan, pengecualian kondisi, pengecualian harga, pengecualian pemasaran, dan *self-exclusion* yang terjadi ketika suatu kelompok mengecualikan diri dari sebuah sistem keuangan formal karena hambatan psikologis (Kempson dan Whyley, 1999a, 1999b). Dengan demikian, inklusi keuangan adalah fenomena multidimensi. Sedangkan pentingnya *financial inclusion* (inklusi keuangan) secara luas diakui, literatur tentang inklusi keuangan tidak memiliki ukuran yang komprehensif yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana inklusi keuangan dalam suatu perekonomian.

Banyak penelitian telah dilakukan pada ekonomi yang berbeda pada hubungan antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa sektor keuangan dalam memicu pertumbuhan ekonomi dan lain-lain menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mengarah pada pengembangan sektor keuangan. Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa hubungan antara perkembangan finansial dan pertumbuhan adalah dua arah, yaitu, sektor keuangan dalam memicu pertumbuhan dan sebaliknya.

Hasil kombinasi yang didapatkan menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang akan dilakukan pada perhubungan pertumbuhan keuangan menggunakan teknik penelitian yang lebih inovatif. Wachtel (2003) adalah salah satu peneliti yang mempelajari hubungan antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Dia berpendapat bahwa sektor keuangan ini penting karena perantara keuangan memfasilitasi alokasi sumber daya.

Gambar 2.6 Paradigma Empiris



Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti & Tahun	Judul	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Chakravarty, S.R., Pal R. (2010)	<i>Measuring Financial Inclusion: An Axiomatic Approach</i>	<i>An.Axiomatic Approach</i>	<i>Banking penetration, Credit, Deposit</i>	Pendekatan aksioma berhasil membangun ukuran inklusi keuangan dan dapat segera diimplementasikan menggunakan data yang sesuai serta ukuran keuangan inklusif dapat digunakan untuk tujuan kebijakan.
2.	Sarma, M. (2012)	<i>Index of Financial Inclusion - A measure of financial sector inclusiveness</i>	<i>Multidimensional index of financial inclusion (IFI)</i>	<i>Banking penetration, Availability of banking services, Usage.</i>	IFI dapat digunakan untuk membandingkan tingkat inklusi keuangan di negara yang berbeda dan untuk memantau kemajuan ekonomi sehubungan dengan inklusi keuangan dari waktu ke waktu.
3.	Andrianaivo. M., Kpodar. K. (2011)	<i>ICT, Financial Inclusion, and Growth: Evidence from African Countries</i>	<i>Generalized Method of Moment (GMM)</i>	<i>Penetration rates of mobile and fixed telephone, communication costs, deposits, loans.</i>	Interaksi antara penetrasi ponsel dan <i>financial inclusion</i> ditemukan positif dan signifikan dalam regresi pertumbuhan dan pentingnya pengembangan ICT, khususnya peluncuran ponsel, untuk negara-negara Afrika sebagai sumber pertumbuhan, dan potensi TIK untuk meningkatkan inklusi keuangan, yang dengan sendirinya menguntungkan pertumbuhan.
4.	Onwumere, J.U.J., et.al. (2012)	<i>The Impact of Financial Deepening on Economic Growth: Evidence from Nigeria</i>	<i>Multiple Regression Model (MRM)</i>	<i>Economic Growth, Broad Money Velocity, Money Stock Diversification, Economic Volatility, Market Capitalization, Market Liquidity,</i>	Kecepatan uang beredar dan likuiditas pasar oleh pasar saham Nigeria mendorong pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Sebuah perluasan dari sektor keuangan akan berdampak positif terhadap perekonomian.

5.	Chakraborty, I. (2007)	<i>Does Financial Development Cause Economic Growth? The Case Of India</i>	<i>The Augmented Dicky Fuller (ADF) test as well as the Phillips Perron test</i>	<i>RGDP, Real rate of growth of the industrial sector, Real rate of growth of the services sector, Total market capitalization, The turnover at national stock exchange, Stock market, Total bank credit.</i>	Adanya kausalitas dari tingkat pertumbuhan riil PDB pada kapitalisasi pasar saham. Ini memiliki implikasi bahwa pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan pembangunan keuangan India. Namun, koefisien diperkirakan kecil yang menunjukkan bahwa hubungan antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi agak lemah, kointegrasi menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara volatilitas harga saham dan tingkat pertumbuhan dari sektor industri.
6.	Goyal, R., et.al (2011)	<i>Financial Deepening and International Monetary Stability</i>	<i>Index of Financial Depth</i>	<i>Total stock of domestic financial assets, liabilities, foreign assets, liabilities.</i>	<i>Financial deepening</i> dapat memberi banyak manfaat bagi ekonomi menunjukkan bahwa pendalaman terkait dengan adanya insiden menjadi berkurang dan biaya yang lebih rendah dari krisis dan peningkatan kapasitas untuk mengelola arus modal yang berfluktuasi.
7.	Nguena. C.L., Abimbola, T.M. (2013)	<i>Financial Deepening Dynamics and Implication for Financial Policy Coordination in a Monetary Union: the case of WAEMU</i>	<i>Hypothetical-deductive theoretical approach and Panel Data Econometrics</i>	<i>Trade openness, Financial openness, Inflation, Interest Rate, GDP per capita growth rate, Savings rate, Population density, Real exchange rate, Reserves, Transfers</i>	Otoritas sub-daerah WAEMU harus menerapkan kebijakan ekspansif keuangan pada tingkat pertumbuhan PDB, kepadatan, tingkat tabungan dan nilai tukar. Bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif terhadap <i>financial deepening</i> dan pertumbuhan ekonomi. Namun, keterbukaan keuangan mempengaruhi positif pendalaman keuangan, ada dinamika konvergen yang berarti bahwa tingkat awal yang tinggi atau lebih rendah dari <i>financial deepening</i> menguntungkan bagi peningkatan indeks financial deepening di zona WAEMU.

8.	Barajas, <i>et al.</i> (2013)	<i>Too Cold, Too Hot, or Just Right? Assessing Financial Sector Development Across The Globe</i>	<i>Empirical Analysis</i>	<i>Financial Development, Financial Sector, Financial Deepening,</i>	Terdapat bukti yang konsisten dengan adanya pengukuran indeks kedalaman keuangan diluar menjadi terlalu panas karena risiko ketidakstabilan keuangan yang berlebihan melebihi manfaat yang akan diperoleh.
9.	Johnston Jr dan Morduch (2008)	<i>The Unbanked: Evidence from Indonesia</i>	<i>Multidimensional Index</i>	<i>Financial Access, Poverty dan Creditworthiness, Loans,</i>	Rumah tangga miskin menggunakan layanan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Terjadi kesenjangan antara penggunaan keuangan dan penyaluran kredit sehingga pembuat kebijakan dapat mendorong atau melakukan ekspansi pada akses keuangan untuk masyarakat miskin.
10.	Kharchenko (2011)	<i>Financial Literacy In Ukraine: Determinants And Implications For Saving Behavior</i>	<i>Theoretical and Empirical Finding</i>	<i>Gender, Level of Education, Job, Region and Wealth, Age, Area of Residence</i>	Faktor utama yang memengaruhi literasi keuangan di Ukraina adalah <i>gender</i> , tingkat pendidikan, pekerjaan, wilayah dan kekayaan. Faktor lain yaitu usia dan tempat tinggal tidak signifikan memengaruhi literasi keuangan. Literasi keuangan mungkin akan memiliki dampak langsung pada penghematan dengan memengaruhi kekayaan masyarakat.
11.	Jaising (2013)	<i>Financial Inclusion in Ghana A Pre-Diagnostic Study</i>	<i>Multidimensional Index</i>	<i>Access, Availability, Usage, Quality dan Adapbility</i>	Hasil menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki korelasi yang signifikan dengan inklusi keuangan di Ghana, dan <i>financial inclusion</i> (inklusi keuangan) menjadi <i>main policy</i> untuk menata kembali sektor keuangan dalam penyediaan layanan jasa keuangan bagi masyarakat.
12.	Allen, <i>et al</i> (2013)	<i>The African Financial Development and Financial Inclusion Gaps</i>	<i>Simplest cross-country regressions</i>	<i>Financial Development, Financial Inclusion</i>	Mengeksplorasi faktor-faktor penentu perkembangan keuangan dan inklusi menemukan bahwa kepadatan penduduk tampaknya jauh lebih penting untuk

					perkembangan keuangan dan inklusi di Afrika. Sebuah inovasi terbaru di bidang jasa keuangan, <i>mobile banking</i> telah membantu untuk mengatasi masalah infrastruktur dan meningkatkan akses keuangan.
13.	Bhattarai (2013)	<i>Financial Deepening and Economic Growth</i>	<i>Venn Diagram</i>	<i>Economic Growth, Cash Money</i>	Dampak luas penyebaran krisis keuangan terhadap pertumbuhan dan lapangan kerja setelah krisis 2008. Guncangan rasio <i>financial deepening</i> menyebabkan fluktuasi makroekonomi.
14.	Caporale, et al (2009)	<i>Financial Development and Economic Growth: Evidence from Ten New EU Members</i>	<i>Granger Causality</i>	<i>Financial Development, Economic Growth</i>	Hasil menunjukkan bahwa pasar saham dan kredit masih terbelakang dalam ekonomi, kontribusi tersebut masih kurang dalam pertumbuhan ekonomi karena keterbatasan <i>financial depth</i> . Sebaliknya, sektor perbankan lebih efisien untuk mempercepat pertumbuhan. Selain itu, uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa kausalitas berjalan dari <i>financial development</i> ke <i>economic growth</i> tetapi tidak dalam arah yang berlawanan.
15.	Era, et al (2014)	<i>Financial Deepening, Growth, and Inequality: A Structural Framework for Developing Countries</i>	<i>Model of Micro Level Data</i>	<i>Three Dimensions Financial Deepening: Reach, Depth, Efficiency</i>	Menunjukkan bahwa dimensi <i>financial deepening</i> memiliki dampak yang berbeda pada <i>growth</i> dan <i>inequality</i> . Karakteristik spesifik negara mengenai <i>finance</i> , <i>growth</i> , dan interaksi <i>inequality</i> memegang peranan penting dalam sektor keuangan negara (Uganda, Kenya, Mozambique, Malaysia, Philippines, dan Egypt)

Sumber: Berbagai Sumber Penelitian, diolah.

2.3 Kerangka Konseptual

Sudah menjadi kesepahaman umum bahwa industri perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding industri lainnya, kembali pada karakteristik dasar produk perbankan, maka diversifikasi dan differensiasi produk serta jasa bank merupakan ciri yang umum. Artinya yakni bank cenderung memilih untuk melakukan diversifikasi dan differensiasi produk dan jasa yang begitu tinggi. Strategi tersebut cenderung mempercepat evolusi perbankan menjadi pasar besar, dimana sebuah institusi keuangan menyediakan berbagai macam produk dan jasa yang sifatnya spesifik. Praktek diversifikasi dan differensiasi tersebut cenderung mengarah kepada peningkatan biaya yang akan dibebankan kepada konsumen.

Respon alamiah yang seharusnya dilakukan bank pada saat ini adalah dengan menyesuaikan aktivitas intermediasi, yaitu: (1) mengurangi pertumbuhan kredit dan/atau (2) menambah pertumbuhan DPK. Dua strategi itu memiliki trade off. Melihat kondisi ini, tampaknya stimulasi pertumbuhan DPK dapat di capai dengan memperbaiki momentum pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga lingkungan suku bunga yang tinggi. Nasabah perbankan saat ini (khususnya segmen ritel) masih memiliki paradigma tradisional, simpanan di bank adalah suatu investasi dan diharapkan mampu memberikan return yang layak (setidaknya di atas inflasi). Jika hal ini tidak tercapai, maka nasabah akan mengurangi porsi simpanannya dan bergeser kepada instrumen lain. Dengan kata lain, jika paradigma tradisional ini dapat digeser, potensi pendanaan bank sebenarnya dapat diatasi. Upaya perubahan paradigma ini tidak cukup dicapai melalui perluasan akses layanan finansial (*financial inclusion*). Di luar itu, diperlukan perubahan cara pandang masyarakat.

Masyarakat Indonesia masih cenderung tradisional dalam memahami arti investasi: menanamkan dana idle ke dalam aset tidak bergerak seperti tanah dan rumah. Sebaliknya, di luar negeri, khususnya negara maju, investasi telah umum dilakukan kepada instrumen finansial. Perubahan cara pandang ini memerlukan edukasi finansial yang ekstensif. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara berkaitan erat dengan sistem keuangan di dalamnya. Studi yang dilakukan oleh Levine (2005) menunjukkan beberapa bukti bahwa stabilitas lembaga

keuangan seperti bank, perusahaan asuransi hingga pasar modal (termasuk pasar saham, pasar obligasi dan produk derivatif) mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar transaksi pada sektor ekonomi riil dilakukan melalui institusi di dalam sistem keuangan. Di sisi lain, suatu sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber daya dengan efisien melalui fungsi intermediasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan. Melalui alokasi sumber daya yang tepat, lembaga keuangan dapat mendorong terciptanya peluang-peluang ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perekonomian dengan sistem keuangan yang berfungsi secara optimal akan mengalami percepatan pengentasan kemiskinan melalui distribusi modal secara efisien. Oleh karena itu, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi salah satu kunci berfungsinya sistem keuangan secara optimal. Jika masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan dengan mudah, maka akan mendorong peningkatan perputaran modal. Dengan begitu, lembaga keuangan dapat melaksanakan pemerataan modal di dalam masyarakat, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya, saat ini Indonesia masih berada pada tahap inklusi keuangan yang belum mapan.

Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi, antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana (Mishkin, 2008). Dana yang diterima bank dapat disalurkan pada kegiatan-kegiatan produktif, menyerap tenaga kerja, meningkatkan output dan pada akhirnya menggerakkan siklus perekonomian (Kar dan Peker 2010). Sehingga pertumbuhan ekonomi suatu negara memerlukan dukungan industri perbankan yang efisien dan sehat. Suatu sistem keuangan yang inklusi dibutuhkan sebagai solusi adanya kesenjangan dalam perekonomian (Sarma, 2010). Pembangunan keuangan terdiri atas aspek permintaan dan penawaran yang menjadi pondasi dasar atas sebuah problematika keuangan yang memiliki dua aktor yaitu pelaku ekonomi (masyarakat) dan institusi keuangan sebagai pemasok dan penyedia dana.

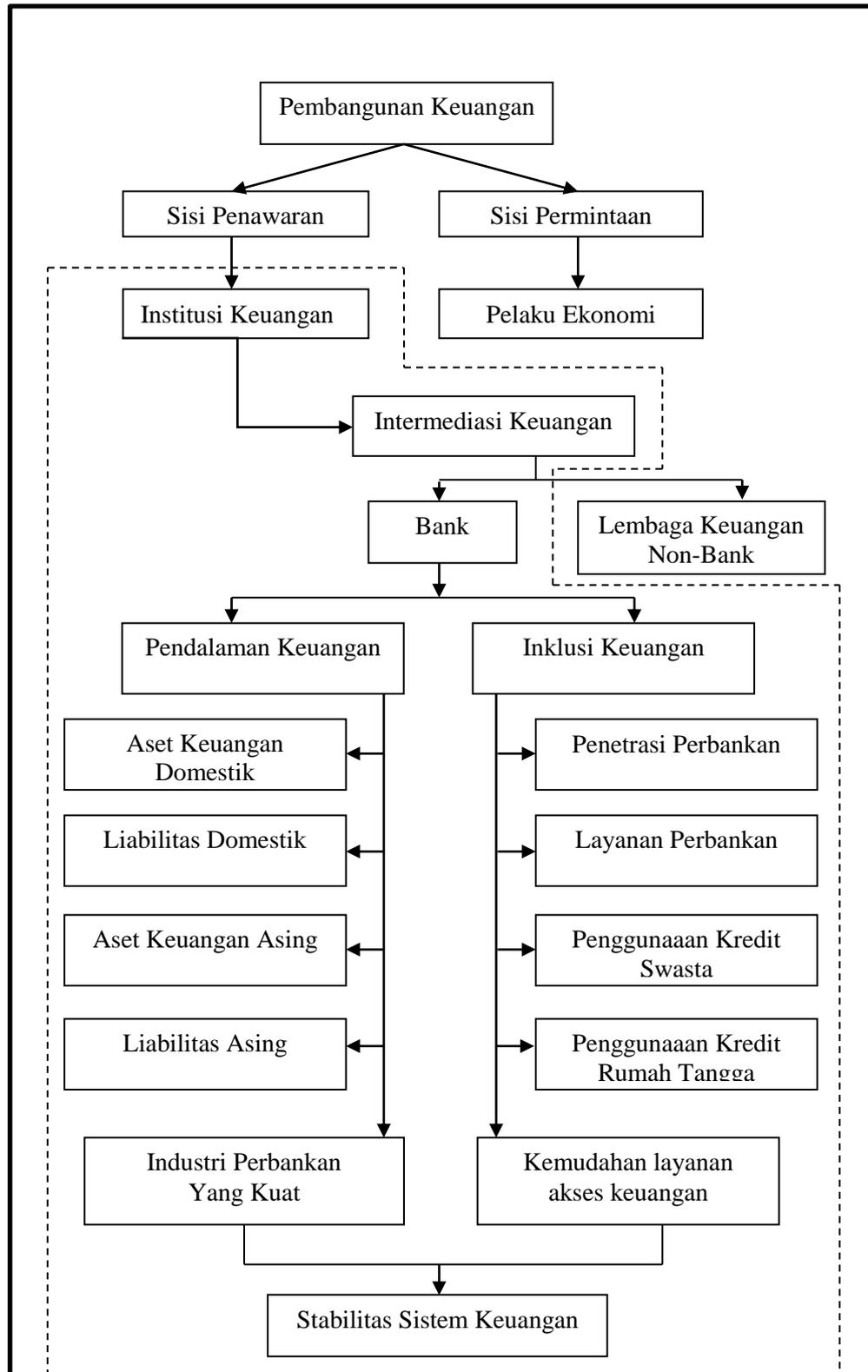
Dalam menjalankan suatu sistem keuangan dibutuhkan langkah-langkah intermediasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank maupun bukan bank.

Indikator dalam pembentuk sebuah ukuran inklusi keuangan menurut Sarma (2010, 2012) adalah ditinjau dari penetrasi perbankan yang merupakan jumlah perbankan beserta akun deposit bank bertujuan dalam pemeratakan layanan keuangan dengan keberadaan lembaga keuangan dalam proses transaksi ekonomi masyarakat pada suatu wilayah diduung juga dengan ketersediaan layanan perbankan berdasarkan jumlah cabang bank dan ketersediaan ATM sebagai bentuk pelaksanaan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam transaksi keuangan.

Keberadaan perbankan dalam segi kuantitas dibutuhkan bagi langkah pembangunan dan ditinjau dair segi kualitas dengan penggunaan layanan perbankan oleh masyarakat yang dibagi menjadi dua yaitu kredit terhadap sektor swasta dan rumah tangga. Sektor swasta bergerak terhadap pembangunan yang bersifat produksi dan investasi dalam jangka pendek maupun panjang dan sektor rumah tangga tergolong pada penggunaan kredit konsumsi. Dalam konsepsi *financial deepening* (pendalaman keuangan) dibutuhkan untuk mengukur suatu sistem keuangan ideal bagi pembangunan ekonomi untuk mencapai keadaan ekonomi yang mantap dan terciptanya suatu sistem stabilitas keuangan berdasarkan studi Beck, *et al*, (2007); Mohan (2006). Sebuah intermediasi dilakukan untuk perantara industri perbankan baik bank maupun bukan bank yang beroperasi dalam wilayah kerja di Indonesia. Indikator dalam pengukuran *financial inclusion* (inklusi keuangan) dan *financial deepening* (pendalaman keuangan) berdasarkan analisa dan penelitian sebelumnya. Indikator penentu ukuran *financial deepening* yang digunakan oleh peneliti adalah aset keuangan domestik yaitu merupakan rasio modal bank yang mencakup seluruh aset keuangan dan bukan keuangan sehingga struktur perbankan dalam hal permodalan dapat menjadi salah satu indikator memperkuat suatu sistem keuangan, berikutnya berkaitan atas liabilitas domestik yang merupakan kewajiban bersih pemerintah meliputi pembiayaan luar dan dalam negeri. Determinasi atas suatu kondisi perekonomian tidak hanya berasal dari dalam negeri melainkan atas kondisi ekonomi luar negeri meliputi aset keuangan asing yang merupakan jumlah aset asing yang dimiliki oleh otoritas moneter dan bank umum dikurangi kewajiban

asing serta liabilitas asing yang merupakan kewajiban bersih pemerintah meliputi pembiayaan luar dan dalam negeri yang timbul dari surplus anggaran bagi penguatan suatu pendalaman keuangan di Indonesia.

Pendalaman keuangan akan mencapai keadaan dimana suatu industri perbankan akan mengalami penguatan dengan beberapa indikator yang termasuk didalamnya sebagai langkah antisipasi krisis keuangan yang ditimbulkan atas aspek penawaran yaitu institusi. Oleh karenanya dalam merespon suatu upaya penguatan industri perbankan maka fenomena inklusi keuangan memiliki tujuan dengan menciptakan kondisi dimana masyarakat dengan mudah mengakses layanan keuangan. Sehingga interaksi kedua fenomena tersebut menjadi langkah dalam stabilitas sistem keuangan. Hal lainnya ditinjau dari peran dan fungsi bank dalam perekonomian yang sangat strategis, membuat posisi perbankan penting untuk mendorong kegiatan ekonomi. Bank dapat memengaruhi dan menentukan semua aspek kegiatan ekonomi di suatu negara. Ketidakmampuan bank dalam memberikan layanan yang optimal akan menyebabkan kegiatan ekonomi terganggu dan mengakibatkan semua sektor ekonomi tidak dapat bekerja secara optimal. Berdasarkan perspektif *demand* dan *supply*, terlihat fungsi Bank sebagai *agent of development* dinyatakan belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan insentif yang dapat mengoptimalkan fungsi bank sebagai agen pembangunan.



Gambar 2.7 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian, dimana menunjukkan hasil sementara berdasarkan literatur sebelumnya. Berdasarkan teori, bukti empiris, dan penelitian sebelumnya yang telah dijadikan literatur dalam penelitian ini mengenai perhitungan indeks dan pendalaman suatu keuangan, maka dapat dibangun sebuah hipotesis yaitu kondisi inklusi dan pendalaman tergolong rendah pada sistem keuangan.

2.5 Asumsi Penelitian

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kondisi *financial inclusion* (inklusi keuangan) dan *financial deepening* (pendalaman keuangan) sistem keuangan di Indonesia dilihat dari sektor perbankan, dalam hal ini ialah tidak ada kategori khusus jenis bank dikarenakan ukuran kedua indeks akan mencakup keadaan makroekonomi suatu negara dengan mengidentifikasi sistem keuangan suatu negara.
2. Kondisi akses keuangan masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan adanya suatu sistem inklusi untuk mendorong aktivitas perekonomian dengan menggunakan ukuran indeks keuangan inklusi dan pendalaman keuangan untuk mengkombinasi dan mengkonstruksi strategi yang tepat dalam temuan peneliti.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab 3 ini memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan konstruksi penelitian mulai dari data, objek, hingga metode analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya. Pertama, metode analisis perhitungan eklektik dengan menggunakan data runtut waktu (*time series*) untuk perhitungan indeksisasi terhadap *financial inclusion* (inklusi keuangan) dan *financial deepening* (pendalaman keuangan) dengan sebuah formula indeks Sarma dan Goyal dengan bantuan *Excel*. Tujuan kedua akan dipecahkan dengan menggunakan metode sintesa *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory*. Sebagai pelengkap atas penjabaran kedua fenomena inklusi dan pendalaman keuangan menggunakan metode analisis preskripsi untuk lebih memaparkan hubungan yang ditimbulkan atas hasil perhitungan dan metode analisis data diatas.

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data runtut waktu (*time series*) dengan periode tahunan dimulai pada tahun 2004 hingga 2013 dengan objek penelitian negara Indonesia. Pemilihan periode tersebut dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi dan metodologi. Pertama, merupakan masa pemulihan adanya krisis yang terjadi di tahun 1998-1999 dan dimulai tahun 2004 merupakan awal masa konsolidasi perbankan dimana berbagai langkah kebijakan yang diambil akan memengaruhi ritme industri tersebut oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia dalam penataan sistem perekonomian. Kedua, dengan rentan waktu sepuluh tahun diperkirakan mampu untuk menguraikan jawaban dari masalah penelitian. Data primer diperlukan sebagai input atas sintesa AHP dan *Game Theory* yang diperoleh dari responden *expert* (ahli) dalam bidang pendalaman dan inklusi keuangan di Indonesia. Pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan kuisisioner yang disebarakan pada 15 responden. Adapun penyebaran kuisisioner dilakukan terhadap beberapa pihak antara lain.

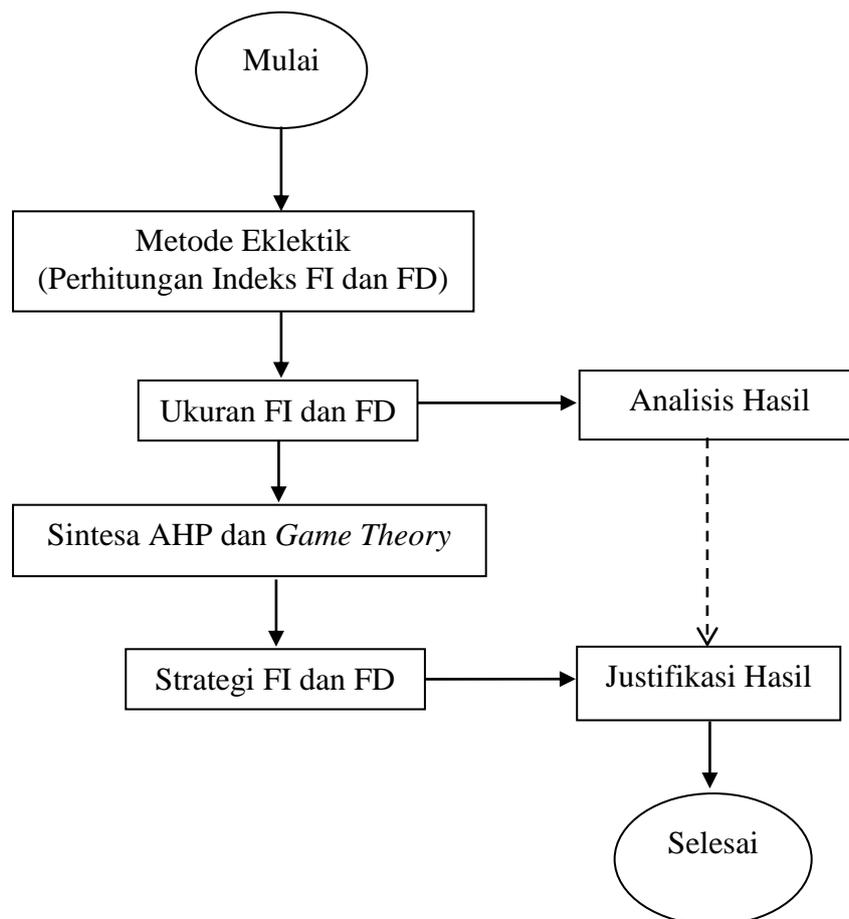
- a. Bank Indonesia Jakarta selaku otoritas kebijakan keuangan, meliputi bagian Ekonomi dan Moneter dan pejabat lain yang dianggap *expert* (ahli).
- b. Otoritas Jasa Keuangan Jakarta selaku pelaksana kebijakan keuangan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- c. Komisi XI DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia di Jakarta.
- d. Praktisi perbankan di Bank Umum di Indonesia.
- e. Pakar atau akademisi di Universitas yaitu dosen.
- f. Serta pakar atau akademisi yang dianggap *expert* (ahli) dibidangnya.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai referensi berkala seperti International Finance Corporation, World Bank, Asian Development Bank, Credit Suisse Global Wealth, Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, Global Data Index, Bank Indonesia.

3.2 Desain Metode Penelitian

Ukuran *financial inclusion* dan *financial deepening* diketahui dengan perhitungan cara indeksisasi. *Financial inclusion* (inklusi keuangan) dan *financial deepening* (pendalaman keuangan) yang terdiri dari empat masing-masing indikator didalamnya didasarkan atas studi empiris sebelumnya. Inklusi keuangan yang terfokus pada pemecahan masalah rendahnya akses keuangan masyarakat terhadap layanan keuangan yaitu perbankan. Di sisi lain *financial deepening* perihal penguatan industri perbankan selaku wadah intermediasi dalam pelaksanaan transaksi ekonomi yang berhubungan secara langsung kepada masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Kedua fenomena tersebut terangkum dalam sebuah permasalahan dalam sektor keuangan dimana ada sisi permintaan dan penawaran yang keduanya terdapat problematika yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karenanya dibuat sebuah sintesa AHP dan *Game Theory* untuk memaparkan sebuah harmonisasi kedua fenomena tersebut dalam masalah sektor keuangan yang terjadi *trade-off*. Hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan sebuah *alternative policy* bagi pengambil keputusan dalam menggerakkan roda perekonomian negara.

Pada metode penelitian digunakan diagram alir (*flow chart*). Diagram 3.1 ini digunakan untuk memaparkan rangkaian metode dalam penelitian. Dimulai dari perhitungan indeks, analisis terhadap perhitungan eklektik tersebut, penyusunan hirarki yang ditindaklanjuti penyebaran kuesioner, input data serta hingga pada penyelesaian akhir pengambilan suatu kesimpulan penelitian. Diagram ini merupakan proses bagian dalam penelitian, membantu menguraikan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Metode penelitian merupakan suatu langkah sistematis yang akan menjadi acuan dalam penyelesaian masalah (Sugiyono, 2004). Terdiri dari beberapa langkah pengerjaan hingga penyelesaian penelitian, maka proses penelitian secara umum dapat digambarkan dalam *flow chart* gambar 3.1.



Gambar 3.1 Desain Metode Penelitian

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Metode Eklektik Untuk Perhitungan Indeks Inklusi Dan Pendalaman Keuangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari model pengukuran indeks keuangan inklusi penelitian Sharma (2012) dan indeks pendalaman keuangan dalam penelitian Goyal (2011) sebagaimana berikut:

a. Indeks *Financial Inclusion* (Inklusi Keuangan)

$$IFI_i = 1 - \frac{\sqrt{(1 - p_1)^2 + (0.5 - a_2)^2 + (0.5 - u_n)^2}}{1.5}$$

Ukuran indeks keuangan inklusi ini terdiri dari tiga dimensi sebagai indikator penentu hasil indeks inklusi. Pemilihan ketiga variabel ini oleh peneliti diadopsi secara langsung berdasarkan model Sarma (2012) untuk mempermudah perhitungan dan kesesuaian hasil di Indonesia.

dimana:

Dimensi 1 = Penetrasi perbankan (*Deposit bank accounts per 1000 adult*)

Dimensi 2 = Ketersediaan layanan perbankan (*Number of bank branches and Number of ATMs per 100.000 adults*)

Dimensi 3 = Penggunaan (*Credit to private sector and deposit mobilized from private sector and Credit and deposit to households*)

Dari formulasi diatas maka akan didapatkan hasil beberapa kategori dari perhitungan indeks keuangan inklusi dengan keterangan sebagai berikut:

1. $0.5 \leq IFI \leq 1$ - *high financial inclusion*
2. $0.3 \leq IFI < 0.5$ - *medium financial inclusion*
3. $0.0 \leq IFI < 0.3$ - *low financial inclusion*

b. Indeks *Financial Deepening* (Pendalaman Keuangan)

$$IFD = \frac{1}{2} + \frac{(D_A + D_L)}{Y} + \frac{1}{2} \frac{(F_A + F_L)}{Y} = \frac{D_L}{Y} + \frac{1}{2} \frac{(F_A + F_L)}{Y}$$

dimana:

D_A = Total aset keuangan domestik

D_L = Liabilitas domestik

F_A = Aset asing

F_L = Liabilitas asing

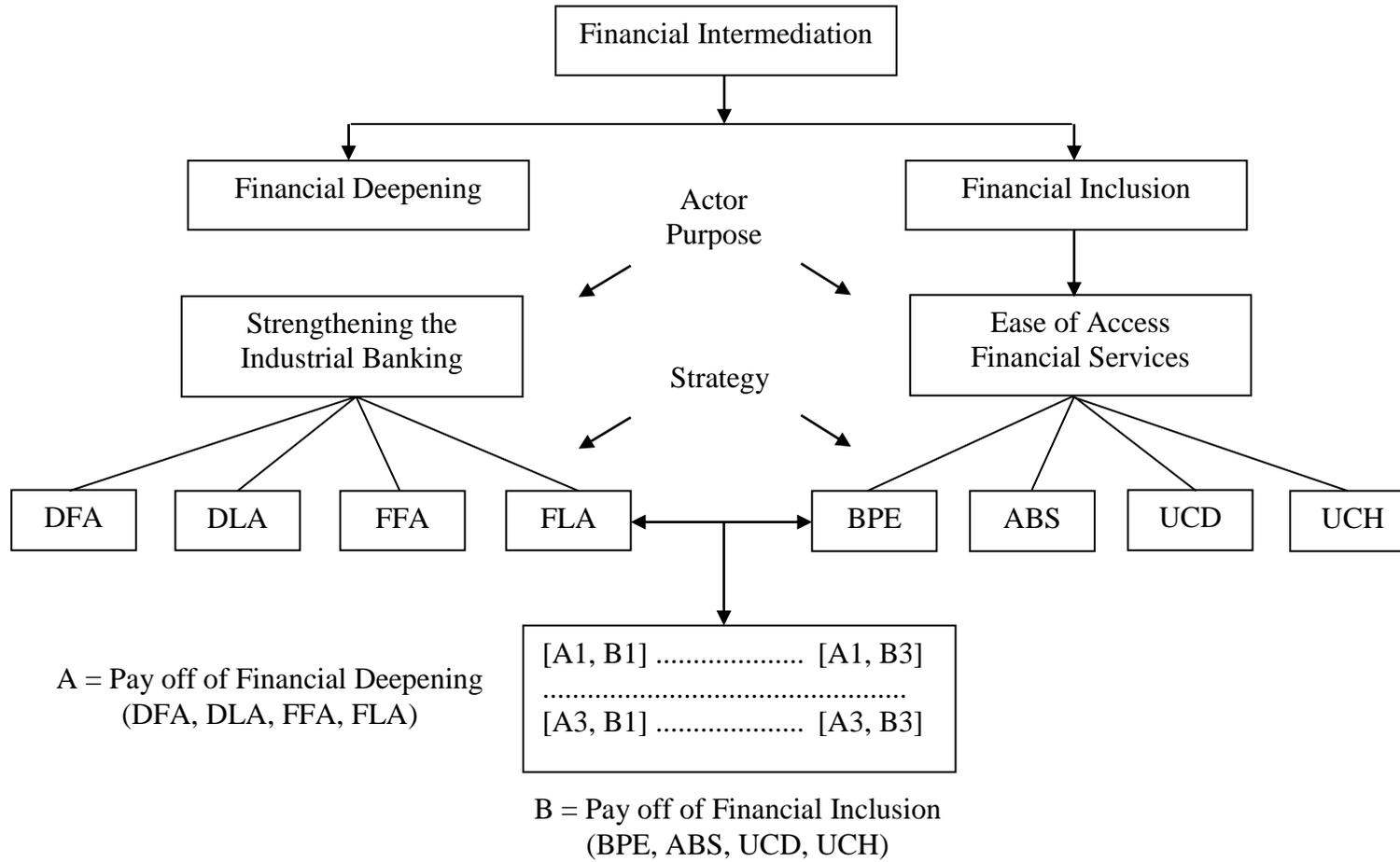
Pengukuran indeks pendalaman keuangan oleh Goyal (2011) diatas diadopsi secara langsung model tersebut untuk kesesuaian rumusan masalah penelitian ini. Oleh karenanya akan didapatkan hasil beberapa kategori dari perhitungan indeks pendalaman keuangan dengan keterangan sebagai berikut:

1. $0.5 \leq IFD \leq 1$ - *high financial deepening*
2. $0.3 \leq IFD < 0.5$ - *medium financial deepening*
3. $0.0 \leq IFD < 0.3$ - *low financial deepening*

Metode yang digunakan dalam penelitian tidak memiliki perbedaan model perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini, hal tersebut dikarenakan perhitungan kedua indeks dibutuhkan perhitungan yang detail bagi kesesuaian bobot indeks. Sehingga modifikasi dalam penelitian ini terdapat pada kombinasi kedua indeks yang akan dilakukan oleh peneliti dengan tambahan pendapat pakar ekonomi untuk menambah validnya keputusan dalam mendesain sebuah strategi bagi stabilitas sistem keuangan.

3.3.2 Sintesa *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory*

Studi dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan model AHP dan *Game theory* yang merupakan analisi tentang interaksi pendalaman dan inklusi keuangan di Indonesia Adanya persaingan atau prioritas pencapaian tujuan kebijakan yang berbeda, yakni antara pencapaian industri perbankan yang kuat dan kemudahan layanan akses keuangan menyebabkan para pemain menggunakan masing-masing strategi yang saling berinteraksi satu sama lain. Metode AHP digunakan untuk pengambilan keputusan dalam interaksi kedua kebijakan, dimana data utamanya adalah persepsi manusia yang dianggap *expert* (ahli). Adapun peralatan utama AHP adalah sebuah hirarki. Berikut adalah struktur hirarki dari interaksi pendalaman dan inklusi keuangan di Indonesia pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Hirarki Interaksi Pendalaman dan Inklusi Keuangan

Keterangan diagram:Hirarki Level 1

Interaksi intermediasi keuangan

1. Pendalaman Keuangan
2. Inklusi Keuangan

Hirarki Level 2

Instrumen-instrumen pada interaksi pendalaman dan inklusi keuangan

- | | |
|---|--|
| 1. DFA (<i>Domestic Financial Asset</i>) | : Aset keuangan domestik |
| 2. DLA (<i>Domestic Liabilities</i>) | : Liabilitas domestik |
| 3. FFA (<i>Foreign Financial Asset</i>) | : Aset keuangan asing |
| 4. FLA (<i>Foreign Liabilities</i>) | : Liabilitas asing |
| 5. BPE (<i>Banking Penetration</i>) | : Penetrasi perbankan |
| 6. ABS (<i>Avaibility of Banking Service</i>) | : Ketersediaan layanan keuangan |
| 7. UCD (<i>Usage</i>) | : Penyaluran kredit dan deposito sektor swasta |
| 8. UCH (<i>Usage to Households</i>) | : Penyaluran kredit dan deposito rumah tangga. |

Hirarki Level 3

Sasaran dari kedua interaksi intermediasi keuangan.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Industri Perbankan yang Kuat | : Industri perbankan yang memiliki tingkat pendalaman keuangan |
| 2. Kemudahan layanan akses keuangan | : Pemerataan akses keuangan masyarakat terhadap lembaga keuangan. |

3.3.2.a *Analytic Hierarchy Process* (AHP)

Metode *Analytic Hierarchy Process* digunakan untuk menyelesaikan masalah multikriteria yang kompleks berdasarkan susunan hirarki. Masalah yang kompleks dapat di artikan bahwa kriteria dari suatu masalah yang begitu banyak (multikriteria), struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian pendapat dari pengambil keputusan, pengambil keputusan lebih dari satu orang, serta

ketidakakuratan data yang tersedia. Dalam hal ini konsepsi Saaty (1982) dikonstruksikan dalam rupa hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.

Golubnya metode ini digunakan kerangka untuk mengambil keputusan yang efektif dari persoalan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. AHP telah diterapkan dalam penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah *Multi-attribute Decision Making* (MADM). Misalnya Chang et al. (2007), Hsu dan Pan (2009), Huang (2009), Huang et al. (2009), Kuo et al. (2008), Sevkli et al. (2007b), Sun et al. (2008), Levary (2008), Li et al. (2008), Hu et al. (2008), Naesens et al. (2009) dan Tsai dan Hung (2009) beberapa penelitian yang digunakan AHP untuk memecahkan masalah MADM.

Suatu hirarki keputusan disebut *complete* jika semua elemen pada suatu tingkat memiliki hubungan terhadap semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya, sementara hirarki keputusan *incomplete* kebalikan dari hirarki *complete*. Tahapan terpenting dalam analisis AHP adalah penilaian dengan teknik komparasi berpasangan (*pairwise comparison*) terhadap faktor-faktor pada suatu tingkatan hirarki. Berikut adalah penilaian pemberian bobot numerik dan membandingkan antara satu elemen dengan elemen lain:

a. Aksioma Metode AHP

Terdapat empat aksioma metode AHP hingga pada pemahaman logis, yaitu sebagai berikut:

1. *Reciprocity*

Pengambilan keputusan harus mampu menyatakan preferensinya. Preferensi harus memenuhi syarat resiprokal yaitu bila A_1 lebih disukai dari A_2 dengan skala w , maka A_2 lebih disukai dari A_1 dengan skala $1/w$.

2. *Homogeneity*

Elemen-elemen dalam hirarki harus dapat dibandingkan satu sama lain dengan skala terbatas.

3. *Dependence*

Preferensi dinyatakan dengan asumsi bahwa kriteria tidak dipengaruhi alternatif kriteria yang lain, selain alternatif elemen di bawah suatu kriteria. Maupun perbandingan elemen-elemen dalam suatu level dipengaruhi level di atasnya. Ini berarti ketergantungan dalam AHP adalah selaras keatas bukan ke samping.

4. *Expectation*

Struktur hirarki AHP disusun lengkap untuk tujuan pengambilan keputusan. Jika tidak terpenuhi, maka pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria atau pilihan yang tersedia. Sehingga mengakibatkan keputusan yang dibuat kurang memuaskan.

b. Prinsip Kerja Metode AHP

Terdapat empat prinsip kerja yang digunakan dalam metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yaitu:

1. *Decomposition*

Proses penguraian permasalahan atau variabel menjadi beberapa elemen sampai tidak dapat diuraikan lagi. Dari proses penguraian ini akan diperoleh satu atau beberapa tingkatan hirarki.

2. *Comparative Judgment*

Proses penilaian kepentingan relatif terhadap elemen berpasangan dalam suatu level sehubungan dengan level di atasnya. Penilaian ini adalah inti dari AHP, sehingga diperoleh prioritas elemen dalam suatu level. Berikut adalah *pairwise comparison*:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Matriks ini bersifat resiprokal yaitu:

$$e_{ij} = \frac{1}{a_{ij}}$$

Dimana i dan j berturut-turut merujuk pada baris dan kolom matriks. Misalkan A_1, A_2, \dots, A_n adalah kumpulan elemen sebanyak n , sementara w_1, w_2, \dots, w_n adalah intensitas masing-masing elemen. Perbandingan antar dua elemen dapat ditunjukkan dalam matriks dibawah ini:

$$A = \begin{matrix} & A_1 & A_2 & \dots & A_n \\ A_1 & w_1/w_1 & w_1/w_1 & \dots & w_1/w_n \\ A_2 & w_2/w_1 & w_2/w_2 & \dots & w_2/w_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_n & w_n/w_1 & w_n/w_2 & \dots & w_n/w_n \end{matrix}$$

Matriks ini merefleksikan tingkat kepentingan relatif antar dua elemen, yang diukur dengan skala ordinal. Pengguna AHP menggunakan skala terbatas dimulai dari sama pentingnya atau indeferen hingga kepentingan yang bersifat mutlak.

Tabel 3.1 Skala Komparasi Berpasangan
(Saaty, 1996; Yüksel and Dağdeviren, 2007)

Skala	Definisi	Keterangan
1	Sama (equal) tingkat kepentingannya	A_i dan A_j memberikan kontribusi sama
3	Agak (weak) sedikit penting	A_i agak sedikit penting dibanding A_j
5	Lebih (strong) disukai	A_i lebih disukai dibanding A_j
7	Sangat (very strong) disukai	A_i sangat disukai dibanding A_j
9	Mutlak (absolute) disukai	A_i mutlak disukai dibanding A_j
2, 4, 6, 8	Nilai-nilai antara	Jika ragu-ragu menentukan skala, misalkan antara skala 7 dan 9
Resiprokal	Jika A_i dibanding A_j misalkan, skala 7; maka A_j dibanding A_i adalah skala 1/7	Asumsi yang masuk akal

Pemilihan skala 1 hingga 9 didasarkan pada penelitian psikologi, pendapat pemakai AHP, perbandingan skala lain, dan kemampuan otak manusia dalam menyuarakan urutan preferensi.

3. *Synthesis of Priority*

Proses penentuan prioritas elemen-elemen dalam suatu level. Setelah diperoleh skala perbandingan antara dua elemen melalui wawancara, kemudian dicari vektor prioritas (*eigenvector*) dari suatu level hirarki. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh vektor prioritas. Adapun cara yang paling baik dari segi keakuratan adalah:

$$4 \sqrt{\frac{w_1}{w_1} \times \frac{w_1}{w_2} \times \frac{w_1}{w_3} \times \frac{w_1}{w_4}} = a$$

$$4 \sqrt{\frac{w_2}{w_1} \times \frac{w_2}{w_2} \times \frac{w_2}{w_3} \times \frac{w_2}{w_4}} = b$$

$$4 \sqrt{\frac{w_3}{w_1} \times \frac{w_3}{w_2} \times \frac{w_3}{w_3} \times \frac{w_3}{w_4}} = c$$

$$4 \sqrt{\frac{w_4}{w_1} \times \frac{w_4}{w_2} \times \frac{w_4}{w_3} \times \frac{w_4}{w_4}} = d$$

$$\frac{\quad}{a + b + c + d}$$

Kemudian dinormalkan vektor (a,b,c,d) dengan menisbahkan tiap elemen terhadap jumlah keseluruhan elemen (a + b + c + d).

4. *Logical Consistency*

Prinsip rasionalitas AHP. Terdapat tiga makna yang terkandung dalam konsep konsistensi yaitu (1) obyek-obyek yang serupa atau sejenis dikelompokkan sesuai dengan relevansinya, (2) matriks perbandingan bersifat resiprokal, artinya jika A1 adalah dua kali lebih penting dari A2 maka A2 adalah setengah kali lebih penting dari A3, (3) Hubungan antar elemen diupayakan bersifat transitif. AHP tidak menuntut konsistensi sempurna tetapi justru memaklumi inkonsistensi manusia sebagai gejala natural. AHP mensyaratkan inkonsistensi tidak lebih 10 persen.

Pengukuran inkonsistensi dalam AHP dengan menggunakan *consistency ratio* (CR) dengan menghitung terlebih dahulu *consistency index* (CI) yang menggambarkan deviasi preferensi dari konsistensinya, yaitu:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

Dimana n adalah jumlah elemen yang hendak dibandingkan, dan λ_{\max} adalah *eigenvalue* terbesar. Kemudian menghitung CR yaitu CI dibagi dengan *random index* (RI).

Tabel 3.2 Indeks Random (RI)
(Saaty dan Vargas, 1991)

Matriks Order	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Random Index	0	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Indeks random (RI) adalah indeks konsistensi (CI) matriks resiprokal yang dibentuk secara random. Indeks tersebut diperoleh dari eksperimen terhadap 100 sampel dengan matriks orde 1 hingga 15 dengan hipotesis bahwa RI meningkat searah dengan besarnya orde matriks.

c. *Eigenvector* dan Konsistensi

Penggunaan rumus *eigenvalue* disebabkan oleh adanya penekanan pada konsistensi, meskipun terdapat beberapa cara untuk mencari vektor prioritas dari matriks *pairwise comparison*. Diketahui elemen-elemen dari suatu hirarki adalah C_1, C_2, \dots, C_n dan bobot pengaruh mereka adalah w_1, w_2, \dots, w_n . Misalkan $a_{ij} = w_i/w_j$ menunjukkan kekuatan C_i jika dibandingkan dengan C_j . Matriks dari angka-angka a_{ij} ini dinamakan matriks *pairwise comparison*, yang diberi simbol A . Telah disebutkan bahwa A adalah matriks *reciprocal*, sehingga $a_{ij} = 1/a_{ji}$. Jika penilaian sempurna pada setiap perbandingan maka $a_{ij} = a_{ji}$, a_{ij} untuk semua i, j, k dan matriks A dinamakan konsisten. Misalnya, matriks *pairwise comparison* antara pendalaman dan inklusi keuangan, masing-masing menggunakan tiga strategi kebijakan. Dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Matriks Pairwise comparison (Z)

Kebijakan	Strategi A	Strategi B	Strategi C
Strategi A	1	4	9
Strategi B	1/4	1	7
Strategi C	1/9	1/7	1

Dalam membandingkan pentingnya ketiga strategi, misalnya dari A ke C dan guna mencapai tujuan tertentu, dapat sampai pada urutan sebagaimana ditunjukkan dalam matriks Z. Nilai 9 pada baris ke 1 menunjukkan bahwa strategi kebijakan C bersifat penting absolut dibandingkan dengan strategi kebijakan A. Kebalikan angka 9 muncul dalam posisi simetris yang menunjukkan hubungan berkebalikan relatif pentingnya tujuan strategi kebijakan A. Matriks perbandingan berpasangan antar dua elemen misalkan A_{ij} adalah elemen baris ke i dan kolom ke j kebalikan matriks (*reciprocal matrix*) A dan W adalah bobotnya dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{array}{cccc}
 & W_1 & W_2 & W_3 \\
 W_1 & A_{11} & A_{12} & A_{13} \\
 W_2 & A_{21} & A_{22} & A_{23} \\
 W_3 & A_{31} & A_{32} & A_{33}
 \end{array}$$

Karena $A_{12} = W_1/W_2$, $A_{21} = W_2/W_1$ maka,

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \end{pmatrix} = n \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \end{pmatrix}$$

Perkalian A dengan W menghasilkan N_w . Vektor $W = (W_1, W_2, W_3)$ yang memenuhi persamaan $AW = nW$ disebut vektor prioritas (*eigenvector*). Mudah dibuktikan bahwa dalam matriks $A = (W_i/W_j)$ semua *eigenvector* adalah nol kecuali satu, yaitu n . Jadi n adalah *eigenvector* terbesar yang sama dengan jumlah elemen diagonal matriks. Untuk menentukan ranking atau solusi yang *unique*, *eigenvector* ini dinormalisasi sehingga $W_1+W_2+W_3 = 1$. Dengan kata lain jika $AW = nW$ terpenuhi, semua *eigenvalue* sama dengan nol, kecuali *eigenvalue* yang satu, yaitu sebesar n . Ini berarti dalam kasus matriks konsisten ($A_{ij} = 1$), n adalah

eigenvalue terbesar. Kedua, jika ada sedikit perubahan pada salah satu A_{ij} dalam matriks $A(A_{ij})$ sehingga tidak konsisten, maka *eigenvalue* akan sedikit berubah. Selanjutnya AHP mengukur seluruh konsistensi penilaian dengan menggunakan *Consistency Ratio* (CR), yang dirumuskan

$$CR = \frac{CI}{\text{Random Consistency Indeks}}$$

Suatu tingkat konsistensi yang tertentu memang diperlukan dalam penentuan prioritas untuk mendapatkan hasil yang sah. Nilai CR seharusnya tidak lebih dari 10 persen. Jika tidak, penilaian yang dibuat mungkin dilakukan secara random dan direvisi. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang digunakan untuk membentuk hirarki pendalaman dan inklusi keuangan di Indonesia dengan menggunakan penilaian komparasi berpasangan (*pairwise comparison*) atau analisis pendapat (*judgment*) terhadap kedua pihak yang terlibat. Tolak ukur konsistensi pendapat yang diberikan oleh responden untuk semua pihak yang terlibat digunakan rasio konsistensi (*consistency ratio*) untuk membentuk sebuah hirarki.

3.2.2.b. Teori Permainan (*Game Theory*)

Teori permainan adalah studi formal konflik dan kerjasama. Game konsep teoritis berlaku setiap kali tindakan beberapa agen yang saling tergantung (Binmore, 1991). Agen ini mungkin individu, kelompok, perusahaan, atau kombinasi dari semuanya. Konsep teori permainan memberikan bahasa untuk merumuskan, struktur, menganalisis, dan memahami skenario strategis. Sejarah dan dampak teori permainan Contoh paling awal dari analisis teori permainan formal studi duopoli oleh Antoine Cournot pada tahun 1838. Matematikawan Emile Borel menyarankan teori formal game pada tahun 1921, yang ditindaklanjuti oleh matematikawan John von Neumann pada tahun 1928 (Fudenberg dan Tirole, 1991). Teori permainan didirikan sebagai bidang yang

berdiri sendiri setelah 1944 publikasi oleh John von Neumann dan Oskar Morgenstern (Gibbons, 1992). Pada tahun 1950, John Nash menunjukkan bahwa permainan yang terbatas selalu memiliki titik ekuilibrium, di mana semua pemain memilih tindakan yang terbaik untuk diberi pilihan lawan (Myerson, 1991; Rasmusen, 2001).

Konsep sentral teori permainan ini *noncooperative* telah menjadi titik fokus dari analisis sejak saat itu. Pada tahun 1950 dan 1960-an, teori permainan diperluas secara teoritis dan diterapkan untuk masalah perang dan politik. Sejak 1970-an, telah mendorong revolusi dalam teori ekonomi (Nasar, 1998). Setiap pemain dalam *game theory* mempunyai keinginan untuk menang. (Papadimitriou dan Steiglitz, 1982; Chvatal, 1983; Dubins dan Savage, 1965) Kasus-kasus dalam *game theory*, sebelum diselesaikan dengan menggunakan salah satu metoda *game theory* diidentifikasi dulu berdasarkan jumlah pemain, jumlah keuntungan dan kerugian atau yang biasa disebut dengan nilai permainan, jenis strategi yang digunakan. Supranto (2007:297) dan Mulyono (1991:43) memaparkan bahwa *Game Theory* dikembangkan untuk menganalisis situasi kompetitif yang bertentangan atau analisis keputusan pada suatu konflik. Subagyo *et al*, (1991:143) teori permainan merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Rasmusen (2001) Pada *Game Theory* memunculkan permodelan baru dalam perilaku ekonomi, menentukan fungsi-fungsi kepuasan (*Pay Off Function*) dan menghasilkan beberapa tindakan (*Strategy Set*) kepada *Player*.

Game Theory dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria yakni (1) Berdasarkan jumlah pemain ada dua jenis *games* yang dikenal yaitu *two-person games* dan *N-Person games*. Jumlah pemain yang terlibat dalam *two person games* adalah dua, dan dalam *N-Person games* adalah lebih dari dua. (2) berdasarkan jumlah *pay-off* (Ganjaran atau hasil) yang berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian dikenal dua jenis *games*, yaitu *zero-sum games* dan *non zero-sum games*. Nilai permainan dalam *zero-sum games* adalah nol, sedangkan dalam *non zero-sum games* nilai permainannya tidak sama dengan nol. (3) berdasarkan sifat tindakan (*Strategy set*) yang dipilih yaitu *cooperative games* dan

non cooperative games. Berikut karakteristik yang dapat diklasifikasikan untuk pemecahan masalah dalam permainan adalah sebagai berikut:

a. Matriks *Pay-off*

Analisis permasalahan dalam *Game Theory* dituangkan dalam bentuk suatu matriks. Suatu matriks permainan merupakan nilai (*Pay-off*) yang disusun berbentuk persegi panjang, dimana baris menunjukkan strategi salah seorang pemain.

	b_1	...	b_n
a_1	P_{11}	...	P_{1n}
...
a_m	P_{m1}	...	P_{mn}

Gambar 3.3 Matriks *Pay-off* Suatu Games

Gambar 3.3 menunjukkan matriks *pay-off* suatu *games*. Dimana a_1 adalah tindakan yang diambil pemain pertama dan b_1 adalah tindakan yang diambil oleh pemain kedua. Sedangkan P_{11} merupakan *pay-off* akibat interaksi kedua pemain. Misalnya, suatu *games* melibatkan interaksi pendalaman dan inklusi keuangan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan, instrumen yang digunakan sebagai strategi untuk setiap interaksi adalah terbatas, yakni dua strategi untuk pendalaman keuangan yaitu liabilitas likuid dan Kredit sektor swasta, dan dua strategi untuk inklusi keuangan yaitu penetrasi perbankan dan ketersediaan layanan keuangan. Dalam *Game Theory* diasumsikan bahwa setiap pemain mengetahui dengan tepat *pay-off* setiap kemungkinan kombinasi strategi yang tersedia. Maka matriks *pay-off games* dapat ditunjukkan pada Gambar 3.4 berikut:

		Inklusi Keuangan (B)	
		Penetrasi Perbankan	Ketersediaan layanan keuangan
Pendalaman Keuangan (A)	Liabilitas likuid	1,2	0,1
	Kredit sektor swasta	2,1	1,0

Gambar 3.4 Matriks *Pay-off* suatu Games

Gambar 3.4 menunjukkan jika pendalaman keuangan memilih liabilitas likuid dan inklusi keuangan memilih penetrasi perbankan, maka pendalaman keuangan mendapatkan 1 dan inklusi keuangan mendapat 2. Dari sisi pendalaman keuangan, adalah selalu lebih baik untuk memilih strategi kredit sektor swasta karena hasilnya selalu lebih besar dibanding strategi apapun yang dipilih inklusi keuangan. Dalam hal ini, strategi kredit sektor swasta adalah strategi dominan bagi pendalaman keuangan dan dengan penalaran yang sama, strategi penetrasi perbankan merupakan strategi dominan bagi inklusi keuangan. Kasus ini menunjukkan bahwa jumlah *pay-off* setiap kemungkinan kombinasi strategi tidak sama dengan nol dan tidak tetap, dengan demikian ini tergolong *non-zero* dan *non constant sum games*.

b. Prinsip Maksimin dan Minimaks

Terdapat dua prinsip dalam menyelesaikan masalah dalam *Game Theory* yaitu prinsip maksimin untuk keuntungan dan minimaks untuk kerugian. Jika nilai minimaks sama dengan nilai maksimini maka nilai ini disebut dengan titik pelana (*Saddle point*), dan strategi murni (*Pure Strategy*) minimaks dan maksimin disebut strategi optimal. Menurut prinsip maksimin, pemain A adalah pesimistik, sehingga akan memilih strategi yang memaksimumkan keuntungan dari kemungkinan *pay-off* yang minimum. Pada waktu yang bersamaan, B berusaha meminimumkan kerugian dari kerugian yang diperkirakan maksimum. Misalnya dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut:

		Kebijakan B			Keuntungan	Minimum Maksimin
		x	Y	z		
Kebijakan B	1	8	(4)	7,5	(4)	
	2	7	3,5	3	3	
	Kerugian Maksimum	8	(4)	7,5		Minimaks

Gambar 3.5 Matriks *pay-off*

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa bagi pemain A, 4 adalah keuntungan minimum untuk strategi 1 dan 3 adalah keuntungan minimum untuk strategi 2. Karena nilai maksimum dari kedua strategi ini adalah 4, maka strategi 1 dipilih oleh A. Bagi B, 8 adalah kerugian maksimum untuk strategi x. Sedangkan kerugian maksimum untuk y adalah 4, dan kerugian maksimum untuk z adalah 7,5. Kerugian minimum adalah 4 (minimum 8;4;7,5) sehingga strategi y yang dipilih oleh B. Sehingga, nilai maksimum = nilai minimum = 4. Ini berarti permainan memiliki suatu *saddle point* yang ditunjukkan oleh elemen matriks (1,y). *Value of games* adalah 4. Karena dalam permainan ini tidak ada pemain yang dapat memperbaiki posisi dengan memilih strategi lain manapun, maka permainan dapat dikatakan stabil atau dalam keadaan seimbang.

c. Strategi Permainan

Ada dua jenis strategi permainan yang biasa digunakan, yaitu *Pure Strategy* dan *Mixed Strategy*. Hasil yang optimal dari suatu permainan mempunyai *saddle point* yang dapat diperoleh dengan menggunakan *Pure Strategy*, yang dimaksud *saddle point* adalah titik keseimbangan antara nilai permainan kedua pemain dengan menggunakan kriteria maksimum dan minimum dan apabila dalam suatu kasus tidak mempunyai *saddle point* maka mencari solusi optimal dengan *Mixed Strategy*. Hal ini dapat dicapai dengan memilih secara *random* diantara beberapa strategi yang menghasilkan setiap strategi sejumlah persen tertentu dari waktu yang berarti pemilihan suatu strategi dengan suatu probabilitas tertentu, sehingga keuntungan atau kerugian pemain adalah sama tanpa memperdulikan strategi lawan.

Terdapat beberapa langkah dalam melakukan *mixed strategy* yaitu langkah pertama, menerapkan prinsip maksimum dan minimum. Karena nilai maksimum keuntungan tidak sama dengan nilai minimum kerugian maka *games* ini tidak memiliki suatu *saddle point* atau *pure strategy* bukan merupakan strategi optimum, sebagai gantinya keseimbangan dapat dicapai jika menggunakan *mixed strategy*. Langkah kedua, menerapkan strategi dominan dengan harapan ukuran matriks *pay-off* dapat diperkecil. Terdapat konsep strategi campuran yang dapat

dilakukan dengan cara (1) metode analitis; (2) metode grafik; (3) metode aljabar matriks; (4) metode *linier programming*.

d. Peranan Dominasi

Dominasi merupakan suatu usaha untuk mengurangi ukuran matriks *pay-off*. Dalam suatu permainan $m \times n$, baris i dikatakan menguasai (*dominance*) baris h apabila setiap *entry* atau isian di baris i sama besarnya atau lebih besar dari pada isian yang sesuai di baris h . Demikian kolom j dikatakan menguasai kolom k kalau setiap isian di kolom j sama kecilnya atau lebih kecil dari pada isian yang sesuai di kolom k . Sehingga baris atau kolom yang didominasi dapat dihilangkan/dicoret dari matriks permainan. Sebab, baris dan kolom yang demikian tidak akan memberikan hasil pemecahan yang optimal. Apabila permainan $2 \times n$ atau $m \times 2$ tidak mempunyai *saddle point* yaitu ditentukan secara tidak ketat, maka semua baris atau kolom yang dikuasai harus dihilangkan atau dicoret sebagai langkah pemecahannya. Matriks permainan menjadi lebih kecil disebut *reduced form*.

e. *Prisoner's Dilemma* dan *Nash Equilibrium*

Konsepsi Gibbon (1992) menyatakan bahwa strategi dominan adalah tindakan tertentu diantara berbagai kemungkinan tindakan yang tersedia yang ditunjukkan atau dipilih oleh salah satu pihak tanpa memperdulikan tindakan apapun yang diambil oleh pihak lain. Jika dua atau lebih strategi bertemu dalam satu titik maka titik tersebut dinamakan *Nash equilibrium*. Jika keseimbangan tersebut merupakan situasi yang saling tidak menyenangkan atau saling melukai diantara semua pihak yang terlibat dalam interaksi maka keseimbangan tersebut dinamakan *prisoner's dilemma*. Merupakan satu *games* tertentu diaman kombinasi strategi yang menghasilkan *pareto efficient* yaitu tidak ada kombinasi strategi lain yang memperbaiki keadaan dalam *games*. Sedangkan keseimbangan yang bertemu pada kedua strategi dominan dari masing-masing pasangan strategi disebut *Nash equilibrium*

3.3.3 Analisis Preskripsi

Sebuah metode tidak dapat terpisah dari alur penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data maupun mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya (Best, 1982:119).

Sedangkan Nawawi (1983:64) mengungkapkan bahwa metode penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok yaitu memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional. Sehingga dapat dipahami bahwa metode deskriptif merupakan metode penelitian yang banyak dipergunakan dalam penelitian sosial yang ditujukan fenomena yang bersifat ilmiah dan representasi atas data serta berupaya menjawab permasalahan pada situasi yang dihadapi. Menciptakan penggambaran atas suatu keadaan secara objektif dalam suatu deksripsi situasi.

3.4 Definisi Variabel Operasional

Dalam penelitian ini menggunakan enam variabel yang digunakan dalam pembentukan kedua indeks yaitu indeks keuangan inklusi dan pendalaman keuangan.

1. Penetrasi perbankan merupakan jumlah perbankan yang terdapat di Indonesia tetapi dalam penelitian ini menggunakan akun deposit bank untuk mengukur penetrasi perbankan di Indonesia dikarenakan keterbatasan data.

2. Ketersediaan layanan perbankan merupakan indikator penentu inklusi keuangan berdasarkan jumlah cabang bank dan ketersediaan ATM di Indonesia.
3. Penggunaan layanan perbankan yaitu kredit dan deposit sektor swasta dan rumah tangga pada seluruh kategori bank yang ada di Indonesia.
4. Aset keuangan domestik (DFA) adalah rasio modal bank dan cadangan terhadap total aset. Modal dan cadangan termasuk dana disumbangkan oleh pemilik, laba ditahan, cadangan umum dan khusus, ketentuan, dan penyesuaian valuasi. Modal meliputi tingkat 1 modal (saham yang disetor dan saham biasa), yang merupakan fitur umum dalam sistem perbankan negara yang bersangkutan dan jumlah modal peraturan, yang meliputi beberapa jenis tertentu instrumen utang subordinasi yang tidak perlu dibayar jika dana diperlukan untuk mempertahankan tingkat modal minimum. Total aktiva mencakup semua aset non finansial dan keuangan.
5. Liabilitas domestik (DLA) adalah timbulnya kewajiban bersih pemerintah meliputi pembiayaan luar negeri (yang diperoleh dari bukan penduduk) dan pembiayaan dalam negeri (yang diperoleh dari penduduk), atau sarana yang pemerintah menyediakan sumber daya keuangan untuk menutup defisit anggaran atau mengalokasikan sumber daya keuangan yang timbul dari surplus anggaran. Timbulnya kewajiban bersih harus diimbangi dengan perolehan aset keuangan (item pembiayaan ketiga). Perbedaan antara surplus atau defisit kas dan item pembiayaan tiga adalah perubahan bersih dalam stok uang tunai.
6. Aset keuangan asing (FFA) adalah jumlah aset asing yang dimiliki oleh otoritas moneter dan bank umum dikurangi kewajiban asing. Data dalam mata uang lokal saat ini.
7. Liabilitas Asing (FLA) adalah timbulnya kewajiban bersih pemerintah meliputi pembiayaan luar negeri (yang diperoleh dari bukan penduduk) dan pembiayaan dalam negeri (yang diperoleh dari penduduk), atau sarana yang pemerintah menyediakan sumber daya keuangan untuk menutup defisit anggaran atau mengalokasikan sumber daya keuangan yang timbul dari

surplus anggaran. Timbulnya kewajiban bersih harus diimbangi dengan perolehan aset keuangan (item pembiayaan ketiga). Perbedaan antara surplus atau defisit kas dan item pembiayaan tiga adalah perubahan bersih dalam stok uang tunai.

3.5 Limitasi Penelitian

1. Indeks keuangan inklusi dan indeks pendalaman keuangan merupakan ukuran dari keadaan institusi keuangan suatu negara dalam suatu sistem keuangan yaitu dari aspek permintaan dan penawaran. Dalam aspek permintaan mempelajari indikator ekonomi dalam mengatasi permasalahan fenomena inklusi dan aspek penawaran ditangkap oleh fenomenan pendalaman keuangan, yaitu merupakan sektor perbankan secara keseluruhan yang tidak berdasarkan pada kategori bank tertentu.
2. Objek dalam penelitian ini adalah Indonesia yang masih memiliki penguasaan aset finansial yang rendah.

BAB 4. PEMBAHASAN

Bab 4 ini akan diuraikan secara lebih rinci mengenai konfigurasi perkembangan sistem keuangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, fenomena inklusi keuangan (*Financial Inclusion*) dan pendalaman keuangan (*Financial Deepening*), serta *vis a vis* inklusi keuangan (*Financial Inclusion*) dan pendalaman keuangan (*Financial Deepening*). Uraian tersebut digunakan untuk memperkuat hasil perhitungan mengenai ukuran inklusi dan pendalaman keuangan dengan indeksisasi dan sintesa *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory*. Selain itu juga dipaparkan hasil deskriptif-naratif mengenai interaksi inklusi dan pendalaman keuangan di Indonesia.

4.1 Konfigurasi Perkembangan Sistem Keuangan dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

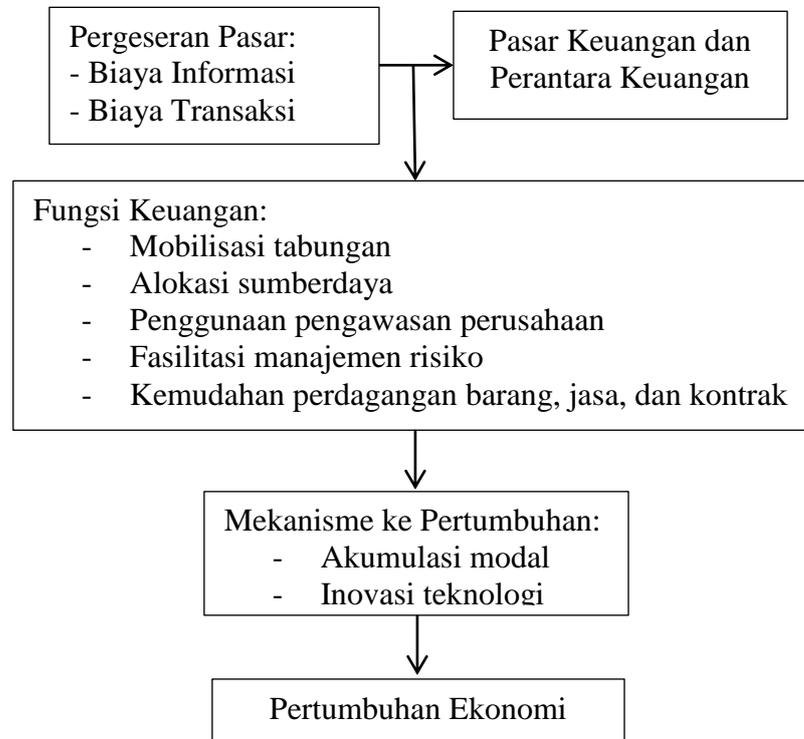
Keterbukaan perekonomian menyebabkan globalisasi di sektor keuangan menguat sehingga kebutuhan negara dalam mencukupi modalnya mendapat tambahan dengan adanya aliran dana masuk ke dalam negeri. Suatu negara membutuhkan dana bagi pembangunan ekonomi dimana dana tidak dapat hanya diperoleh dari hasil pungutan wajib yang diadakan oleh pemerintah yaitu pajak namun membutuhkan dari sumber lainnya. Perbankan sebagai industri yang mengelola dana masyarakat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan dengan menghimpun dana dan menyalurkannya kembali berupa pinjaman. Kondisi perbankan yang memburuk maka akan mengakibatkan kontraksi yang substansial dan menghambat pemberian pinjaman. Hambatan tersebut mengakibatkan penurunan pendanaan investasi yang akan memperlambat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

4.1.1 Sistem Keuangan di Indonesia

Sistem keuangan terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan

fasilitas jasa-jasa keuangan (Cole dan Roos, 1991; Mishkin, 2006). Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan. Sektor keuangan memiliki peran yang penting dalam sistem perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi, akumulasi kapital, dan inovasi teknologi (Levine, 1997).

Fungsi intermediasi memungkinkan lembaga keuangan menggalang dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak yang membutuhkan dana khususnya sektor riil. Pertumbuhan perekonomian yang pesat tidak lepas dari perkembangan sistem keuangan (Gambar 4.1). Secara konseptual, pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam perekonomian didorong oleh empat hal, antara lain pertumbuhan sektor keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor riil, integrasi sistem keuangan global dan regional, kompleksitas sistem keuangan dan perubahan komposisi dalam proses sistem keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dimana komposisi aset non moneter menjadi lebih penting (Houben, 2004).



Gambar 4.1 Pendekatan Teoritis Perkembangan Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sumber: Levine, 1997.

Fungsi pokok lain dalam suatu sistem keuangan yaitu fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi kredit, fungsi pembayaran, fungsi resiko dan fungsi kebijakan (Thorbecke, 1992). Dalam sejarah sektor keuangan di Indonesia, sistem keuangan mengalami perubahan dan perkembangan yang fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi pada akhir dekade 1980-an yang kemudian diterbitkannya beberapa undang-undang dibidang keuangan dan perbankan. Perkembangan perbankan di Indonesia di mulai pada tahun 1988 dengan adanya paket deregulasi tertanggal 27 Oktober 1988 yaitu berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah dan pada puncaknya jumlah bank umum bertambah dari yang semula 111 bank menjadi 240 bank pada tahun 1994-1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat signifikan dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 pada tahun 1996 (Priyarsono *et,al.* 2011).

Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 hingga 1996 berbalik arah ketika memasuki periode 1997-1998 karena terjadi krisis keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambilalihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya (Cole dan Roos, 1991; Djiwandono, 2001).

Periode 1999-2002 krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997-1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis (Basri, 2002; Thorbecke, 1992). Berdasarkan fakta dan semakin jelasnya arah kebijakan yang direncanakan pemerintah dalam masa pemulihan krisis 1997-1998, maka pemerintah dan utamanya Bank Indonesia sejak awal tahun 2004 memperkenalkan kepada publik dan kepada pelaku di sektor perbankan bahwa dilaksanakan kebijakan pengembangan sistem perbankan Indonesia secara profesional melalui penerapan strategi yang disebut *Arsitektur Perbankan Indonesia* (API). Strategi ini

dimaksudkan agar sektor perbankan dapat menjadi pilar utama sumber pembiayaan sektor riil, menjadi sektor ekonomi yang sehat, kuat, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat domestik maupun internasional untuk mendukung peningkatan kinerja perbankan dalam perekonomian.

Perkembangan dan kinerja perbankan ditandai dengan indikator kinerja bank umum konvensional di Indonesia yang dipaparkan pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Dinamika Kinerja Perbankan di Indonesia (%)

Tahun	CAR	ROA	BOPO	LDR
2004	19,42	3,46	76,64	49,95
2005	19,30	2,55	89,50	59,66
2006	21,27	2,64	86,98	61,56
2007	19,30	2,78	84,05	66,32
2008	26,76	2,33	86,59	74,58
2009	27,42	2,60	86,63	72,88
2010	17,18	2,86	86,14	75,21
2011	16,05	3,03	85,42	78,77
2012	17,43	3,11	74,10	83,58
2013	18,13	3,08	74,08	89,70

*CAR (*Capital Adequacy Ratio*); ROA (*Return on Asset*);
BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional);
LDR (*Loan to Deposit Ratio*)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2014, diolah

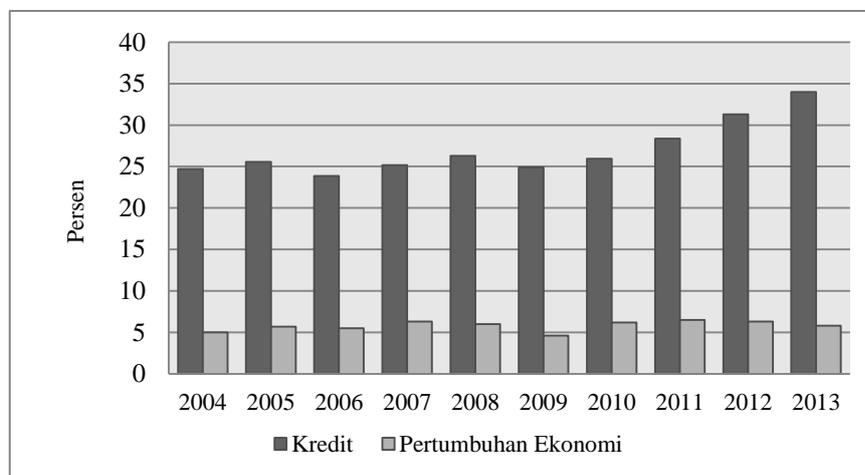
Pemaparan tabel 4.1 menunjukkan perkembangan dan kinerja perbankan di Indonesia selama tahun 2004 hingga tahun 2013. Tercatat bahwa pergerakan relatif fluktuatif selama sepuluh tahun, angka tertinggi pada tahun 2009 dan terendah di tahun 2011. Secara umum rasio CAR yang terdaftar di bursa efek memenuhi persyaratan yaitu rasio CAR lebih dari 8 %. Berdasarkan teori jika rasio CAR meningkat maka seharusnya ROA juga mengalami peningkatan (Mishkin, 2008). Hal serupa juga terjadi pada tingkat efisiensi operasi perbankan dimana BOPO mengalami fluktuasi, jika rasio BOPO yang dihasilkan suatu bank melebihi 90 persen, makadapat disimpulkan bahwa bank tidak efisien dalam menjalankan operasinya.

Saat rasio BOPO berada pada kondisi efisien, laba yang diperoleh akan semakin besar sebab biaya operasi yang ditanggung bank semakin kecil. Dengan meningkatnya laba maka dipastikan ROA juga akan meningkat. Angka terbaik dari BOPO adalah dibawah 90 persen, terlihat pada tabel 4.1 bahwa rasio selama 2004 hingga 2013 dibawah 90 persen namun angka yang tercatat mendekati 90 persen yang menunjukkan bahwa perlunya evaluasi kinerja secara intensif bagi perbankan meskipun di dua tahun terakhir tercatat kinerja bank lebih efisien dibanding tahun-tahun sebelumnya (Kuncoro dan Suharjono (2002).

Pada pergerakan rasio LDR angka terbaik adalah 80 persen hingga 110 persen, tercatat pada tabel 4.1 hanya tahun 2012 dan 2013 yang memenuhi standar Bank Indonesia. Fluktuasi yang terjadi pada rasio-rasio perbankan menandakan bahwa kinerja perbankan selama rentang 2004 hingga 2013 masih dalam tahap pembangunan sistem kelembagaan keuangan di Indonesia. Paska terjadinya krisis 1997-1998 mengalami masa pemulihan dalam sistem perekonomian dan perbankan, dalam perspektif perbankan dalam era globalisasi perekonomian berdasarkan data yang dijelaskan pada tabel 4.1 secara struktural sektor perbankan masih harus mengalami perbaikan untuk bersaing secara global dan beraliansi secara strategi terhadap mitra-mitra kerja perbankan yang menguntungkan sehingga memperkuat seluruh bagian dari perbankan secara struktural (Suyono, 2005; Merkusiwati, 2007).

4.1.2 Deskripsi Interaksi Sistem Keuangan dan Pembangunan Ekonomi

Peranan sektor keuangan terhadap pembangunan ekonomi teraliansi dengan dana yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bagi pembangunan pada seluruh sektor pembangunan negeri (Allen dan Oura, 2004; Levine, 2000). Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh instansi yang terkait secara berkelanjutan maka akan memberikan nilai peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini performa perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari besar kecilnya pemberian kredit terhadap sektor riil (Koch dan Mac Donald, 2003:41; Siringoringo, 2012)



Gambar 4.2 Perkembangan kredit dan pertumbuhan ekonomi 2004-2013 di Indonesia (%). Sumber: Berbagai sumber, 2014, diolah.

Paparan gambar 4.2 merupakan perkembangan kredit dan pertumbuhan ekonomi, kredit yang diberikan oleh perbankan dan pertumbuhan ekonomi dalam persentase, kredit yang diberikan oleh perbankan mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Setelah terjadinya krisis tahun 2008-2009 yang tidak menyebabkan *shock* terhadap fundamental ekonomi laju kredit yang disalurkan mengalami kenaikan hingga ditahun 2013 namun hal yang berbeda ditunjukkan pada pertumbuhan ekonomi yaitu meski kredit yang disalurkan mengalami kenaikan justru pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Hal ini salah satunya disebabkan adanya tekanan global atas kondisi ekonomi yang terjadi (Lee, 2005). Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan baik perbankan maupun non-bank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Cheng dan Degryse 2006). Sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan keadaan konsumen yang memungkinkan untuk melakukan pembelian lebih baik (Mishkin 2008).

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang bergantung terhadap situasi ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi global turut pula menyebabkan

keguncangan ekonomi dalam negeri. Sehingga penguatan sistem keuangan diperlukan bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi. Ketahanan keuangan menjadi salah satu faktor dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara (Copelman, 2000; Graff, 2001; Rioja dan Valev, 2005). Pembangunan ekonomi yang baik adalah pembangunan yang tidak teraglomerasi sehingga pemerataan pembangunan tercapai. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa kepulauan besar yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan Papua dan Kepulauan Maluku.

Dari sisi spasial, penyaluran kredit perbankan masih didominasi oleh Pulau Jawa yang tertinggi dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pangsa Kredit dan DPK (Dana Pihak Ketiga) Pulau di Indonesia 2011-2013 dalam persen (%). Sumber: Bank Indonesia. 2014.

Pulau	Pangsa Kredit			Pangsa DPK (Dana Pihak Ketiga)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Jawa	75,83	76,1	76,75	74,61	74,39	74,93
Sumatera	12,35	11,87	11,45	13,29	13,25	12,89
Kalimantan	4,85	4,98	4,77	4,29	4,38	4,37
Sulawesi	2,97	2,99	2,93	4,38	4,43	4,25
Bali dan Nusa Tenggara	2,49	2,56	2,6	2,38	2,46	2,48
Papua dan Kepulauan Maluku	1,5	1,5	1,49	1,05	1,09	1,08

Paparan tabel 4.2 menunjukkan kondisi pangsa kredit dan DPK (Dana Pihak Ketiga) di Indonesia rentang waktu tiga tahun. Konsentrasi terbesar kredit dan DPK adalah di Pulau Jawa, hal ini menunjukkan bahwa terjadi aglomerasi pembangunan yang ditunjukkan dengan pangsa kredit terbesar yang berkisar 75 hingga 76 persen pangsa kredit serta diikuti komposisi pangsa DPK yang bergerak rata-rata 74 persen. Hal tersebut terjadi karena kondisi ekonomi yang berada di Pulau Jawa berbeda dibandingkan pulau-pulau besar lainnya. Mudahnya akses masyarakat terhadap barang-barang produksi menjadi salah satu alasan Pulau Jawa dapat berkembang (Arsyad, 2010:455).

Keadaan yang sebaliknya terjadi di Pulau Papua dan Kepulauan Maluku, pulau ini menunjukkan nilai pangsa kredit dan DPK terkecil dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Letak geografis yang jauh dari ibu kota Indonesia

menjadikan pulau ini kurang mendapat perhatian dalam pembangunan serta terbentur akan adat-istiadat yang masih mendominasi perilaku masyarakat dalam beraktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak cukup dengan permainan modal yang diberikan kepada masyarakat namun struktur dan karakter wilayah akan memengaruhi tindakan masyarakat dalam melakukan transaksi (Capello, 2007).

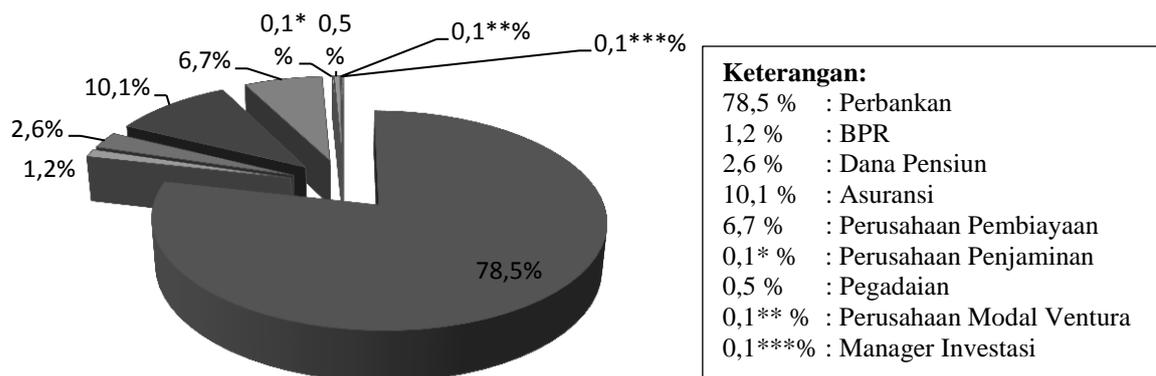
4.1.3 Karakteristik Lembaga Keuangan di Indonesia

Lembaga-lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga yang mempercepat penyaluran dana-dana dari *surplus spending unit* (SSU) ke *deficit spending unit* (DSU) (PSAK No.31 Perbankan). Fungsi ini disebut sebagai perantara finansial (*financial intermediation*). Selain fungsi terdapat fungsi lain yaitu sebagai *agent of development*. Fungsi-fungsi tersebut lembaga keuangan mendorong pengembangan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan dapat memobilisasi dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali ke dalam perekonomian dalam bentuk kredit. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai semua badan yang berkegiatan di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi masyarakat. Sebagai unit usaha yang bergerak di bidang keuangan, produk dari lembaga keuangan adalah jasa-jasa finansial. Jasa-jasa ini merupakan bentuk dari kegiatannya yang memudahkan pendistribusian dana dan modal.

Indonesia memiliki lembaga keuangan bank dan bukan bank, lembaga keuangan bank didirikan tahun 1973 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.38/MK/IV/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usaha-usaha yaitu menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga, memberi kredit jangka menengah, mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara, bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan berbadan hukum pemerintah, bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan konsumen, perantara untuk mendapatkan tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian, dan melakukan usaha lain di bidang keuangan. Lain

halnya dengan lembaga keuangan bank yang terdiri atas bank sentral, umum, tabungan, pembangunan, dan bank desa.

Berdasarkan kepemilikannya terdiri atas bank pemerintah, swasta nasional, swasta asing, campuran, dan bank koperasi. Berikut adalah komposisi aset lembaga keuangan di Indonesia pada gambar 4.3.

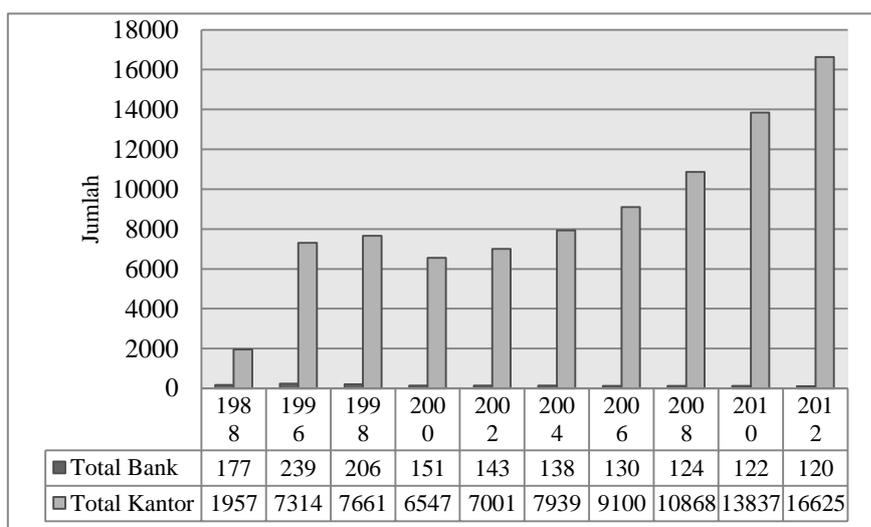


Gambar 4.3 Komposisi Aset Lembaga Keuangan di Indonesia. Sumber: Kajian Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia. 2014.

Berdasarkan paparan gambar 4.3 bahwa Perbankan mendominasi penguasaan aset lembaga keuangan di Indonesia sebesar 78,5 persen diikuti oleh asuransi sebesar 10,1 persen. Komposisi terbesar oleh perbankan dalam hal ini adalah lembaga keuangan formal yang bertindak sebagai penyimpan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali berupa kredit yang diberikan untuk pembiayaan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari (Acemoglu, 2004). Perbankan sebagai lembaga institusi keuangan memiliki keterkaitan terhadap proses pembangunan ekonomi dengan menyalurkan dananya kepada masyarakat, penyaluran tersebut terjadi dengan memberikan kredit yang kemudian digunakan untuk berbagai macam jenis kredit. Kredit yang baik adalah kredit yang diberikan pada kredit yang bersifat produksi sehingga manfaat yang ditimbulkan akan memiliki dampak ganda terhadap perekonomian (Edison, 2003; Arsyad, 2005; Williamson, 2000).

Undang-Undang Pokok Perbankan No.23 Tahun 1998 jenis bank di Indonesia yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank

perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang sejenis. Khusus bagi lembaga keuangan bank di Indonesia menguasai 78 persen dari total aset industri sehingga bank memiliki peranan yang cukup penting bagi perekonomian. Berikut adalah perkembangan jumlah bank di Indonesia yang disajikan dalam gambar 4.4 dibawah ini:



Gambar 4.4 Perkembangan jumlah bank umum di Indonesia. Sumber: Laporan pengawasan perbankan, 2014, diolah.

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan perkembangan jumlah bank umum di Indonesia, terlihat bahwa jumlah bank setelah terjadinya deregulasi di bidang perbankan mengalami penurunan hingga tahun 2012. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan efisiensi dari operasi perbankan dalam perekonomian (Basri, 2002). Hal lain tercatat bahwa penurunan jumlah bank di Indonesia justru meningkatkan jumlah kantor bank beroperasi yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Berkurangnya jumlah saingan dalam industri ini membuat bank dengan mudah melakukan ekspansi pasar. Namun menjamurnya jumlah kantor bank yang ada tidak kunjung menyelesaikan persoalan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan di Indonesia, hanya setengah dari populasi masyarakat Indonesia yang tersentuh oleh jasa keuangan (Wie, 1987;1988). Kinerja perbankan paska krisis mengalami peningkatan baik dari efisiensi dan segi operasional sehingga upaya penguatan struktur industri perbankan dapat terwujud serta memperluas cakupan

usaha untuk melayani masyarakat secara luas terhadap jasa keuangan di Indonesia.

4.2 Analisis Hasil *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening* di Indonesia

Suatu negara memiliki sistem kelembagaan keuangan yang dikonstruksi berdasarkan arsitek kebijakan keuangan yang dimiliki. Keuangan sebagai sektor yang cukup penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara dengan perputaran modal yang terjadi sehingga dapat mendanai kegiatan investasi. Dimana keuangan erat kaitannya dengan industri perbankan, industri tersebut diproyeksikan dapat mengakomodir dana secara optimal dengan skenario pendanaan melalui pihak ketiga (Ghali, 1999; Allen, 2001). Hal ini memunculkan upaya untuk menciptakan regulasi yang tepat bagi perekonomian, mengingat upaya penciptaan sebuah industri perbankan yang kuat yaitu sebuah pendalaman keuangan dan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat yaitu sebuah inklusi keuangan yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada kondisi kelembagaan keuangan di Indonesia (Beck dan Brown, 2011).

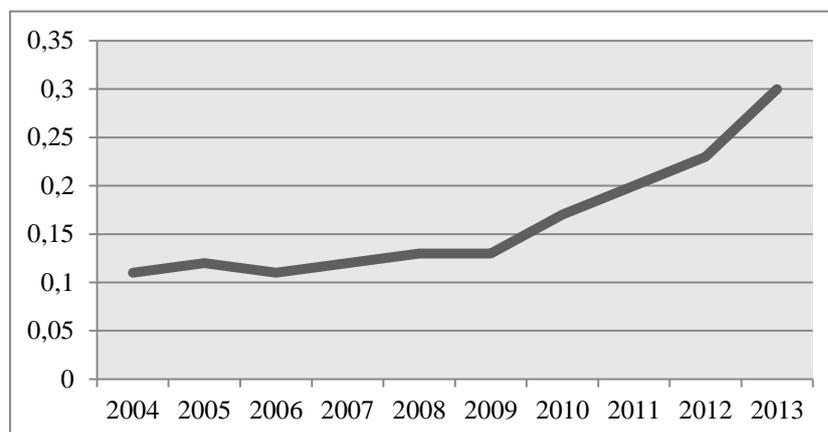
Pada subbab 4.2 akan menggambarkan keberadaan inklusi keuangan (*Financial Inclusion*) dan pendalaman keuangan (*Financial Deepening*), maka akan memberikan gambaran kondisi keuangan dengan ditunjukkan dalam indikator-indikator yang termuat didalamnya sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dengan berbagai determinasi yang menyertainya. Hasil perhitungan inklusi dan pendalaman keuangan di Indonesia dikaitkan dengan fenomena ekonomi yang sedang terjadi dan diolah dalam suatu konteks ekonomi kekinian terhadap pengambilan suatu kebijakan atas sintesa *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory*.

4.2.1 *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening* di Indonesia

Sejak terjadinya krisis keuangan yang menyerang fundamental ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 sektor keuangan mengalami *shock* sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang melambat pada saat itu (Johnston, dan Morduch: 2008). Perbankan tidak mampu menjadi penopang

kegiatan ekonomi. Berbagai kebijakan kemudian muncul yang merupakan dampak dari krisis keuangan dengan paket-paket kebijakan keuangan dan momentumnya pada tahun 2004 merupakan awal terjadinya konsolidasi perbankan di Indonesia (Priyarsono, 2011). Perbankan sebagai lembaga penghimpun dan pembagi dana kepada masyarakat bertindak sebagai penggerak dalam perekonomian, menghimpun dana masyarakat tidaklah mudah sebab tersebar luasnya keberadaan masyarakat diikuti oleh letak geografis yang luas di Indonesia menjadi salah satu kendala.

Masyarakat di Indonesia hanya sebagian kecil dari populasi yang terakses oleh lembaga keuangan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Dunia di tahun 2011 (Laporan World Bank, 2012). Hal tersebut memungkinkan adanya regulasi yang disebut sebagai inklusi keuangan (*Financial inclusion*) yang digemakan kembali pada pelaksanaan *working group G-20* (Dupas dan Robinson, 2009; Allen, Kunt, dan Peria, 2012). Akses keuangan menjadi persoalan yang relatif penting bagi keberlangsungan aktivitas perekonomian suatu negara, dibutuhkan upaya-upaya secara inklusif untuk membangun keuangan di Indonesia (Merton dan Bodie, 1995, 2004; Levine, 1997).



Gambar 4.5 Index of Financial Inclusion 2004-2013 di Indonesia.
Sumber: berbagai sumber, diolah. 2014.

Berdasarkan gambar 4.5 merupakan *Index of Financial Inclusion* tahun 2004 hingga 2013 di Indonesia. Secara umum inklusi keuangan di Indonesia berada pada kisaran 0,11-0,3 yang termasuk dalam kategori rendah (*low*) dan menengah (*middle*). Pada tahun 2004 hingga tahun 2009 kondisi inklusi keuangan

(*financial inclusion*) bergerak melambat yaitu besaran inklusi tahun 2004 adalah 0,11, tahun 2005 adalah 0,12, tahun 2006 adalah 0,11, tahun 2007 adalah 0,12, tahun 2008 adalah 0,13, dan tahun 2009 adalah 0,13. Hal tersebut dideterminasi oleh upaya pembangunan keuangan yang dilakukan oleh Indonesia, dimana pada tahun 2004 merupakan awal pembangunan keuangan dengan regulasi baru yaitu dengan konsolidasi perbankan.

Pemulihan atas krisis yang terjadi di tahun 1998 yang menghantam fundamental perekonomian Indonesia pada saat itu. Krisis yang terjadi pula pada tahun 2008 namun tidak seperti krisis pada tahun 1998, krisis ini mampu ditangani dengan baik oleh Bank Indonesia dan Pemerintah (Soetino, 2014); Djuned, 2014). Pada tahun 2008 saat terjadi krisis besaran inklusi keuangan mencapai 0,13 dan ukuran serupa terjadi pada tahun 2009 yang merupakan masa peralihan krisis. Terbukti bahwa Indonesia mampu melewati krisis yang terjadi di tahun 2008 meskipun efek yang ditimbulkan pada saat itu tidak sebesar krisis sebelumnya. Tahun 2010 ukuran inklusi keuangan mencapai 0,17 meningkat 0,04 dari tahun sebelumnya. Indonesia mampu bangkit dengan mengerahkan berbagai upaya dalam pembangunan keuangan baik secara makro maupun mikro.

Indeks inklusi keuangan bergerak tumbuh hingga puncaknya di tahun 2013. Pada tahun 2011 ukuran inklusi sebesar 0,2 dan tahun 2012 yaitu 0,23 serta terakhir pada tahun 2013 mencapai 0,3 yang dikategorikan ukuran menengah (*middle*). Indonesia hanya berada pada inklusi dengan kategori rendah (*low*) sejak tahun 2004 hingga tahun 2012. Kategori menengah (*middle*) baru dapat dicapai tahun 2013. Rentan waktu yang dibutuhkan dalam mencapai kategori selanjutnya dalam tangga inklusi keuangan cukup lama, membutuhkan sembilan tahun berada pada kategori menengah (*middle*). Kontinuitas atas pelaksanaan suatu kebijakan keuangan memerlukan konsistensi dan respon cepat atas permasalahan yang terjadi sebagaimana pemaparan (Mohan, 2004; Sharma, 2012).

Pada dasarnya, kebijakan *financial inclusion* adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat pada *the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*),

transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi (Fritzer, 2004; Goyal, 2011; Hannig, 2010). Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek terkait kondisi dan profil ekonomi daerah di Indonesia. Terdapat enam pulau besar yang tersebar di Indonesia diantaranya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Papua dan Kepulauan Maluku. Pulau-pulau yang terdapat di Indonesia masing-masing memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda baik dari segi geografi maupun aktivitas kemasyarakatan penduduknya. Kondisi geografi menjadi salah satu kendala dalam memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat disamping terdapat beberapa faktor lain yang mendeterminasi. Berikut adalah perhitungan *financial inclusion* yang dilakukan di enam pulau besar di Indonesia (Jorgenson, 1995; Kar dan Pentecost, 2000; Khun, 2004).

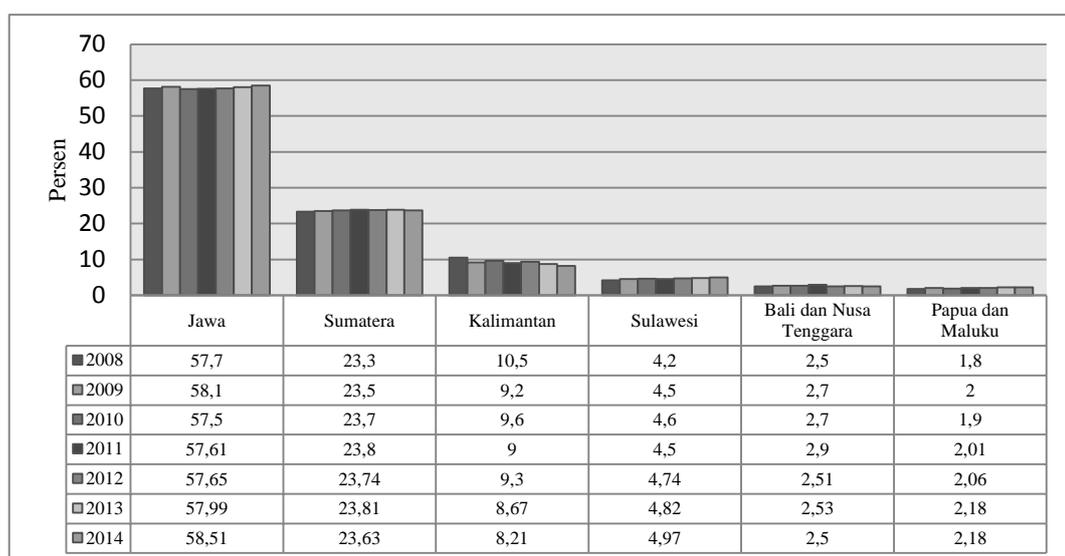
Tabel 4.3 Dimensi 1 Penetrasi Perbankan (Financial Inclusion) 2004-2013 di Indonesia

Dimensi 1 (Financial Inclusion)						
Tahun	Pulau					
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Kep. Maluku
2004	0,3	0,046	0,015	0,01	0,009	0,004
2005	0,35	0,055	0,018	0,011	0,011	0,005
2006	0,383	0,072	0,023	0,015	0,013	0,009
2007	0,452	0,182	0,028	0,018	0,014	0,01
2008	0,523	0,198	0,033	0,022	0,017	0,011
2009	0,597	0,101	0,035	0,025	0,02	0,012
2010	0,714	0,315	0,042	0,027	0,022	0,013
2011	0,844	0,537	0,054	0,034	0,027	0,018
2012	0,902	0,428	0,526	0,232	0,331	0,193
2013	0,967	0,631	0,697	0,427	0,381	0,219

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia. 2014, diolah.

Dimensi 1 dalam perhitungan multidimensial *financial inclusion* menggunakan aspek penetrasi perbankan. Pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki tingkat inklusi yang lebih tinggi dibandingkan pulau lainnya, perkembangan yang ditunjukkan tumbuh positif dari tahun ke tahun. Kondisi *financial inclusion* yang ditunjukkan pada Tabel 4.3 bahwa Sumatera memiliki

progress yang membaik dalam rentang waktu sepuluh tahun yang diikuti oleh Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan Papua dan Kepulauan Maluku. Penetrasi perbankan ditinjau dari kesediaan lembaga keuangan dalam kuantitas maupun jumlah akun tabungan yang dimiliki oleh masyarakat di setiap pulau mempresentasikan keadaan akses keuangan di pulau tersebut (Jaising, 2013; Sarma, 2010;2012). Masyarakat tidak akan melakukan transaksi ekonomi apabila lembaga keuangan tidak memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan sehingga masyarakat mampu melakukan kegiatan produksi yang menggerakkan roda perekonomian yang memberikan kontribusi dalam pendapatan nasional di Indonesia.



Gambar 4.6 Peran Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional di Indonesia 2008-2014.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014. Diolah.

Pada tabel 4.3 yang memaparkan penetrasi perbankan di setiap pulau di Indonesia, Pulau Jawa menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah penetrasi perbankan rentang sepuluh tahun. Hal tersebut mengakibatkan komposisi peran pulau dalam pembentukan nasional di Indonesia khususnya Pulau Jawa tertinggi dibandingkan dengan pulau lainnya yang berada di Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan di suatu pulau dapat mendorong adanya aktivitas produksi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya sebab keinginan masyarakat dalam bertransaksi meningkat dengan layanan yang tersedia (Barr, 2004; Buckland, *et*

al, 2005; Calderon dan Liu, 2003). Kondisi yang sama ditunjukkan pada tabel 4.3 dan gambar 4.6 dimana komposisi penetrasi perbankan diikuti oleh peran dalam pembentukan PDB memiliki kesamaan situasi. Sebangun dengan itu Papua dan Kepulauan Maluku termasuk dalam kategori pulau yang tertinggal dan perkembangan yang dimiliki tidak signifikan. Kondisi tersebut diperkuat dengan letak geografis di pulau tersebut yang masih sulit terjangkau dalam artian infrastruktur yang dimiliki kurang mendukung bagi aktivitas perekonomian.

Tabel 4.4 Dimensi 2 Ketersediaan Layanan Perbankan (Financial Inclusion) 2004-2013 di Indonesia

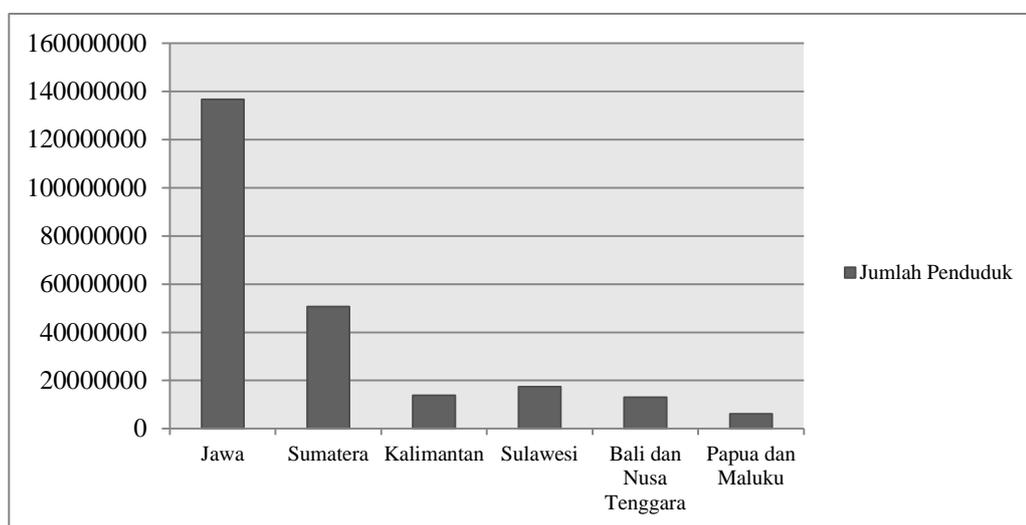
Dimensi 2 (Financial Inclusion)						
Pulau						
Tahun	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Kep. Maluku
2004	0,254	0,153	0,022	0,024	0,115	0,009
2005	0,253	0,155	0,022	0,023	0,215	0,008
2006	0,459	0,158	0,093	0,22	0,116	0,009
2007	0,464	0,26	0,124	0,023	0,216	0,01
2008	0,569	0,264	0,126	0,025	0,316	0,01
2009	0,679	0,267	0,229	0,027	0,317	0,011
2010	0,69	0,372	0,23	0,028	0,417	0,013
2011	0,894	0,279	0,333	0,03	0,419	0,015
2012	0,902	0,382	0,433	0,031	0,52	0,014
2013	0,909	0,487	0,335	0,033	0,551	0,015

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia. 2014, diolah.

Pada Tabel 4.4 merupakan hasil perhitungan *financial inclusion* pada dimensi 2 yaitu ketersediaan layanan perbankan. Dimensi 2 ini adalah gambaran atas adanya layanan perbankan di setiap pulau di Indonesia. Terlihat pada Tabel 4.4 bahwa ketersediaan layanan perbankan mengalami fluktuasi. Pulau Jawa sebagai pulau yang memiliki ketersediaan layanan perbankan tertinggi di Indonesia yang di tahun 2013 dengan indeks 0,909 hampir mendekati hitungan sempurna *high financial inclusion* yaitu 1. Lain halnya pada pulau Sumatera, selama rentang waktu sepuluh tahun dimensi ketersediaan layanan keuangan hanya berada pada kondisi *low* (rendah) dan *middle* (menengah) sebagai pulau yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua (Lihat Gambar 4.7) setelah

pulau Jawa menginterpretasikan bahwa kurangnya ekspansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengadaan layanan perbankan.

Angka dimensi 2 yang dimiliki oleh Sumatera berbeda signifikan dengan yang dimiliki oleh Jawa. Sebangun dengan hal itu kondisi pulau Kalimantan juga tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan membaik setiap tahun, tercatat rata-rata bergerak pada angka hingga 0,3 yang terkategori *low financial inclusion* (Inklusi keuangan rendah). Keadaan yang tidak jauh beda dengan kondisi dimensi 1 sebelumnya (Tabel 4.3) yaitu pulau Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan Papua dan Kepulauan Maluku, ketiga pulau ini pada dimensi ke 1 dan ke 2 berada pada kategori rendah meskipun Bali dan Nusa Tenggara dapat mencapai kategori *middle* (menengah) pada tahun 2010 hingga 2013. Bali dan Nusa Tenggara sebagai pulau destinasi wisata menjadi determinasi perkembangan ketersediaan layanan perbankan sebab banyaknya orang yang berkunjung sehingga roda perekonomian bergerak melaju dengan meningkatnya produktivitas masyarakat yang diwujudkan dalam usaha kecil menengah (UKM) pada bidang industri kreatif dan makanan di Bali dan Nusa Tenggara.



Gambar 4.7 Jumlah Penduduk Per Pulau di Indonesia 2014.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014. Diolah.

Jumlah penduduk berdasarkan Gambar 4.7 menggambarkan bahwa Jawa sebagai pulau yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang diikuti oleh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan Papua dan

Kepulauan Maluku. (Christopoulos dan Tsionas, 2004) menyatakan bahwa jumlah penduduk menderteminasi akses layanan keuangan masyarakat kepada perbankan selain juga karena alasan geografis yang membuat masyarakat susah mengakses layanan keuangan sebab sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Tercatat bahwa Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pulau yang berada di wilayah paling timur Indonesia belum memiliki keadaan infrastruktur yang baik dan juga jumlah penduduk yang bertempat tinggal lebih sedikit dibandingkan di Jawa karena rendahnya akses dalam bertransaksi.

Berikut adalah penjelasan pada dimensi berikutnya yaitu dimensi ke 3 dari *financial inclusion* (inklusi keuangan) berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara spasial pada enam pulau besar di Indonesia selama sepuluh tahun yaitu 2004 hingga 2013.

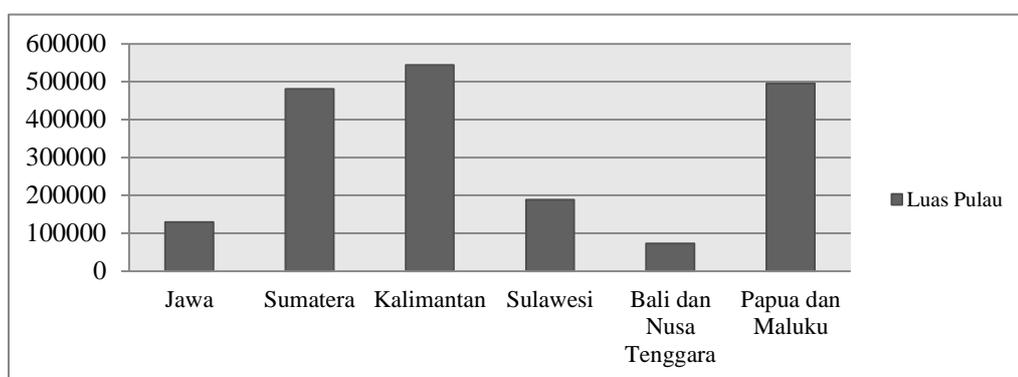
Tabel 4.5 Dimensi 3 Penggunaan (Financial Inclusion) 2004-2013 di Indonesia

Dimensi 3 (Financial Inclusion)						
Pulau						
Tahun	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Kep. Maluku
2004	0,444	0,392	0,112	0,12	0,081	0,019
2005	0,588	0,471	0,14	0,154	0,099	0,025
2006	0,628	0,568	0,163	0,186	0,115	0,033
2007	0,632	0,427	0,204	0,236	0,14	0,046
2008	0,67	0,444	0,266	0,312	0,181	0,064
2009	0,778	0,428	0,275	0,308	0,18	0,067
2010	0,713	0,573	0,36	0,398	0,228	0,091
2011	0,885	0,579	0,419	0,435	0,239	0,108
2012	0,948	0,432	0,52	0,324	0,304	0,134
2013	0,922	0,526	0,424	0,413	0,371	0,166

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia. 2014, diolah.

Kondisi *financial inclusion* (inklusi keuangan) pada Tabel 4.5 berdasarkan indikator penggunaan selama tahun 2004 hingga 2013 menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda pada perhitungan dimensi 1 dan dimensi 2 sebelumnya bahwa pulau Jawa berada pada kategori *high* (tinggi) dibandingkan pulau lainnya. Maka pulau Jawa juga sebagai pulau tertinggi pada kategori peran pulau terbesar dalam membentuk PDB Nasional di Indonesia. Laju penggunaan layanan perbankan

yang disetiap tahunnya selama sepuluh tahun bergerak positif hingga menyentuh 0,922 di tahun 2013. Hal berbeda ditunjukkan pada kondisi pulau Papua dan Kepulauan Maluku yang berada dikategori *low* (rendah) selama sepuluh tahun, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia tidak berjalan secara merata dan masih terjadi aglomerasi yang menyebabkan ketimpangan dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan luas pulau yang ada di Indonesia, Kalimantan merupakan pulau terluas (lihat Gambar 4.8) yang ada namun di setiap dimensi dalam perhitungan *financial inclusion* (inklusi keuangan) berada pada kategori *low* (rendah)

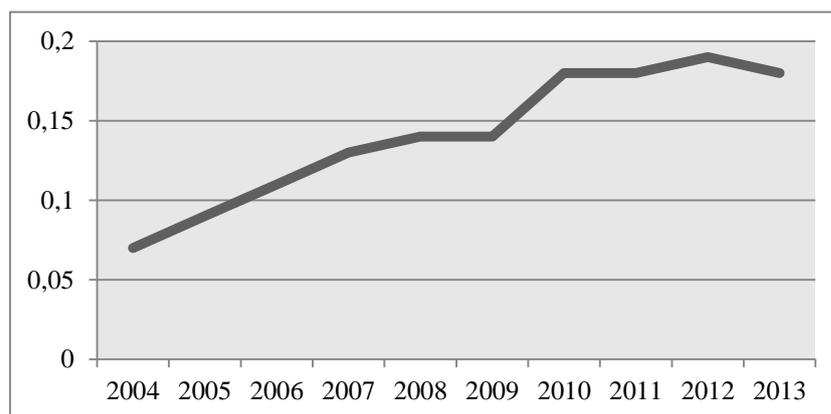


Gambar 4.8 Luas Pulau di Indonesia. Sumber: Badan Pusat Statistik. 2014

Pada Gambar 4.8 menunjukkan kondisi luas pulau yang ada di Indonesia, hal ini merupakan cerminan atas sebuah perhitungan *financial inclusion* (inklusi keuangan) menggambarkan bahwa terjadi pembangunan yang membentuk sebuah aglomerasi yang menahun yang terjadi di Indonesia. Kondisi infrastruktur yang kurang baik di beberapa pulau menyebabkan investor kurang berminat dalam melakukan investasi di pulau tersebut (Carbo, *et al*, 2005; Chami dan Sarma, 2009; Cheng dan Degryse, 2006). Pengadaan layanan perbankan berupa jumlah lembaga keuangan formal masih belum menunjukkan perkembangan secara signifikan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia. Luasnya pulau menjadi bagian dalam determinasi rendahnya akses keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

Selain melihat kondisi inklusi keuangan melalui pergerakan *index of financial inclusion* di Indonesia. Besaran ukuran pendalaman keuangan (*financial*

deepening) menjadi indikator kekuatan sistem kelembagaan keuangan terutama di Indonesia yang terjadi pada tahun 2004 hingga tahun 2013. Hal ini dikarenakan pendalaman keuangan (*financial deepening*) memiliki keterkaitan dengan inklusi keuangan (*financial inclusion*) sebagai indikator intermediasi keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Adapun ukuran pendalaman keuangan (*financial deepening*) dapat dilihat pada gambar 4.9:



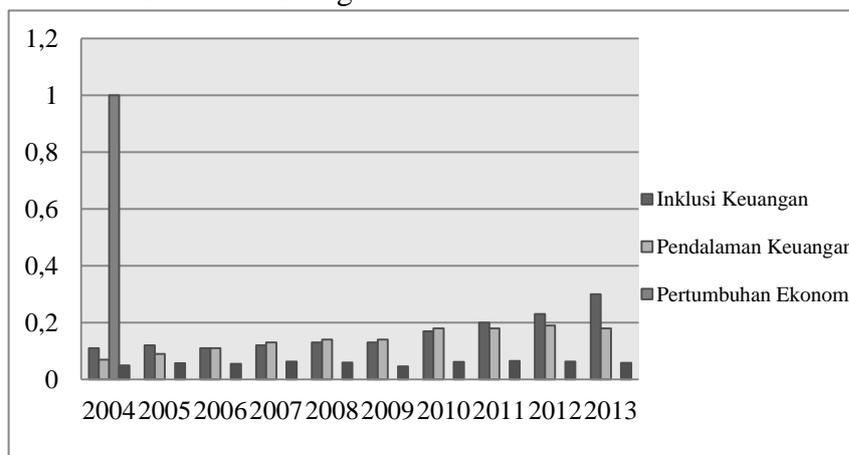
Gambar 4.9 Index of Financial Deepening 2004-2013 di Indonesia
Sumber: World Bank dan IFC, 2014, diolah.

Berdasarkan gambar 4.9 merupakan *index of financial deepening* pada tahun 2004-2013 di Indonesia. Secara umum ukuran pendalaman keuangan dikategorikan rendah (*low*) berada pada kisaran 0,07-0,18 sepanjang periode penelitian. Performa pendalaman keuangan tidak cukup baik di Indonesia. Dalam hal ini ukuran pendalaman tetap bergerak meskipun melambat yang tidak menunjukkan pergerakan kenaikan pendalaman secara signifikan. Kondisi perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pergerakan arus dana internasional (Siringoringo, 2012). Kinerja perbankan di Indonesia dipengaruhi oleh derasnya aliran masuk modal dari luar negeri mengingat akses likuiditas perbankan ditengah kinerjanya mengalami perbaikan. Meskipun demikian ukuran pendalaman keuangan selama rentan 2004 hingga 2013 masih berada pada ukuran rendah (*low*), hal ini salah satunya dideterminasi oleh kondisi perbankan dalam negeri.

Sejalan dengan itu, keadaan krisis yang sempat menghantam Indonesia pada tahun 2008 menunjukkan ukuran pendalaman keuangan tidak berubah yaitu 0,14

di tahun 2008 dan 2009. Hal serupa juga terjadi pada kondisi inklusi keuangan (*financial inclusion*) saat krisis melanda ukurannya tetap tidak berubah maupun menurun akibat *shock* yang muncul dalam sistem perekonomian. Kategori pendalaman keuangan yang rendah (*low*) bertahan hingga sepuluh tahun di Indonesia dengan struktur modal hingga kinerja perbankan di Indonesia dan sarana dan prasarana yang mendukung penguatan kegiatan keuangan masih dalam tahap pembangunan.

Berdasarkan fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dalam hal ini performa perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari jumlah dana yang dikeluarkan terhadap sektor riil (Koch dan MacDonald, 2003:41; Siringoringo, 2012). Dikaitkan terhadap kondisi inklusi dan pendalaman keuangan di Indonesia dengan kategori yang rendah (*low*) dan menengah (*middle*) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 4.10 Inklusi dan pendalaman terhadap pertumbuhan ekonomi 2004-2013. Sumber: Berbagai sumber, 2014, diolah.

Berdasarkan gambar 4.10 menunjukkan perkembangan inklusi dan pendalaman keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gambar 4.10 menggambarkan kondisi indikator keuangan dan pertumbuhan ekonomi dimana mulai pada tahun 2004 hingga tahun 2007 cenderung bergerak lambat sejajar diantara ketiganya. Hal lain terjadi sesaat pada tahun 2008 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi diakibatkan adanya krisis keuangan yang dimulai pada tahun 2008 yang melanda perekonomian Indonesia. Sejalan dengan itu,

keuangan sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai apabila sektor keuangan mengalami kedalaman (Okuda, 1990:270). Guna meningkatkan peran sektor keuangan agar mencapai kondisi tersebut dibutuhkan upaya strategis yang meliputi suatu rencana dan implementasi dari kebijakan untuk mengintensifkan tingkat moneterisasi perekonomian melalui peningkatan akses terhadap institusi finansial (Agrawal, 2001:83).

4.2.2 Sintesa *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory*

Analisis dalam penelitian ini merupakan aplikasi metode AHP dan *Game Theory*. Pendekatan *Game Theory* digunakan dalam merumuskan dan memodelkan kondisi konflik atau interaksi yang terjadi antara *financial inclusion* dan *financial deepening* di Indonesia. Metode AHP digunakan untuk pengambilan keputusan dalam interaksi kebijakan, dimana data utamanya adalah persepsi manusia yang dianggap ahli (*expert*) (Saaty, 1980; Saaty dan Vargas, 2006). Hirarki AHP dikemas dalam kuesioner untuk ditanggapi responden dalam bentuk data kuantitatif untuk dikuantifikasi. Data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap responden yang terlibat langsung maupun tidak langsung dan atau ahli (*expert*) dalam bidang *financial inclusion* dan *financial deepening* di Indonesia. Hasil rekapitulasi dalam analisis studi interaksi *financial inclusion* dan *financial deepening* di Indonesia dengan mengaplikasikan metode AHP dan *Game Theory* secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut.

Financial deepening dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu mencapai penguatan industri perbankan. Dengan menggunakan instrumen DFA, DLA, FFA, FLA yang merupakan strategi yang digunakan dalam interaksi kebijakan, maka diperoleh strategi yang paling efektif. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 4.6 prioritas strategi berikut.

Tabel 4.6 Prioritas Strategi *Financial Deepening* Sehubungan dengan Tujuan

	DFA	DLA	FFA	FLA	Bobot
DFA	1	6,724	2,890	1,675	0,509
DLA	0,149	1	3,542	2,097	0,218
FFA	0,346	0,282	1	1,239	0,126
FLA	0,597	0,477	0,807	1	0,147
CI = 0,5937				CI = 0,66	

Sumber: Lampiran B

Tabel 4.6 menunjukkan vektor prioritas strategi *financial deepening* sehubungan dengan tujuannya, vektor prioritas atau bobot yang dihasilkan sebesar 0,509; 0,218; 0,126; 0,147 digunakan untuk mengetahui posisi relatif masing-masing strategi, diperoleh setelah menormalisasi vektor tersebut. Dalam teori matriks vektor ini disebut *eigenvector*. Adapun proses normalisasi *eigenvector* dapat ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 4.7 Proses Normalisasi

<i>Eigenvector</i>	Normalisasi	Bobot
$(1 \times 6,724 \times 2,890 \times 1,675)^{1/4} = 2,389$	2,389/4,697	0,509
$(0,149 \times 1 \times 3,542 \times 2,097)^{1/4} = 1,026$	1,026/4,697	0,218
$(0,346 \times 0,282 \times 1 \times 1,239)^{1/4} = 0,590$	0,590/4,697	0,126
$(0,597 \times 0,477 \times 0,807 \times 1)^{1/4} = 0,692$	0,692/4,697	0,147
$\Sigma = 4,697$		

Sumber: Lampiran B, diolah.

Sehubungan dengan *eigenvalue*, dalam teori matriks bahwa jika A adalah matriks bujur sangkar dan n adalah angka yang memenuhi persamaan $Aw=nw$, untuk vektor kolom $w \neq 0$ (*non-trivial solution*), maka dikatakan bahwa n adalah *eigenvalue* dari matriks A, dan w yang memenuhi persamaan $Aw=nw$ disebut *eigenvector* yang berhubungan dengan n (Klein, 1973;280). Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut.

	A					W		Aw
	1	6,724	2,890	1,675	X	0,4950	=	2,862
	0,149	1	3,542	2,097		0,2734		1,000
	0,346	0,282	1	1,239		0,1155		0,508
	0,597	0,477	0,807	1		0,1161		0,635

Sehingga,

Aw/w		Λ	
2,862/0,4950	=	5,781	λ_{\max} diperoleh sebesar 5,781
1,000/0,2734		3,656	
0,508/0,1155		4,396	
0,635/0,1161		5,473	

Pengukuran konsistensi matriks didasarkan pada *eigenvalue* maksimum (λ_{\max}) yakni sebesar 5,781 dengan matriks berukuran $n=4$ nilai indeks random (RI) sebesar 0,90. Sehingga *Consistency index* (CI) dan *consistency ratio* (CR) yang dihasilkan menunjukkan bahwa matriks *pairwise comparison* pada tabel 4.8 memenuhi syarat konsistensi yaitu masing-masing sebesar 0,5937 dan 0,66.

Dalam interaksi *financial inclusion* dan *financial deepening*, setiap strategi kebijakan *financial deepening* dihadapkan dengan strategi kebijakan *financial inclusion*. Sehingga pada setiap langkah *financial inclusion*, terdapat strategi kebijakan *financial deepening* yang paling efektif untuk merespon langkah tersebut. Reaksi kebijakan *financial deepening* tersebut dapat ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Prioritas Strategi *Financial Deepening* Sehubungan dengan Strategi *Financial Inclusion*

		Strategi <i>Financial Inclusion</i>			
		BPE	ABS	UCD	UCH
Bobot Strategi <i>Financial Deepening</i>	DFA	0,587	0,456	0,667	0,764
	DLA	0,935	0,624	0,532	0,342
	FFA	0,335	0,543	0,135	0,197
	FLA	0,298	0,371	0,237	0,423
		CI = 0,089	CI = 0,095	CI = 0,046	CI = 0,072

Sumber: Lampiran C,D, E,dan F

Tabel 4.8 menunjukkan prioritas strategi *financial deepening* sehubungan dengan strategi *financial inclusion*. Pengertian vektor prioritas dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Kolom strategi *Banking Penetration* (BPE) menunjukkan bahwa strategi *financial deepening Domestic Financial Asset* (DLA) sebesar 0,935 adalah paling efektif digunakan untuk merespon aksi strategi *financial inclusion Banking Penetration* (BPE).

- b. Kolom strategi *Availibility of Banking Services* (ABS) menunjukkan bahwa strategi *financial deepening domestic financial asset* (DLA) sebesar 0,624 adalah paling tepat untuk menanggapi aksi strategi *financial inclusion Availibility of Banking Services* (ABS).
- c. Kolom strategi *Usage* (UCD) menunjukkan bahwa strategi *financial deepening Domestic Financial Asset* (DFA) sebesar 0,667 paling tepat untuk dipilih dalam mengambil aksi strategi *financial inclusion Usage* (UCD).
- d. Kolom strategi *Usage to Households* (UCH) menunjukkan bahwa strategi *financial deepening Domestic Financial Asset* (DFA) sebesar 0,764 dipilih untuk merespon langkah yang ditempuh strategi *financial inclusion Usage to Households* (UCH).

Prosedur perhitungan *pay-off financial deepening* (Saaty-Vargas, 1991;148) adalah (1) anggaplah bobot atau vektor prioritas strategi sehubungan dengan tujuan *financial deepening* (Tabel 4.8) sebagai *constant value*; (2) anggaplah bobot strategi *financial deepening* sehubungan dengan strategi *financial inclusion* (Tabel 4.10) adalah *current value*; kemudian (3) dikalikan *constant value* (Tabel 4.8) dengan masing-masing *current value* (Tabel 4.10). Maka hasilnya merupakan *pay-off financial deepening* yang ditunjukkan dalam Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9 *Pay-off Financial Deepening*

	BPE	ABS	UCD	UCH
DFA	0,299	0,232	0,340	0,389
DLA	0,204	0,136	0,116	0,075
FFA	0,042	0,068	0,017	0,025
FLA	0,044	0,055	0,035	0,062

Tabel 4.9 menunjukkan *pay-off* yang diperoleh *financial deepening*. Sehingga jika *financial inclusion* menerapkan strategi *Banking Penetration* (BPE) dan *usage* (UCH) maka *financial deepening* meresponnya dengan menggunakan *Domestic Financial Asset* (DFA) dan jika *financial inclusion* menerapkan strategi *Availibility of Banking Services* (ABS) dan *Usage* (UCD) maka *financial*

deepening meresponnya dengan menggunakan strategi *Domestic Financial Asset* (DFA).

Bagi strategi *financial inclusion* dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu kemudahan layanan perbankan. Dengan menggunakan instrumen kebijakan *banking penetration* (BPE), *availability of banking services* (ABS), *usage* (UCD), *usage to households* (UCH) yang merupakan strategi yang digunakan dalam interaksi kebijakan, maka diperoleh strategi yang paling efektif. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 4.10 prioritas strategi berikut.

Tabel 4.10 Prioritas Strategi

	BPE	ABS	UCD	UCH	Bobot
BPE	1	8,83	4,78	2,857	0,577
ABS	0,166	1	3,76	2,091	0,261
UCD	0,174	0,21	1	2,637	0,112
UCH	0,256	0,14	0,2	1	0,057
CI = 0,636				CR = 0,71	

Sumber: Lampiran G.

Tabel 4.10 menunjukkan vektor prioritas strategi sehubungan dengan tujuan *financial inclusion*, vektor prioritas yang dihasilkan masing-masing sebesar 0,577; 0,261; 0,112; 0,057, diperoleh setelah menormalisasi vektor tersebut. Adapun proses normalisasi *eigenvector* dapat ditunjukkan dalam Tabel 4.11 sebagai berikut.

Tabel 4.11 Proses Normalisasi

<i>Eigenvector</i>	Normalisasi	Bobot
$(1 \times 6 \times 5,763 \times 3,901)^{1/4} = 3,408$	3,408/5,902	0,577
$(0,166 \times 1 \times 4,870 \times 7)^{1/4} = 1,542$	1,542/5,902	0,261
$(0,174 \times 0,205 \times 1 \times 5)^{1/4} = 0,659$	0,659/5,902	0,112
$(0,256 \times 0,143 \times 0,2 \times 1)^{1/4} = 0,293$	0,293/5,902	0,057
$\Sigma = 5,902$		

Sumber: Lampiran G, diolah.

Selanjutnya untuk mencari nilai Aw dan *eigenvector* maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \mathbf{A} & & \\ \hline 1 & 8,83 & 4,78 & 2,857 \\ \hline 0,166 & 1 & 3,76 & 2,091 \\ \hline 0,174 & 0,21 & 1 & 2,637 \\ \hline 0,256 & 0,14 & 0,2 & 1 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{w} \\ \hline 0,580 \\ \hline 0,233 \\ \hline 0,133 \\ \hline 0,053 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{Aw} \\ \hline 3,428 \\ \hline 0,942 \\ \hline 0,422 \\ \hline 0,262 \\ \hline \end{array}$$

Sehingga,

$$\begin{array}{|c|} \hline \mathbf{Aw/w} \\ \hline 3,428/0,580 \\ \hline 0,942/0,233 \\ \hline 0,422/0,133 \\ \hline 0,262/0,053 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \lambda \\ \hline 5,908 \\ \hline 4,042 \\ \hline 3,165 \\ \hline 4,926 \\ \hline \end{array} \quad \lambda_{\max} \text{ diperoleh sebesar } 5,908$$

Pengukuran konsistensi matriks didasarkan pada *eigenvalue* maksimum (λ_{\max}) yakni sebesar 5,908, dengan matriks berukuran $n = 4$ nilai indeks random (RI) sebesar 0,90. Sehingga *consistency index* (CI) dan *consistency ratio* (CR) yang dihasilkan menunjukkan bahwa matriks *pairwise comparison* pada Tabel 4.10 memenuhi syarat konsistensi yaitu masing-masing sebesar 0,636 dan 0,71.

Setiap strategi *financial inclusion* dihadapkan dengan strategi *financial deepening*. Sehingga pada setiap langkah *financial deepening*, terdapat strategi *financial inclusion* yang paling efektif untuk merespon langkah tersebut. Reaksi *financial inclusion* tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12 Prioritas Strategi *Financial Inclusion* Sehubungan dengan Strategi *Financial Deepening*

		Strategi <i>Financial Deepening</i>			
		DFA	DLA	FFA	FLA
Bobot Strategi <i>Financial Inclusion</i>	BPE	0,689	0,532	0,450	0,059
	ABS	0,476	0,631	0,359	0,291
	UCD	0,390	0,790	0,519	0,520
	UCH	0,246	0,325	0,502	0,381
		CI = 0,069	CI = 0,071	CI = 0,047	CI = 0,501

Sumber: Lampiran H,I,J, dan K.

Tabel 4.12 menunjukkan prioritas strategi *financial inclusion* sehubungan dengan strategi *financial deepening*. Pengertian vektor prioritas dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Kolom strategi DFA menunjukkan bahwa strategi *financial inclusion* BPE sebesar 0,689 adalah paling efektif digunakan untuk merespon aksi strategi *financial deepening* DFA
- b. Kolom strategi DLA menunjukkan bahwa strategi *financial inclusion* UCD sebesar 0,790 adalah tepat untuk merespon aksi strategi *financial inclusion* DLA.
- c. Kolom strategi FFA menunjukkan bahwa strategi *financial inclusion* UCD sebesar 0,519 adalah efektif dalam untuk merespon aksi strategi *financial inclusion* FFA.
- d. Kolom strategi FLA menunjukkan bahwa strategi *financial inclusion* UCD sebesar 0,520 adalah tepat dalam merespon aksi strategi *financial inclusion* FLA.

Seperti halnya pada *financial deepening*, prosedur perhitungan *pay-off financial inclusion* (Saaty-Vargas, 1991;148) adalah (1) anggaplah bobot atau vektor prioritas strategi sehubungan dengan tujuan *financial inclusion* (Tabel 4.8) sebagai *constant value*; (2) anggaplah bobot strategi *financial inclusion* sehubungan dengan strategi *financial deepening* (Tabel 4.12) adalah *current value*; kemudian (3) kalikan *constant value* (Tabel 4.18) dengan masing-masing *current value* (Tabel 4.14). Maka hasilnya merupakan *pay-off financial inclusion* yang ditunjukkan dalam Tabel 4.13 sebagai berikut.

Tabel 4.13 *Pay-off Financial Inclusion*

	DFA	DLA	FFA	FLA
BPE	0,398	0,307	0,260	0,034
ABS	0,124	0,165	0,094	0,076
UCD	0,044	0,088	0,058	0,058
UCH	0,014	0,019	0,029	0,022

Sumber: Tabel 4.12 dan 4.14

Tabel 4.13 menunjukkan secara jelas dapat dilihat bahwa apapun strategi kebijakan yang digunakan oleh *financial deepening* maka *financial inclusion*

menjawabnya dengan *banking penetration* (BPE) dan *avalibility of banking service* (ABS).

4.3 Pembahasan *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening*

Pendekatan metode AHP dan *Game Theory*, interaksi *financial deepening* dan *financial inclusion* ditunjukkan dalam tindakan aksi-reaksi dari masing-masing *player* dengan menggunakan strategi-strategi yang dipilih dalam mencapai tujuannya yakni mencapai industri perbankan yang kuat. Maka tindakan demikian akan direspon dengan menggunakan strategi-strategi yang dipilih. Sebaliknya, apabila *financial inclusion* menggunakan strategi-strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan yaitu kemudahan layanan keuangan, maka tindakan tersebut akan direspon dengan menggunakan strategi-strategi yang dianggap paling efektif.

4.3.1 Dinamika *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening* di Indonesia

Berikut adalah peta dari gambaran keadaan *financial inclusion* (inklusi keuangan) di Indonesia selama sepuluh tahun di 2004 hingga 2013. Terdiri dari enam pulau besar yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan Papua dan Kepulauan Maluku.



Gambar 4.11 Peta *Financial Inclusion* di Indonesia

Pada gambar 4.11 merupakan peta *financial inclusion* yang terbagi dalam beberapa kategori hasil perhitungan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti. Secara keseluruhan kondisi inklusi terkategori *low* (rendah), dan hanya terdapat dua yang masuk kategori *high* (tinggi) dan *meddium* (menengah) yaitu Jawa dan Sumatera. Kondisi inklusi yang berbeda menyiratkan kesenjangan pembangunan di Indonesia. Pemerataan dalam hal distribusi, produksi, dan konsumsi dibangun secara massif untuk mendukung masyarakat berproduksi.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya adalah menunjukkan hal yang sama yaitu *financial inclusion* (inklusi keuangan) di Indonesia terkategori rendah.

Tabel 4.14 Perhitungan Tentatif *Financial Inclusion* di Indonesia. Sumber: Berbagai Sumber, 2014. Diolah.

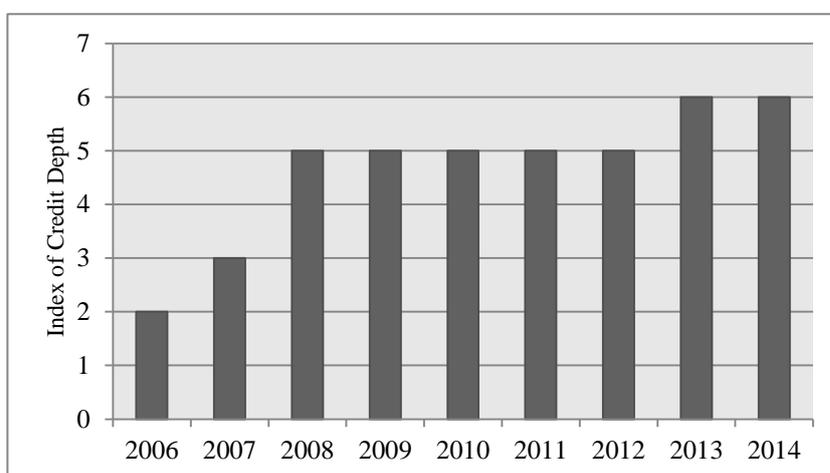
Financial Inclusion di Indonesia		
Sharma Index	Kunt and Klapper Index	Chrakavarthy Index
<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>

Perhitungan Sharma, Kunt dan Klapper, dan Chrakavarthy menggambarkan kurangnya ekspansi yang dilakukan dalam rangka kebijakan inklusi keuangan. Kurangnya akses keuangan memengaruhi kemampuan masyarakat miskin untuk menabung dan berinvestasi sehingga terdapat hambatan dalam berproduksi. Risiko masyarakat miskin terhadap krisis atau guncangan ekonomi tidak berpengaruh signifikan sehingga aktivitas yang dilakukan akan tetap berjalan. Hal lain adalah guncangan dapat menjadi sebuah bencana sebab bank tidak memiliki sirkulasi yang lancar sebagai lembaga keuangan untuk menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Soto, 2000; Beck, Kunt, dan Peria 2006).

Lembaga keuangan sebagai wadah dalam mengakomodir suatu dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui berbagai cara sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara rata-rata bahwa penyaluran dana yang diberikan berupa pinjaman kepada masyarakat untuk digunakan produksi usaha tertentu

oleh masyarakat. Sebab dengan adanya produksi yang dilakukan maka produktivitas masyarakat meningkat dan membutuhkan tenaga kerja yang akan menyerap pengangguran di Indonesia.

Perkembangan produk perbankan menunjukkan peningkatan seiring dengan terjadinya liberalisasi. Berbagai macam derivatif produk-produk perbankan digunakan meraih pangsa pasar yang sebesar-besarnya (Koch dan MacDonald, 2003:20). Perbankan melakukan dinamisasi dalam aktivitas perekonomian dimana kebutuhan dana oleh masyarakat disalurkan melalui kredit. Berikut adalah indeks kedalaman kredit (*Index of Credit Depth*) di Indonesia pada gambar 4.12 berikut:



Gambar 4.12 *Index of Credit Depth* di Indonesia 2006-2014. Sumber: World Bank, 2014.

Berdasarkan 4.12 yang merupakan indeks kedalaman kredit (*Index of Credit Depth*) indikator yang digunakan yaitu 0 adalah terendah dan angka 8 adalah nilai kedalaman yang tinggi. Paparan yang disajikan di dalam gambar 4.12 menunjukkan awal tahun dimulai 2006 hingga 2008 menunjukkan peningkatan dari angka 2 hingga menuju angka 5. Namun hal yang sama terjadi selama lima tahun berturut-turut yaitu tahun 2008 hingga tahun 2012. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa kedalaman kredit tersebut tetap tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, namun kondisi ini tidak menunjukkan perkembangan penyaluran kredit. Hingga di tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan yaitu berada pada angka 6 dengan skala tertinggi pada indeks kedalaman kredit 8.

Kedalaman kredit di Indonesia menggambarkan seberapa besar kontinuitas penyaluran kredit kepada masyarakat. Meskipun mengalami kenaikan selama rentang 2006 hingga 2014, kedalaman kredit Indonesia cukup baik dengan skala tertinggi 8. Skala 8 merupakan skala tertinggi dari indeks kedalaman kredit yang biasanya dimiliki oleh negara-negara yang maju. Dewasa ini, orientasi terhadap pemberian kredit khususnya di negara sedang berkembang menjadi primadona yang tidak berhenti (Chen dan Sangraula, 2010). Masyarakat membutuhkan dana sebagai modal dalam proses produksi yang dilakukan dalam aktivitas ekonomi. Penawaran dan permintaan didalam suatu aktivitas keuangan melibatkan institusi dan masyarakat sebagai pelaku langsung dalam perekonomian (Cole dan Zia, 2011; Hernando, 2000).

Institusi sebagai penyedia jasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. Institusi keuangan di Indonesia dalam hal ini lembaga keuangan formal yaitu bank menguasai terbesar aset diseluruh sektor industri yang ada. Perannya cukup penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara. Upaya perbankan dalam menjangkau masyarakat agar terakses layanan jasa keuangan relatif sulit mengingat letak geografis Indonesia yang cukup luas dan jumlah perbankan yang ada jumlahnya lebih sedikit yaitu 120 bank dibandingkan jumlah tertinggi sebelumnya pada tahun 1996 mencapai 239 bank.

Kuantitas bank tidak memengaruhi adanya jangkauan masyarakat yang lebih mudah terhadap lembaga jasa keuangan (Klapper dan Love, 2011). Terbukti bahwa kinerja perbankan setiap tahun dengan jumlahnya yang relatif banyak tidak diiringi dengan semakin membaiknya kinerja sehingga pemerintah melakukan *merger* bank pada tahun 2004 untuk mengefisiensikan kinerja perbankan kedepan. Perluasan akses dan kinerja perbankan menjadi perdebatan yang cukup menarik pada suatu sistem kelembagaan keuangan terutama di Indonesia dengan jumlah populasi masyarakatnya yang cukup tinggi dan kuantitas bank yang ada saat ini.

Perluasan akses yang ditandai dengan fenomena *financial inclusion* saat ini merupakan upaya pemerintah dalam hal mengatasi tingkat literasi keuangan yang rendah di Indonesia. Langkah mengetahui tingkat inklusi yang ada di Indonesia dilakukan dengan indeksisasi dengan perhitungan berdasarkan indikator *financial*

inclusion. Tingkat *financial inclusion* yang tinggi di beberapa negara maju membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan di negara tersebut cukup baik (Sharma, 2010,2012).

Akses keuangan yang baik ditandai dengan semakin besarnya jumlah masyarakat yang terakses oleh layanan keuangan dengan asumsi bahwa apapun jenis produk keuangan yang digunakan oleh masyarakat dianggap tidak berpengaruh terhadap perhitungan inklusi keuangan. Kinerja perbankan di Indonesia mengalami peningkatan meskipun tingkatan tersebut mengalami perlambatan, yang artinya bahwa kinerja perbankan mengalami pertumbuhan positif yang tidak signifikan setiap tahunnya (Nasution, 2001). Fenomena tersebut terangkum dalam pendalaman keuangan (*Financial deepening*). Berikut adalah perhitungan indeks *financial inclusion* dan *financial deepening* di Indonesia dalam tabel 4.15 selama tahun 2004 hingga 2013:

Tabel 4.15 Hasil Perhitungan IFD (Index of Financial Deepening) dan IFI (Index of Financial Inclusion) di Indonesia

Tahun	IFD	IFI	Keterangan
2004	0,07	0,11	Low
2005	0,09	0,12	Low
2006	0,11	0,11	Low
2007	0,13	0,12	Low
2008	0,14	0,13	Low
2009	0,14	0,13	Low
2010	0,18	0,17	Low
2011	0,18	0,2	Low
2012	0,19	0,23	Low
2013	0,18	0,3	Low-Medium

Sumber: Peneliti. 2014. diolah.

Paparan dalam tabel 4.15 merupakan detail hasil perhitungan dengan cara indeksisasi yang dilakukan dengan indikator yang termuat di masing-masing kategori. Terlihat bahwa secara keseluruhan kondisi inklusi dan pendalaman keuangan masuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah maupun instansi yang terlibat terlihat kurang dengan tingkat kontinuitas yang rendah dalam pelaksanaan program-program yang mendukung. Pemerintah dan jajarannya telah menerbitkan *policy* untuk *financial inclusion* dan *financial deepening* di Indonesia.

Seluruh elemen terlibat didalam program tersebut sehingga konsolidasi diperlukan dalam harmonisasi pelaksanaan program-program yang mendukung kedua fenomena tersebut. Perhatian khusus yang diberikan oleh suatu negara kepada lembaga keuangan akan menguatkan tatanan sistem kelembagaan keuangan yang dalam jangka panjang akan menjadi penopang pembiayaan pembangunan negara khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang (Djankov, McLiesh, dan Shleifer, 2007; Sacks, Stevenson, dan Wolfers, 2010). Sebab negara tersebut membutuhkan banyak sumber dana dalam pembangunan infrastruktur dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.3.2 Harmonisasi Sintesa AHP dan *Game Theory*

Nilai *pay-off* yang dihasilkan menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing *player*. Dalam interaksi *financial deepening* dan *financial inclusion*, masing-masing matriks *pay-off* yang dihasilkan. Sehingga jika *pay-off financial deepening* dibariskan, dan *pay-off financial inclusion* dikolomkan kemudian ditempatkan dalam satu matriks, maka diperoleh matriks *pay-off* interaksi antara *financial deepening* dan *financial inclusion*. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16 Matriks *pay-off* Interaksi *Financial Deepening* dan *Financial Inclusion*

<i>Pay-off FI</i>		<i>Financial Inclusion</i>			
		BPE	ABS	UCD	UCH
<i>Financial Deepening</i>	DFA	0,398	0,124	0,044	0,014
		0,299	0,232	0,340	0,389
	DLA	0,307	0,165	0,088	0,019
		0,204	0,136	0,116	0,075
	FFA	0,260	0,094	0,058	0,029
		0,042	0,068	0,017	0,025
	FLA	0,034	0,076	0,058	0,022
		0,044	0,055	0,035	0,062

Tabel 4.16 menunjukkan *pay-off* interaksi yang terjadi antara *financial deepening* dan *financial inclusion* di Indonesia. Dengan menggunakan strategi masing-masing yang digunakan salah satu *player* akan ditanggapi oleh *player* lain, tindakan tersebut tercermin dalam nilai *pay-off* yang dihasilkan. Matriks *pay-*

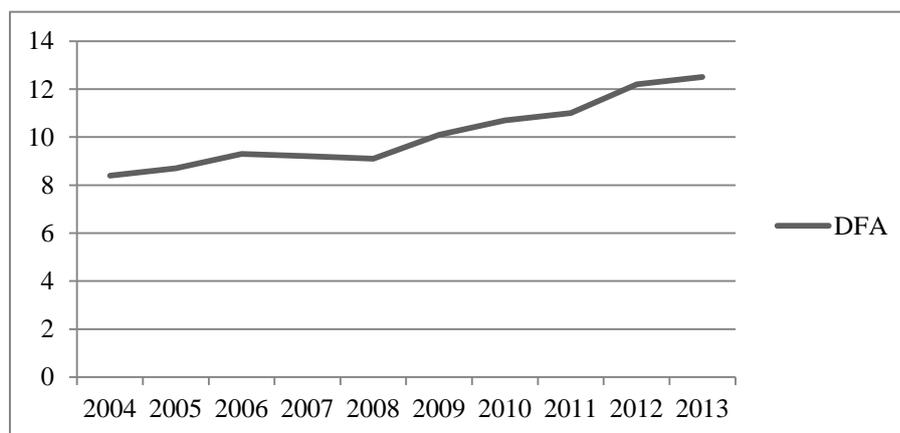
off interaksi kedua kebijakan diatas menunjukkan saat strategi *financial inclusion* dengan indikator BPE, ABS, UCD, dan UCH maka strategi *financial deepening* merespon dengan menggunakan strategi *Domestic Financial Asset* (DFA) yang dianggap paling efektif sebab mempunyai nilai *pay-off* terbesar dibandingkan yang lainnya yaitu 0,299 menghadapi strategi BPE, sebesar 0,232 jika menghadapi ABS, 0,340 saat menghadapi strategi UCD, dan sebesar 0,389 menghadapi strategi UCH.

Sedangkan dalam strategi *financial deepening* maka strategi yang akan merespon menggunakan strategi BPE yang dianggap paling efektif sebab mempunyai nilai *pay-off* paling besar dalam menghadapi DFA sebesar 0,398, dalam menghadapi FLA sebesar 0,307, 0,260 dalam menghadapi FFA. Namun apabila strategi *financial deepening* yaitu FLA menggunakan strategi ABS yaitu sebesar 0,076 sebab memiliki nilai *pay-off* paling besar.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka dalam analisis interaksi *financial deepening* dan *financial inclusion* di Indonesia yang ditunjukkan oleh gabungan matriks *pay-off* bahwa *financial deepening* mempunyai strategi yang dominan yang dianggap paling efektif untuk digunakan yaitu *domestic financial asset* (DFA). Sementara itu, pada *financial inclusion* tidak ditemukan adanya strategi yang paling dominan, sebab terdapat dua strategi yang dianggap paling efektif untuk menghadapi strategi-strategi dari *financial deepening* yaitu *banking penetration* (BPE) dan *availability of banking services* (ABS). Oleh sebab itu, pada interaksi kebijakan tersebut tidak terdapat strategi dominan pada masing-masing *player* yang saling dihadapkan. Sehingga tidak terdapat titik keseimbangan yang terjadi baik *Nash Equilibrium* maupun *Prisoner's Dilemma*.

Interaksi *financial deepening* dan *financial inclusion* di Indonesia menghasilkan nilai *pay-off* yang menunjukkan tindakan aksi dan reaksi yang dilakukan yang mempunyai tujuan yang sama yaitu stabilitas sistem keuangan yang mantap. Prioritas tujuan yang berbeda pada masing-masing kebijakan menyebabkan terjadinya implikasi sulit dalam interaksi yaitu *trade-off* antara penguatan industri perbankan dan kemudahan akses layanan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis jika untuk mencapai kemudahan layanan perbankan maka strategi yang digunakan adalah *banking penetration* (BPE) dan *availability of banking service* (ABS) dimana kebijakan yang diterapkan cenderung lebih mengarah pada kemudahan layanan perbankan sehingga dapat memengaruhi upaya kebijakan *financial deepening* dalam mencapai penguatan industri perbankan. Maka *domestic financial asset* (DFA) digunakan oleh *financial deepening* untuk merespon kebijakan *financial inclusion* tersebut.



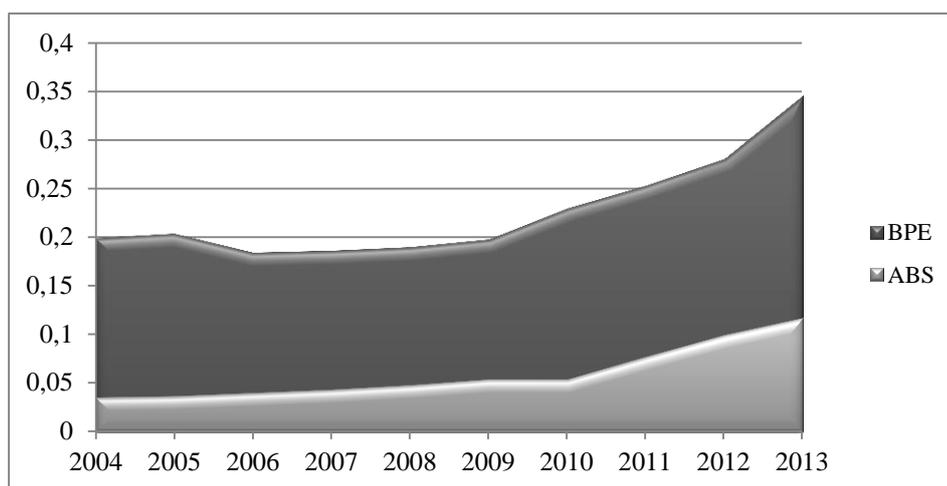
Gambar 4.13 Perkembangan *Domestic Financial Asset* 2004-2013 (dalam persen) di Indonesia. Sumber: Berbagai Sumber, diolah. 2014.

Berdasarkan gambar 4.13 merupakan kondisi perkembangan *Domestic Financial Asset* di Indonesia selama rentang sepuluh tahun. Pada perhitungan sintesa sebelumnya yakni *Domestic Financial Asset* (DFA) menjadi strategi yang dominan dalam *financial deepening* menghadapi strategi *financial inclusion* di Indonesia. Hal ini dikarenakan peran perbankan di struktur perekonomian Indonesia cukup kuat terkait hal penyimpanan dan pendanaan bagi aktivitas perekonomian. Peranan bank dalam pembangunan Nasional adalah menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat. Demikian pula dapat membuka dan memperluas lapangan atau kesempatan kerja. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur di dalam masyarakat. Kegiatan dalam pemberian jasa-jasa

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dapat membantu memperbesar dan memperlancar arus barang-barang dan jasa-jasa dalam masyarakat.

Pemberian kredit bank mempunyai peranan yang penting karena turut menentukan pembagian pendapatan masyarakat. Kredit merupakan sarana yang tepat bagi sebab dengan memperoleh kredit masyarakat dapat menguasai faktor-faktor produksi untuk kegiatan usaha. Semakin besar kredit yang diperoleh, semakin besar pula faktor produksi yang dikuasai, sehingga makin besar pula bagian pendapatan masyarakat yang dapat diraih. Sehubungan dengan itu melalui sistem perbankan dan kebijakan perkreditan yang tepat, bank dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu pemerintah untuk pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dinamisasi yang dilakukan oleh perbankan dalam salah satu upayanya yaitu menciptakan kemudahan layanan perbankan bagi masyarakat dalam strategi *financial inclusion* yang berdasarkan hasil perhitungan bahwa dalam menghadapi strategi *financial deepening* maka *banking penetration* dan *availability of banking service* pada strategi *financial inclusion* dianggap paling efektif sebab memiliki nilai *pay-off* tertinggi. Berikut adalah perkembangan *banking penetration* dan *availability of banking service* di Indonesia dalam gambar 4.14.



Gambar 4.14 Perkembangan *Banking Penetration* (BPE) dan *Availability of Banking Service* (ABS) (Strategi *Financial Inclusion*) 2004-2013 di Indonesia.
Sumber: World Bank, 2014.

Pada Gambar 4.14 menunjukkan perkembangan *Banking Penetration* (BPE) dan *Availability of Banking Service* (ABS) di Indonesia selama 2004 hingga 2013.

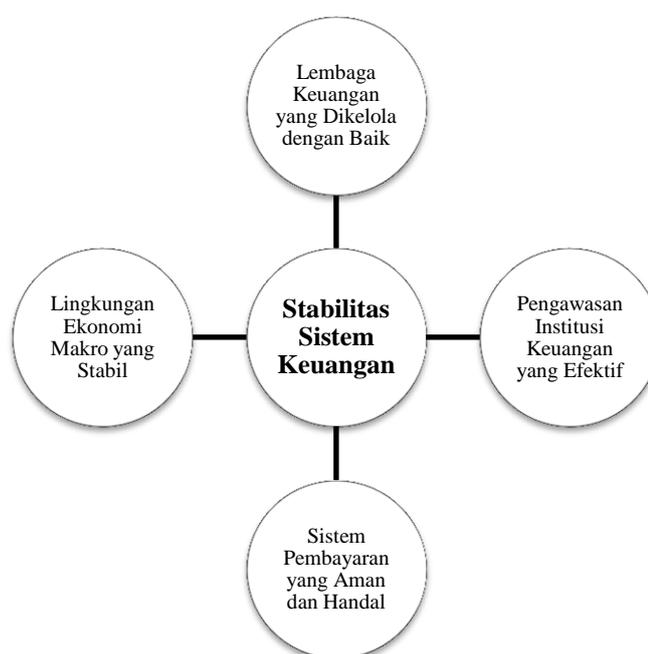
Terlihat bahwa keduanya mengalami pergerakan yang positif dalam sepuluh tahun, berdasarkan perhitungan sintesa *financial deepening* dan *financial inclusion* bahwa strategi yang paling efektif dari *financial inclusion* yaitu *banking penetration* dan *availability of banking service* dalam menghadapi *financial deepening*. Dua strategi ini dianggap paling tepat dalam mewujudkan tujuan strategi *financial inclusion* yaitu mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Adanya dua strategi tersebut dalam penetrasi perbankan dan ketersediaan layanan perbankan dapat ditingkatkan kuantitasnya sebagai ekspansi pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang dilakukan dalam meningkatkan penetrasi perbankan di masyarakat adalah untuk memberikan kesempatan masyarakat dalam menikmati layanan keuangan dengan keberadaan lembaga keuangan yaitu bank sebagai lembaga intermediasi. Demikian pula dalam menyediakan layanan perbankan dapat secara merata berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya di masing-masing pulau di Indonesia.

4.3.3 Preskripsi Interaksi *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening*

Indonesia merupakan negara sedang berkembang dengan beberapa masalah keuangan yang dimiliki, diantaranya adalah akses keuangan yang rendah dan struktur lembaga keuangan sebagai lembaga pendukung kegiatan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Bukti empiris yang ada menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatasi persoalan keuangan secara komprehensif dan berkelanjutan sehingga dibutuhkan penguatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fenomena yang tengah berkembang adalah inklusi dan pendalaman keuangan, kedua fenomena tersebut dapat dibuktikan secara teori bahwa keterkaitan pembangunan keuangan dibutuhkan sebagai bentuk konsolidasi dalam sebuah proses harmonisasi yang terwujud dalam suatu keputusan kebijakan di sektor keuangan.

Kombinasi yang tepat dalam menyusun sebuah strategi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait adalah sebuah tujuan yang dapat dicapai dengan perencanaan dan analisa yang mendukung. Hasil perhitungan berdasarkan sintesa *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory* sebagai

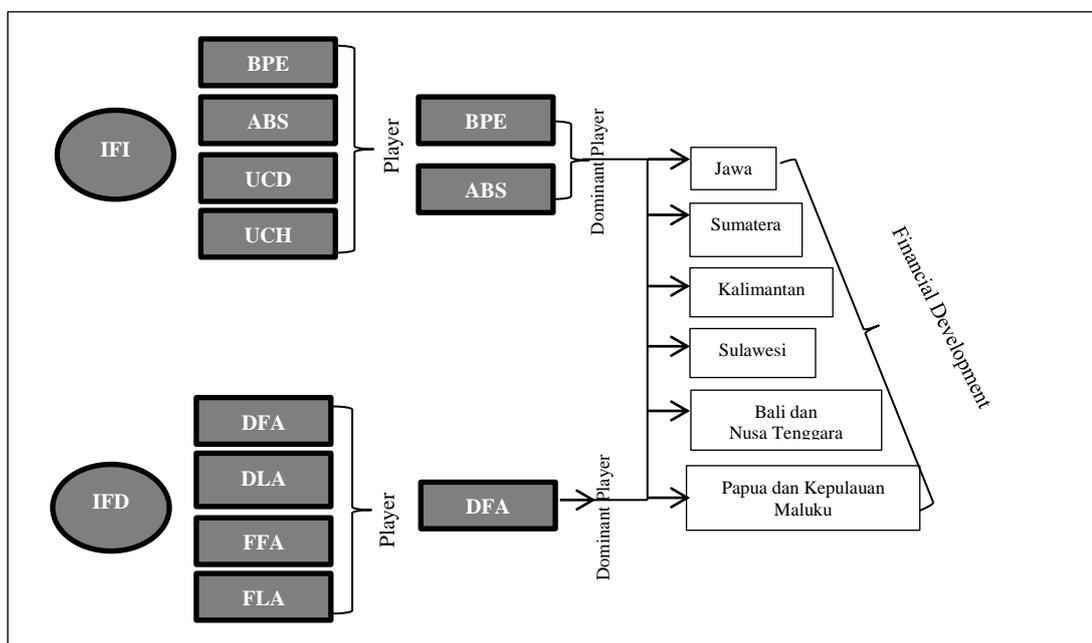
salah satu cara dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan dideterminasi beberapa faktor pada gambar 4.15. Terdiri dari empat faktor yang dipaparkan didalam gambar 4.15 dimana merupakan sebuah interkoneksi yang terjalin dari satu faktor ke faktor lainnya. Suatu stabilitas sistem keuangan tidak dapat dicapai dengan beberapa faktor saja terdapat beberapa faktor pendukung untuk menciptakan sebuah sistem keuangan yang stabil pada Gambar 4.15



Gambar 4.15 Faktor-Faktor Pendukung Stabilitas Sistem Keuangan.
(Sumber: Bank Indonesia)

Lingkungan ekonomi makro yang stabil, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, pengawasan institusi keuangan yang efektif, dan sistem pembayaran yang aman dan handal menjadi beberapa faktor pendukung yang mendeterminasi stabilitas sistem keuangan. Strategi *financial inclusion* dan *financial deepening* merupakan dua strategi dalam bidang keuangan mencakup empat indikator. Kedua interaksi strategi tersebut diperlukan dalam sebuah pengambilan kebijakan dalam menentukan langkah penanganan masalah keuangan yang berkaitan dengan perbankan.

Sistem keuangan yang stabil menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan, termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah kecil. Pada akhirnya mendorong fungsi intermediasi keuangan yang efisien sehingga pada akhirnya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi efisiensi alokasi, stabilitas sistem keuangan yang terjaga juga mendorong beroperasinya pasar dan memperbaiki alokasi sumber daya perekonomian.



Gambar 4.16 Skema Strategi *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening* di Indonesia

Berdasarkan gambar 4.16 merupakan pemetaan atas hasil sintesa perhitungan yang dilakukan sebelumnya. Strategi prioritas diantara *player* didapatkan bahwa pada *financial inclusion* adalah BPE dan ABS agar pembangunan keuangan dapat berjalan dengan tepat dilakukan ekspansi pembangunan pada kedua strategi tersebut, sama halnya dengan *financial deepening* DFA digunakan untuk menghadapi *financial inclusion* dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pada setiap pulau di Indonesia berorientasi pada pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati layanan keuangan.

Sintesa *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory* memaparkan hasil terhadap opsi kebijakan atas kedua fenomena yaitu *financial inclusion* dan *financial deepening*. Berlatar belakang atas situasi perekonomian yang terjadi khususnya pada sektor keuangan dengan melibatkan lembaga jasa keuangan sebagai wadah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dengan menampung dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat bagi sektor usaha maupun lainnya. Berdasarkan sintesa hasil AHP dan *Game Theory* dipaparkan bahwa variabel yang dimainkan *financial inclusion* yaitu *banking penetration* (BPE), *availability of banking service* (ABS), *usage* (UCD), *usage to households* (UCH) yaitu hanya dua variabel atau pemain yang mampu menanggapi *financial deepening* yaitu *banking penetration* (BPE), *availability of banking service* (ABS) yang artinya bahwa kedua variabel ini sebagai opsi kebijakan dalam menata sektor keuangan pada perbankan dalam menghadapi rendahnya akses keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan yaitu perbankan.

Jumlah perbankan dalam suatu wilayah memerlukan ekspansi dalam pendirian bank sehingga masyarakat dapat terakses layanan keuangan, dan pihak berwenang dapat menjunjung tinggi terhadap *service oriented* pada masyarakat yaitu dengan *availability of banking service* (ABS). Sinergi atas kedua hal tersebut dapat membangun sebuah pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Lain halnya dengan *financial deepening*, menggunakan empat variabel yaitu *domestic financial asset* (DFA), *domestic liabilities asset* (DLA), *foreign financial asset* (FFA), *foreign liabilities asset* (FLA) tetapi variabel yang dapat bermain dengan nilai *pay-off* tertinggi hanya *domestic financial asset* (DFA), hal ini menunjukkan bahwa penguatan modal perbankan dibutuhkan untuk mendorong lancarnya transaksi di bank.

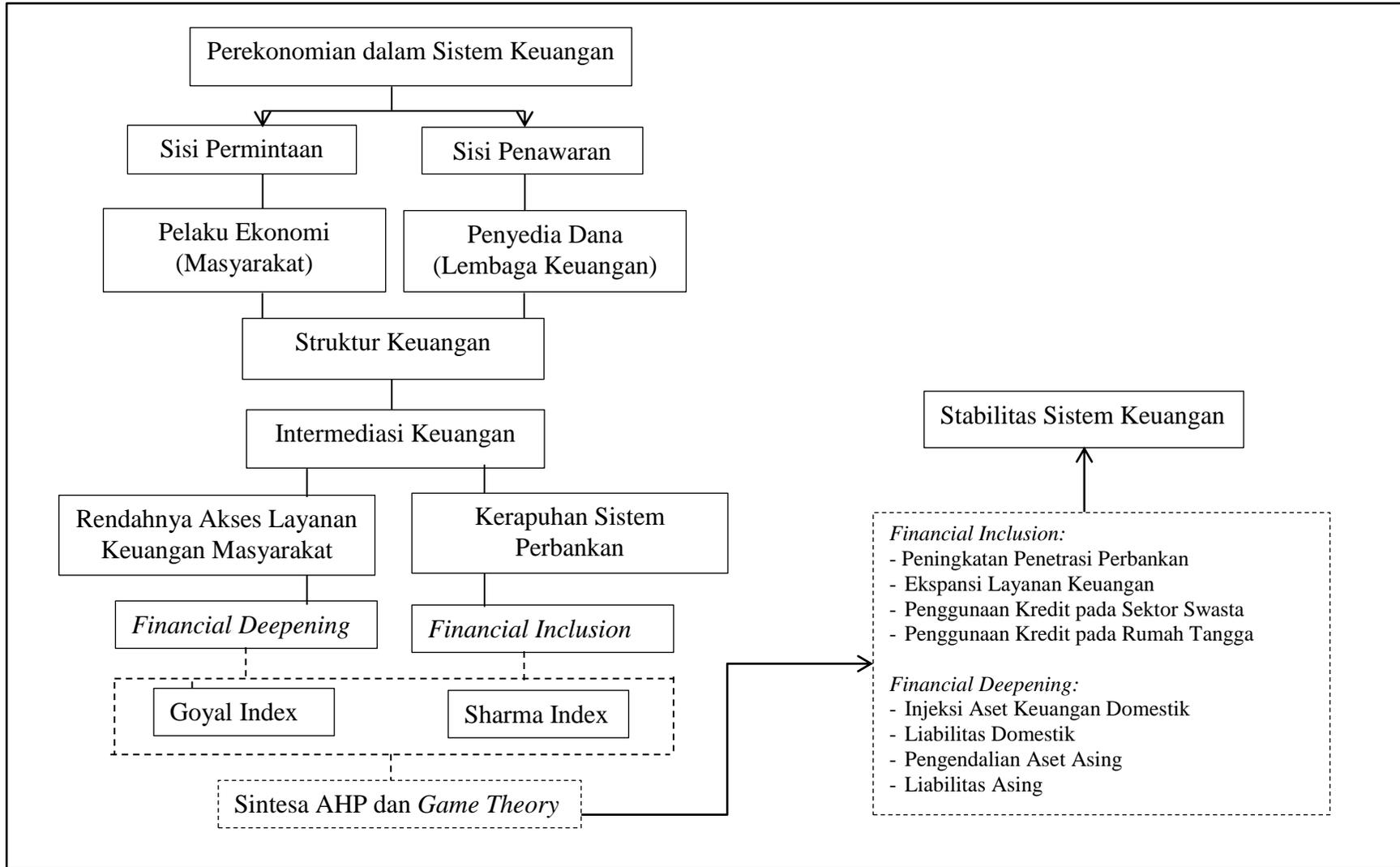
Kedua fenomena diatas yaitu *financial inclusion* dan *financial deepening* dengan hasil sintesa yang telah dilakukan dengan AHP dan *Game Theory* menggambarkan sebuah opsi kebijakan yang dapat diambil oleh pengambil kebijakan dalam memainkan beberapa variabel yang mampu diterapkan dalam sebuah kebijakan di Indonesia. Sisi permintaan dengan pelaku masyarakat akan dipecahkan dengan peningkatan pengadaan *banking penetration* (BPE),

availability of banking service (ABS), dan sebaliknya pada sisi penawaran yaitu perbankan maka perlu ditingkatkan tentang *domestic financial asset* (DFA).

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kondisi *financial inclusion* di Indonesia memerlukan langkah insentif bagi pemerataan pembangunan ekonomi salah satunya adalah dengan ekspansi yang dilakukan oleh pemerintah melalui sektor keuangan. Masyarakat dapat menyimpan modal berupa dana dan lainnya di bank dan fungsi bank sebagai wadah dana dan penyalur kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun pinjaman lainnya. Pulau Jawa sebagai pulau yang memiliki keadaan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan pada pulau-pulau lainnya di Indonesia, hal ini tidak lepas dari tersedianya faktor produksi yang mudah didapat oleh masyarakat untuk beraktivitas. Keberadaan lembaga keuangan tersedia cukup banyak dibandingkan dengan pulau lainnya. Hal berbeda dirasakan oleh pulau Papua dan Kepulauan Maluku dimana berdasarkan pemaparan pada sub bab sebelumnya bahwa pulau ini memiliki kondisi *financial inclusion* yang paling rendah. Terbaik kedua dalam hal inklusi yaitu pulau Sumatera, diikuti oleh Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dan Nusa Tenggara. Secara makro kondisi *financial inclusion* (inklusi keuangan) adalah *low* (rendah) demikian dengan *financial deepening* (pendalaman keuangan).

Pemaparan kondisi dan hasil perhitungan serta sintesa *financial inclusion* dan *financial deepening* pada pembahasan sebelumnya merupakan sederatan upaya dalam penguatan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sebuah intermediasi keuangan oleh *financial inclusion* dan *financial deepening* digunakan sebagai kemungkinan dalam penguatan sebuah sistem keuangan berdasarkan beberapa pemecahan masalah dengan menggunakan strategi permainan permasalahan. Sebuah resume atas simulasi hasil dan kebijakan *financial inclusion* dan *financial deepening* di Indonesia terangkum pada gambar 4.17.

Perekonomian memiliki komposisi pada sisi permintaan dan penawaran yang sebagai pelaku dalam hal tersebut adalah masyarakat dan institusi. Berawal dari permasalahan sektor keuangan maka lembaga jasa keuangan sebagai institusi yang berwenang dalam penyelesaian transaksi ekonomi masyarakat.



Gambar 4.17 Semiotika *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening* di Indonesia, 2015.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 5 ini dipaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Hasil penelitian baik menggunakan metode perhitungan eklektik dan sintesa *Analytic Hierarchy Process* dan *Game Theory*, maupun analisis deskriptif naratif akan disimpulkan dan selanjutnya akan diambil saran yang tepat bagi pihak-pihak yang terkait.

5.1 Kesimpulan

Pemaparan hasil perhitungan eklektik dengan indeksisasi yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan dengan indeksisasi, memberikan kesimpulan bahwa secara keseluruhan kondisi *financial inclusion* dan *financial deepening* di Indonesia berada pada kategori *low* (rendah), maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa *financial inclusion* dan *financial deepening* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan, di sisi lain *main problem* keuangan terjadi pada rendahnya akses keuangan dan pembangunan institusional lembaga keuangan. Adapun kesimpulan hasil analisis perhitungan tersebut sebagai berikut.
 - a. Hasil perhitungan *financial inclusion* dengan melakukan indeksisasi menunjukkan bahwa selama masa studi sepuluh tahun pada tahun 2004 hingga tahun 2013 secara rata-rata kondisi *financial inclusion* di Indonesia berada pada kategori *low* (rendah), namun di tahun terakhir yaitu 2013 kondisi tersebut mengalami perubahan bahwa *financial inclusion* berada pada kategori *middle* (menengah). Perhitungan serupa juga dilakukan pada enam pulau besar di Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Papua dan Kepulauan Maluku dan hasilnya adalah Pulau Jawa memiliki kondisi *financial inclusion* (inklusi keuangan) tertinggi diantara pulau lainnya. Hal ini dikarenakan keadaan Jawa yang mudah dalam mengakses faktor produksi sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan lancar.

Selanjutnya adalah Pulau Sumatera yang memiliki kondisi *financial inclusion* terbesar kedua setelah Jawa namun besarnya tidak sebesar yang dimiliki oleh Jawa. Sumatera hanya bergerak pada kondisi *low* dan *middle financial inclusion*. Sebangun dengan hal itu Kalimantan dan Sulawesi juga memiliki kondisi *low financial inclusion* dan dalam beberapa tahun saja menyentuk kondisi *middle financial inclusion* namun perkembangan yang ditunjukkan tidak selalu positif. Bali dan Nusa Tenggara dan Papua dan Kepulauan Maluku berada pada kondisi *low financial inclusion* dan dalam beberapa tahun saja mengalami *middle financial inclusion* di Bali dan Nusa Tenggara namun tidak demikian di Papua dan Kepulauan Maluku yang berada pada kondisi *low financial inclusion* selama sepuluh tahun masa studi.

- b. Hasil perhitungan *financial deepening* dengan empat strategi didalamnya masih menunjukkan kondisi yang *low* (rendah) selama sepuluh tahun masa studi. Rentang 2004 hingga 2013 kondisi *financial deepening* di Indonesia selalu berada pada kondisi rendah. Hal ini menunjukkan kurangnya pembangunan secara kontinyu pada industri perbankan khususnya dalam strategi *financial deepening* (pendalaman keuangan).
2. Berdasarkan sintesa yang dilakukan dengan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory* terhadap *financial inclusion* dan *financial deepening* terkait *vis a vis* bahwa interaksi yang terjadi diantara keduanya dapat menimbulkan implikasi yang sulit yakni adanya *trade-off* terhadap tujuan masing-masing meskipun kedua strategi tersebut diarahkan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. *Financial deepening* lebih ditekankan pada penguatan industri perbankan, sementara disisi lain sasaran *financial inclusion* ditekankan pada kemudahan layanan perbankan bagi masyarakat. Aplikasi menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory*, nilai *pay-off* yang dihasilkan oleh masing-masing strategi menunjukkan tindakan yang telah dilakukan *player* (*Financial Deepening* dan *Financial Inclusion*) dalam berinteraksi dengan menggunakan masing-

masing strategi dan terdapat empat strategi dimasing-masing *player*. Sehingga nilai *pay-off* menjadi acuan untuk menentukan strategi kebijakan yang paling efektif. Bagi *financial deepening* untuk menghadapi apapun aksi yang dilakukan oleh *financial inclusion* dengan menggunakan *Domestic Financial Asset* (DFA) sebab memiliki nilai *pay-off* terbesar dibandingkan yang lainnya yaitu 0,299 menghadapi strategi BPE (*Banking Penetration*), sebesar 0,232 jika menghadapi ABS (*Availability of Banking Service*), 0,340 saat menghadapi strategi UCD (*Usage*) , dan sebesar 0,389 menghadapi strategi UCH (*Usage to Households*). Hal ini menunjukkan bahwa strategi *domestic financial asset* (aset keuangan domestik) diperlukan dalam penguatan industri perbankan dalam hal ini bank dapat memperkuat modal yang dimiliki sehingga aktivitas atau transaksi ekonomi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar salah satunya adalah penyaluran kredit oleh perbankan kepada masyarakat. Nilai *pay-off* yang dihasilkan oleh *financial inclusion* dalam menghadapi aksi yang dilakukan *financial deepening* adalah menggunakan BPE (*Banking Penetration*) dan ABS (*Availability of Banking Service*) sebab memiliki nilai *pay-off* tertinggi, BPE dalam menghadapi DFA sebesar 0,299, BPE menghadapi DLA sebesar 0,204, BPE menghadapi aksi FFA sebesar 0,042, dan terakhir adalah ABS dalam menghadapi FLA sebesar 0,055. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan dengan ekspansi pengadaan lembaga keuangan dan orientasi pelayanan terhadap masyarakat harus ditegakkan sehingga tidak hanya mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya keuangan tetapi memberikan akses yang lebih luas terhadap masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan. Indonesia yang terdiri dari enam pulau besar menjadikan tugas rumah bagi pemerintah dalam mengerjakan pembangunan keuangan khususnya dan pemerataan pendapatan secara umum. Pembangunan keuangan secara berkelanjutan diharapkan dapat menekan jumlah angka kemiskinan di Indonesia, apabila masyarakat dapat mengakses keuangan dengan mudah dan perbankan kuat secara industri dalam hal pendanaan maka antara sisi *demand* dan *supply* seimbang.

Berdasarkan kondisi tersebut, tidak adanya strategi dominan yang dimiliki pada masing-masing *player* baik *financial deepening* dan *financial inclusion* untuk dihadapkan dalam permainan interaksi, maka tidak terdapat titik keseimbangan yang terjadi baik *Nash Equilibrium* dan *Prisoner's Dilemma*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan, antara lain:

- a. Diperlukan upaya pembangunan keuangan secara berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian tujuan akhir kebijakan stabilitas sistem keuangan yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, hal ini penting dilakukan dalam rangka menghindarkan dampak negatif terkait berbagai macam spekulasi yang berkembang dalam upaya pembangunan keuangan di Indonesia.
- b. Perlu melakukan ekspansi secara besar-besaran untuk meningkatkan koordinasi pemeliharaan stabilitas sistem keuangan melalui *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening* berdasarkan *Service* dan *Fund Oriented* dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang terkait sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat dari adanya *financial development* (pembangunan keuangan).
- c. Pembangunan lembaga keuangan formal yaitu bank sebaiknya dilakukan secara massif di beberapa pulau di Indonesia, secara khusus di luar Pulau Jawa sebab kondisi inklusi keuangan masih tergolong rendah. Infrastruktur yang ada di beberapa pulau tersebut dapat dibangun untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keuangan oleh pihak-pihak yang terkait.
- d. Dari sisi *financial inclusion*, jumlah lembaga keuangan dan penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat dapat diperluas lagi dengan bekerjasama secara aktif dengan pemerintah setempat guna mencapai tujuan akhir dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Koordinasi yang baik diperlukan dalam membangun suatu sistem

keuangan yang tepat berdasarkan analisis yang harus dilakukan sebelumnya dimasing-masing pulau di Indonesia. Sebab kebutuhan keuangan tidak dapat dipaksakan secara merata, adat, budaya, dan perilaku masyarakat disetiap pulau berbeda. Diperlukan tehnik khusus dalam mengakses masyarakat agar mau menggunakan layanan perbankan.

- e. Dari sisi *financial deepening*, perbankan dapat melakukan pengembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan. Secara aktif bekerjasama sama dengan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya perbankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan ekspansi hal tersebut, maka dana pihak ketiga pada perbankan dapat meningkat dan modal perbankan bertambah sehingga meminimalisir adanya turbulensi dari institusional dalam perbankan.
- f. Edukasi terhadap pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat perlu ditingkatkan karena asa nalar yang terbentuk melalui informasi terkini yang dimiliki oleh pelaku ekonomi, maka transparansi pelaksanaan kebijakan diperlukan, agar para pelaku ekonomi dapat bereaksi sesuai dengan target yang diinginkan dalam mencapai tujuan akhir.
- g. Analisis yang didasari atas sebuah permasalahan dalam fenomena *financial inclusion* dan *financial deepening* adalah pengambil kebijakan perlu mengedepankan *service and fund oriented* terhadap pembangunan keuangan di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

- Alquist, J. S. 2006. Economic Policy, Institution, and Capital Flows: Portofolio and Direct Investment in Developing Countries. *International Studies Quarterly*, 50 (1): 681-704
- Andrianaivo, M., Kpodar, K. 2011. ICT, Financial Inclusion, and Growth: Evidence from African Countries. *IMF Economic Review*.
- Ayyagari, M., Demirguc-Kunt., Vojislav. M. 2007. How Well Do Institutional Theories Explain Firms' Perception of Property Rights? *Review of Financial Studies forthcoming*.
- Barr, M. 2004. 'Banking the poor.' In *Yale Journal on Regulation* 21 pp122-239.
- Beck T., Demirgüç-Kunt A., Levine R. 2000. "A New Database on the Structure and Development of the Financial Sector", *World Bank Economic Review* 14 (3), 597-605.
- Beck T., M Lundberg., Majnoni. G. 2006. 'Financial Intermediary Development and Growth Volatility: Do Intermediaries Dampen or Magnify Shocks?', *Journal of International Money and Finance*, 25(7), pp 1146–1167.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., and Martinez Peria, M. S. (2007) Reaching out: Access to and use of banking services across countries. *Journal of Financial Economics* 85: 234-266.
- Bencivenga, V.R., Smith, B.D, 1995. Transactions Costs, Technological Choice, and Endogenous Growth. *Journal of Economic Theory*, 67, 53-177.
- Bernanke, B. 2005. The global saving glut and the US current account deficit. US Federal Reserve. Virginia Association of Economics, Richmond, Virginia.
- Binmore. K. 1991. *Fun and Games: A Text on Game Theory*, D.C. Heath. *Playing for Real: A Text on Game Theory*, Oxford University Press, Oxford.
- Buckland, J., Guenther, B., Boichev, G., Geddie, H. and Mutch, M. (2005) 'There are no banks here': financial and insurance exclusion services in Winnipeg's North End. Winnipeg Inner-city Research Alliance.
- Calderon, C., and L. Liu, (2003), "The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growth", *Journal of Development Economics* 72(1): 321-3

- Carbo S., Gardener E.P., and Molyneux P. 2005. *Financial Exclusion*. Palgrave MacMillan.
- Chakraborty, i. 2007. Does financial development cause Economic growth? The case of india. Occasional paper. Institute of development studies kolkata.
- Chakravarty, S.R., Pal, R. 2010. Measuring Financial Inclusion: An Axiomatic Approach. Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai.
- Chami, R., C. Fullenkamp, and S. Sharma. 2009. A Framework for Financial Market Development, IMF Occasional Paper No. WP/09/156 (Washington: International Monetary Fund, July).
- Chen, R. Dan Sangraula P. 2010. The Urbanization of Global Poverty. World Bank Research Digest Vol.1.
- Cheng, X., Degryse, H.A., 2006. The Impact of Bank and Non-Bank Financial Institutions on Local Economic Growth in China, Discussion Paper 2006-2009.
- Christopoulos, D.K., Tsionas, E.G. 2004. Financial development and economic growth: evidence from panel unit root and cointegrationtest. Journal of development economics.
- Claessens, S., Honohan P., Rojas-Suarez L. (2009) Policy Principles for Expanding Financial Access. Report of the CGD Task Force on Access to Financial services, Centre for Global Development.
- Clarida, R. 2005a. Japan, China, and the U.S. Current account deficit. CATO Journal Vol. 25, No. 1 (Winter).
- Clarida, R., 2005b. Some Thoughts on ‘The Sustainability and Adjustment of Global Current Account Imbalances.’ Speech given at the Council on Foreign Relations.
- Chvátal. V. 1983. *Linear Programming*, W. H. Freeman, New York.
- Cole, S. dan Zia, B. 2011. “Prices or Knowledge?What Drives Demand for Financial Services in Emerging Markets?,”Journal of Finance.
- Djankov, S., C. McLiesh, dan A. Shleifer. 2007. Private Credit in 129 Countries. Journal of Financial Economics 2 (84): 299–329.
- Djunedi, P. 2014. Perekonomian Indonesia dan Tantangan di Masa Mendatang. Media Keuangan. Vol. IX (85). Badan Kebijakan Fiskal.

- Dubins. L. E & Savage. L. J. 1965. *How to Gamble If You Must: Inequalities for Stochastic Processes*, McGraw-Hill, New York.
- Fritzer, Friedrich. 2004. "Financial Market Structure and Economic Growth: A Cross Country Perspective." *Monetary Policy and The Economy Quarter*, pp. 72-87.
- Fudenberg. D. & Tirole. J. 1991. *Game Theory*, MIT Press.
- Gibbons. R. 1992. *Game Theory for Applied Economists*, Princeton University Press.
- Goldsmith, Raymond W. 1969. *Financial structure and development*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Goodwin M, Jones M, Jones R, Pett K, Simpson G, 2002, "Devolution and economic governance in the UK: uneven geographies, uneven capacities?".
- Goswami, M. and S. Sharma, 2011. The Development of Local Debt Markets in Asia. IMF Occasional Paper No. WP/11/132 (Washington: International Monetary Fund, June).
- Goyal, R. 2011. Financial deepening and international monetary stability. IMF Occasional Paper. International Monetary Fund.
- Greenwood.J dan Jovanovich. 1997, Financial Development Growth and the Development financial Markets, *Journal Of Economic Dynamic and Control*, 21, hal 145-186
- Gurley, J.G. and E.S. Shaw, (1967), "Financial Development and Economic Development", *Economic Development and Cultural Change*, Vol.15, no.3, April:257-268.
- Halwani, Hendra. (2005). *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi Edisi Kedua*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Hannig, A., Janses, S. 2010. Financial Inclusion and Financial Stability. ADBI Working Paper.259. Social Science Research Network.
- Hernando, De S. 2000. *The Mystery of Capital*. London. Black Swan
- Houben, A., Kakes. J., and Schinasi. G. 2004. Towards a Framework for Safeguarding Financial Stability, IMF Occasional Paper (WP/04/101)

- Huang Y. & J. Temple. 2005. "Does external trade promote financial development?" University of Bristol, Working paper series.
- Huang, H. 2009. Designing a knowledge-based system for strategic planning: a balanced scorecard perspective. *Expert Systems with Applications*, 36(1) 209–218.
- Hsu, T., & Pan, F.F.C. 2009. Application of Monte Carlo AHP in ranking d quality attributes, Part 1. *Expert Systems with Applications*, 36(2), 2311–2316.
- Jaffe, Dwight and Mark, Levonian, (2001): The Structure of Banking Systems in Developed and Transition Economies; *European Financial Management*; 7(2); pp 161-181.
- Jaising, Naushita. 2013. Financial Inclusion in Ghana : A Pre-Diagnostic Study. Master Thesis IE. School of International Relations.
- Johnston. D. Jr., Morduch. J. 2008. International Bank for Reconstruction and Development. Oxford University. The World Bank Economic Review.
- Jorgenson, D.W. 1995b. *International Comparisons of Economic Growth*. Cambridge. the MIT Press.
- _____(2009b), "A New Architecture for the U.S. National Accounts," *Review of Income and Wealth*, Series 55, No. 1, March, pp. 1-42.
- Jung, W.S., (1986), "Financial Development and Economic Growth: International Evidence", *Economic Development and Cultural Change*, 34(2), 333-346.
- Kangas, J, Kurttila, M., Kajanus, M., Kangas, A. 2003. Evaluating the management strategies of a forestland estate-the S-O-S approach, *Journal of Environmental Management*, Vol. 69, No. 4, pp.349-358.
- Kar, M., Agir, H. and Peker, O. (2010) "Financial development and poverty reduction in Turkey", *Conference Proceedings*, pp.681-703. Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics.Turkey.
- Kar, M., Pentecost. E. 2000. "The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growth in Turkey: Further Evidence", *Economic Research Paper*, Department of Economics, Loughborough University, No: 00/27.

- Kar, M., Ş. Nazlıoğlu, and H. Ağır (2011), “Financial Development and Economic Growth Nexus in the MENA Countries: Bootstrap Panel Granger Causality Analysis”, *Economic Modelling*, 28, 685-693.
- Kempson, E. and C. Whyley. 1999b. Understanding and combating financial exclusion. *Insurance Trends*, 21: 18-22.
- Kempson, E. & Whyley, C. 1999. *Kept Out or Opted Out? Understanding Combating Financial Exclusion*. Bristol: Policy Press.
- Kempson E, A. Atkinson and O. Pilley. 2004. Policy level response to financial exclusion in developed economies: lessons for developing countries. Report of Personal Finance Research Centre, University of Bristol.
- Kempson, E. and Whyley, C. 1998. Access to current accounts. London: British Bankers' Association.
- Kharchenko, Olga. 2011. *Financial Literacy in Ukraine : Determinants and Implications for Saving Behavior*. Thesis MA in Economics. Kyiv School of Economics.
- Khun, H.W. 2004. in the Commemorative Edition of 'John von Neumann & Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press.
- King R.G and R. Levine. 1993. “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right,” *Quarterly Journal of Economics*, 108:715-735.
- Kularatne, Chandana. 2002. “An Examination of the Impact of Financial Deepening on Long-Run Economic Growth : An Application of a VECM Structure to a Middle-Income Country Context.
- Kunt, A.D., Levine, R. 1999. Financial structure and economic growth: Perspective and Lessons.
- Kuo, Y., Yang, T., Cho, C., Tseng, Y.C. 2008. Using simulation and multi-criteria methods to provide robust solutions to dispatching problems in a flow shop with multiple processors. *Mathematics and Computers in Simulation*, 78(1), 40–56.
- Kurtila, M., Pesonen, J., Kangas, M., Kajanus, M. 2000. Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis- a hybrid method and its application to a forest-certification case , *Forest Policy and Economics*, Vol. 1, pp.41-52.
- Laporan World Bank tahun 2011 dan 2014.

- Levhari, D., & Srinivasan, T.N. 1969. Optimal savings under uncertainty. *Review of Economic Studies* 36, 153-163.
- Levine, R. 1997. "Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda", *Journal of Economic Literature*, 35: 688-726.
- Levine, R., N. Loayza and T. Beck. 2000. "Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes", *Journal of Monetary Economics*, 46: 31-77.
- Levine R. 2005. "Finance and Growth: Theory and Evidence," *Handbook of Economic Growth*, in: Aghion P. and S. Durlauf (ed.), vol 1, 865-934
- Levine, R., Zervos, S. 1998. Stock markets, bank, and economic growth. *American economic review*. Vol.88 No.3. pp 537-558.
- Leyshon A, et al. 1998. *Reading financial services: texts, consumers and financial literacy*. Environment and Planning D: Society & Space 16: 29-55
- Levine, R. & S. Zervos. 1998. "Stock Markets, Banks and Economic Growth", *American Economic Review*, 88, 537-58.
- Levine R, N Loayza., T Beck. 2000. 'Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes', *Journal of Monetary Economics*, 46(1), pp 31-77.
- Leyshon A. & Thrift N. 1995. Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States *Transactions of the Institute of British Geographers, New Series*, 20(3): 312-41.
- Lucas, R.E. 1988. On the Mechanism of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22 (1), 3-42.
- Lynch, D., (1996), "Measuring Financial Sector Development: A Study of Selected Asia-Pacific Countries", *Developing Economies*, 34(1),3-33.
- McFarlane, I.J. 1999. The Stability of the Financial System, Reserve Bank of Australia, Bulletin.
- McKinnon R.I. 1973. "Money and Capital in Economic Development", Washington D.C., The Brookings Institution
- Meier, G.M., Seers, D. 1984. *Pioneers in Development*. New York: Oxford University Press.
- Merton, Robert C. 1993. "Operation and Regulation in Financial Intermediation: A Functional Perspective." In *Operation and Regulation of Financial Markets*, edited by P. Englund. Stockholm: Ekonomiska rådet. Sweden.

- Merton, Robert C., and Zvi Bodie. 1995. Financial Infrastructure and Public Policy: A Functional Perspective. In *The Global Financial System: A Functional Perspective*.
- Merton, Robert C., and Zvi Bodie. 2005. "Design of Financial Systems: Towards A Synthesis of Function and Structure." *Journal of Investment Management*, Vol. 3, No. 1, pp. 1-23.
- Merton, Robert C. 1995. "Financial Innovation and the Management Regulation of Financial Institutions." *Journal of Banking and Finance*, Vol. 19, p. 461 – 481.
- Mishkin, F.S, 2001, "*The Economics of Money, Banking and Financial Markets*", 6th Edition, Addison Wesley Logman, New York.
- Mishkin, F. S. 2008. *The Economic of Money, Banking, and Financial Markets*, 8th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Mohan, R. (2002): 'Transforming Indian Banking: In Search of a Better Tomorrow', *RBI Bulletin* (January).
- Mohan, R. (2004): 'Financial Sector Reforms in India: Policies and Performance Analysis', *RBI Bulletin* (October).
- Mohan, R. 2006. Economic growth, financial deepening, and financial inclusion. *RBI Bulletin*.
- Mohan Rakesh, (2006), "Economic Growth, Financial Deepening and Financial Inclusion", Annual Bankers Conference 2006, Hiderabad, November.
- Mulyono, Sri. 1991. *Riset Operasi*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Myerson. R.B. 1991. *Game Theory: Analysis of Conflict*, Harvard Univ Press, Cambridge, Massachusetts.
- Nasution. 2001. Publikasi Bank Indonesia.
- Neumann, J.V & Morgenstern, O. 1944. *Theory of games and economic behavior*, Princeton University Press.
- Nguena, C.L., Abimbola, T.M. 2013. Financial Deepening Dynamics and Implication for Financial Policy Coordination in a Monetary Union: the case of WAEMU. African Economic Conference. African Development Bank.

- Nkoro, E. & Uko, A. K. 2012. Foreign Capital Flows and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Approach. *Asian Journal of Empirical Research*,2(5):149-161.
- Onwumere, J.U.J., et.al. 2012. The Impact of Financial Deepening on Economic Growth: Evidence from Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol 3, No 10, 2012.
- Papadimitriou. C. H., & Steiglitz. K. 1982. *Combinatorial Optimization*. New York.
- Peachey, Stephen & A. Roe. 2004. *Access to Finance: A Study for the World Savings Banks Institute*. Oxford:Oxford Policy Management, October.
- Peachy, Stephen & A. Roe. 2005. *Access to Finance: Measuring the Contributions of Savings Banks*. Brussels:World Savings Banks Institute, September.
- Pesonen, M., Kurttila, M., Kangas, J., Kajanus, M., Heinonen, P. 2001. Assessing the priorities using A'WOT among resource management strategies at the Finnish forest and park service, *Forest Science*, Vol. 47, pp. 534-541
- Priyarsono *et,al*. 2011. Struktur pasar persaingan perbankan Indonesia dalam periode konsolidasi. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, Vol.8.No.2
- Rajan, R.G., and L. Zingales, 1998. Financial Dependence and Growth. *American Economic Review*, Vol. 88, No. 3, pp. 559-86.
- Rajan R, Zingales L. 1998. Financial Dependence & Growth. *American Economic Review* 88:559-86.
- Rajan R, Zingales L. 2003. The Great Reversals: The Politics of Financial Development in the 20th Century. *Journal of Financial Economics* 69:5-50.
- Rasmussen, R. 2001. Quantification on the LightCycler. In: Meuer S, Wittwer C, Nakagawara K (eds) *Rapid cycle real-time PCR, methods and applications*. Springer Press, Heidelberg
- Schinasi, Garry. 2006. *Safeguarding of Financial Stability: Theory and Practice*, International Monetary Fund, Washington.
- Saaty, T .L. 1980. *The Analytic Hierarchy Process*, McGraw-Hill, New York.

- Saaty, T. L. 1996. *Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process*, RWS Publications, Pittsburgh.
- Saaty, T. L & Vargas, L. G. 1996. *Decision Making with The Analytic Network Process*, Springer, USA.
- Saaty, T. L & Vargas, L. G. 1991. *Prediction, Projection and Forecasting*, Kluwer Academic, Boston.
- Saaty, T. L. & Özdemir, M. S. 2005. *The Encyclion: A Dictionary of Decisions with Dependence and Feedback based on the Analytic Network Process*, RWS Publications, USA.
- Saaty, T.L. 1996a. *Decision Making with Feedback: The Analytical Network Process*. RWS Publications, Pittsburgh.
- Saaty, T.L. 1996b. Decision-making for leaders: the analytical hierarchy process for decisions in a complex world. *The Analytical Hierarchy Process*, 2, 71–74.
- Saaty, T.L., & Vargas, L.G. 2006. *Decision-Making with the Analytic Network Process Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Springer, New York.
- Saaty, T.L., & Takizawa, M. 1986. Dependence and independence : from linear hierarchies to nonlinear network. *European Journal of Operation Research*, 26(2), 229–237.
- Sacks, D., B. Stevenson, dan Wolfers, J. 2010. *Subjective Well-Being, Income, Economic Development and Growth*. NBER Working Paper 16441, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA
- Sarma, M. 2010. *Index of Financial Inclusion*. Centre for International Trade and Development School of International Studies Jawaharlal Nehru University, India. Discussion Paper 10-05.
- Sarma, M. 2012. *Index of Financial Inclusion - A measure of financial sector inclusiveness*. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development. University of Applied Science.
- Schumpeter J.A. 1934. "The Theory of Economic Development", Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Sevklı, M., Lenny Koh, S.C., Zaim, S., Demirbag, M., Tatoglu E. 2007b. An application of data envelopment analytic hierarchy process for supplier

selection: a case study of BEKO in Turkey, *International Journal of Production Research*, 45(9), 1973–2003.

Soetiono, K.S, 2014. *Keuangan Inklusif*. Otoritas Jasa Keuangan.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV. Bandung

Sun, Y., Ma, J., Fan, Z.P., Wang J. 2008. A group decision support approach to evaluate experts for R&D project selection. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 55(1), 158–170.

Thiel, M. 2001. “ Finance and Growth: A Review of Theory and the Available Evidence”, Directorate General for Economic and Financial Affairs, Economic Paper No. 158.

Tsai, W. & Hung, S. 2009. Dynamic pricing and revenue management process in internet retailing under uncertainty: an integrated real options approach. *Omega*, 37(2), 471–481.

UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Vaona, A. 2005. "Regional Evidence on the Finance-Growth Nexus," Working Papers 30, University of Verona, Department of Economics.

World Bank. 1994. *East Asia's Trade and Investment: Regional and Global Gains from Liberalization*. United State of America: The International Bank for Reconstruction and Development-The World Bank.

Wurgler J. 2000. Financial Markets and the Allocation of Capital. *Journal of Financial Economics* 58:187-214.

Yüksel, İ. & Dağdeviren, M. 2007. Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis-A case study for a textile firm, *Information Sciences*, Vol. 177, No. 16, pp. 3364-3382.

Lampiran A**KUESIONER****STUDI *FINANCIAL INCLUSION* DAN
FINANCIAL DEEPENING DI INDONESIA**

Nama Responden :
Instansi/Wilayah Kerja :
Jabatan :

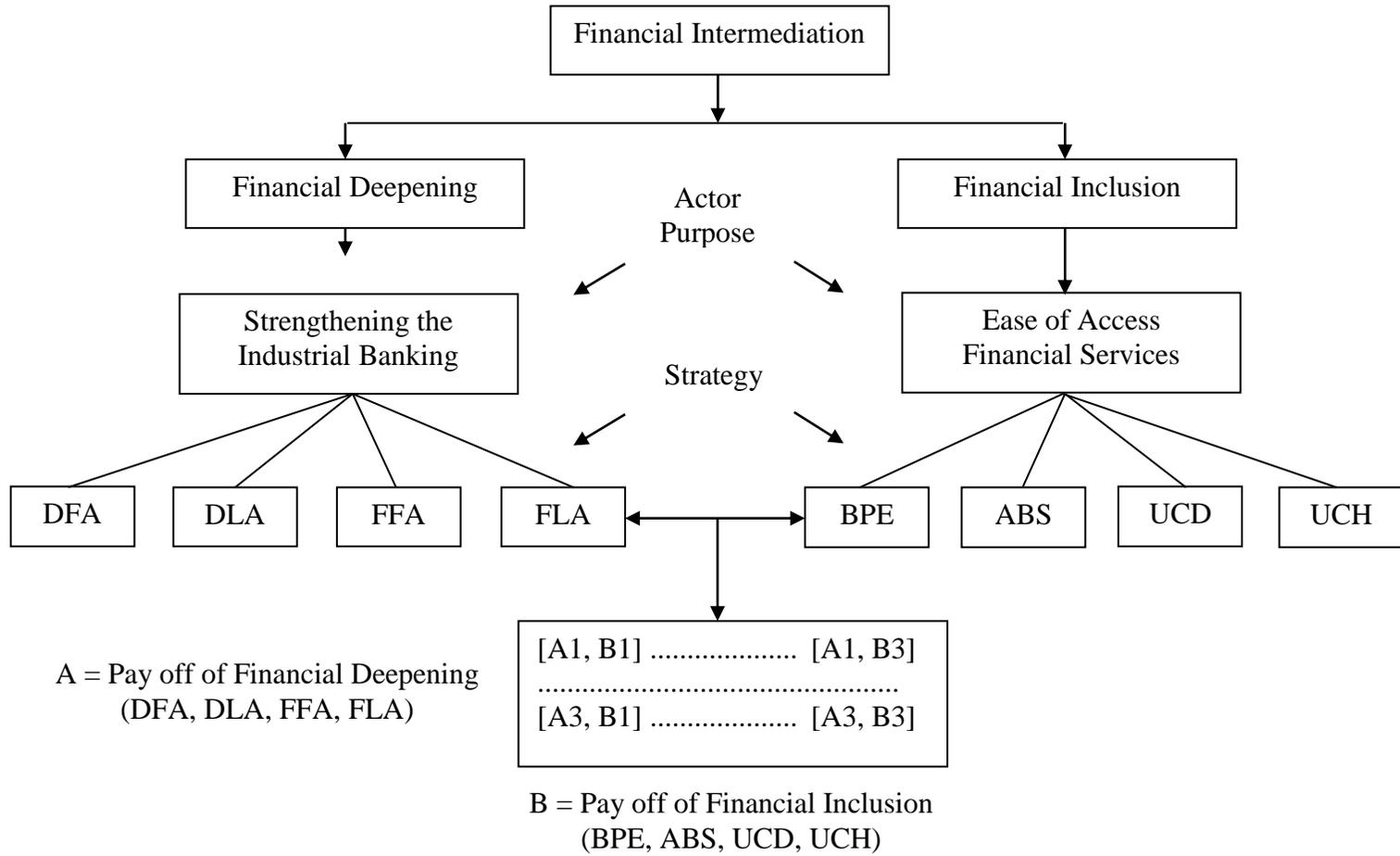
Aplikasi Kuesioner dengan Metode AHP;

Kuesioner ini disusun untuk menganalisis interaksi inklusi keuangan (*Financial Inclusion*) dan pendalaman keuangan (*Financial Deepening*) di Indonesia dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory*. Metode AHP digunakan untuk mengetahui persepsi orang yang dianggap *expert* (ahli) mengenai interaksi intermediasi keuangan (*Financial Intermediation*) antara inklusi keuangan (*Financial Inclusion*) dan pendalaman keuangan (*Financial Deepening*) di Indonesia. Dalam penelitian ini inklusi dan pendalaman merupakan suatu bentuk intermediasi keuangan dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan. Keduanya merupakan fenomena ekonomi yang sedang berkembang, dimana inklusi keuangan dengan tujuan memberikan kemudahan akses layanan keuangan dan pendalaman keuangan merupakan upaya bank untuk mewujudkan industri perbankan yang kuat. Sesuai gambar pada sintesa yang termuat di dalam kuesioner dengan indikator yang digunakan oleh peneliti

berdasarkan penelitian sebelumnya pada topik *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening*.

Pengisian kuesioner;

Mohon Bapak/Ibu mencermati struktur hirarki berikut ini mengenai analisis interaksi *Financial Inclusion* (Inklusi Keuangan) dan *Financial Deepening* (Pendalaman Keuangan) di Indonesia. Struktur hirarki dalam bagan berikut terdiri dari jenjang intermediasi keuangan yaitu inklusi dan pendalaman keuangan, sasaran instrumen intermediasi merupakan alat yang digunakan dalam interaksi antara pendalaman dan inklusi, dan jenjang sasaran inklusi dan pendalaman keuangan.



Gambar 1.1 Sintesa Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Game Theory

Gambar 1.1 merupakan sintesa *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory* yang disusun oleh peneliti pada suatu intermediasi keuangan yang terdiri dari inklusi keuangan (*Financial inclusion*) dan pendalaman keuangan (*Financial deepening*). Keduanya mempunyai masing-masing sasaran yang tertera pada hirarki level 2 di gambar 1.1 yaitu industri perbankan yang kuat dan kemudahan layanan akses keuangan yang disebut tujuan aktor dari penelitian ini. Dengan instrumen-instrumen yang menyertainya bertindak sebagai strategi pada hirarki level 3 merupakan bentuk penjabaran instrumen atas interaksi keduanya.

Keterangan Diagram:

Hirarki Level 1

Interaksi Intermediasi Keuangan

1. Pendalaman Keuangan
2. Inklusi Keuangan

Hirarki Level 2

Sasaran dari kedua interaksi intermediasi keuangan

1. Industri Perbankan yang Kuat Industri perbankan yang memiliki tingkat pendalaman keuangan yang tinggi.
2. Kemudahan layanan akses keuangan Pemerataan akses keuangan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Hirarki Level 3

Instrumen-instrumen pada interaksi kedalaman dan inklusi keuangan

1. Domestic Financial Asset (DFA) : rasio modal bank dan cadangan terhadap total aset.
2. Domestic Liabilities (DLA) : kewajiban bersih pemerintah meliputi pembiayaan luar negeri (yang diperoleh dari bukan

- penduduk) dan pembiayaan dalam negeri (yang diperoleh dari penduduk), atau sarana yang pemerintah menyediakan sumber daya keuangan untuk menutup defisit anggaran atau mengalokasikan sumber daya keuangan yang timbul dari surplus anggaran.
3. Foreign Financial Asset (FFA) : jumlah aset asing yang dimiliki oleh otoritas moneter dan bank umum dikurangi kewajiban asing.
4. Foreign Liabilities (FLA) : kewajiban bersih pemerintah meliputi pembiayaan luar negeri (yang diperoleh dari bukan penduduk) dan pembiayaan dalam negeri (yang diperoleh dari penduduk), atau sarana yang pemerintah menyediakan sumber daya keuangan untuk menutup defisit anggaran atau mengalokasikan sumber daya keuangan yang timbul dari surplus anggaran.
5. Banking Penetration (BPE) : jumlah perbankan yang terdapat di Indonesia tetapi dalam penelitian ini menggunakan akun deposit bank

6. Availability of Banking Service : jumlah cabang bank dan (ABS) ketersediaan ATM di Indonesia.
7. Usage (UCD) : Penyaluran kredit dan deposito sektor swasta.
8. Usage (UCH) : Penyaluran kredit dan deposito rumah tangga.

Lampiran B

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan tujuan *financial deepening* (pendalaman keuangan)

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				2										FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	2	5
DLA	0,2	1	2	5
FFA	0,5	0,5	1	1
FLA	0,2	0,2	1	1

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	3	5
DLA	0,2	1	3	5
FFA	0,3333	0,3333	1	1
FLA	0,2	0,2	1	1

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan tujuan *financial deepening* (pendalaman keuangan)

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA		6												FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA				2										FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	6	5
DLA	0,2	1	3	2
FFA	0,1667	0,3333	1	1
FLA	0,2	0,5	1	1

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	3	5
DLA	0,1429	1	5	1
FFA	0,3333	0,2	1	1
FLA	0,2	1	1	1

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan tujuan *financial deepening* (pendalaman keuangan)

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA							1							FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	1	5
DLA	0,2	1	3	5
FFA	1	0,3333	1	1
FLA	0,2	0,2	1	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA		6												DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	6	3	5
DLA	0,1667	1	1	2
FFA	0,3333	1	1	1
FLA	0,2	0,5	1	1

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan tujuan *financial deepening* (pendalaman keuangan)

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	3	5
DLA	0,2	1	2	1
FFA	0,3333	0,5	1	1
FLA	0,2	1	1	1

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	3	5	1
DLA	0,3333	1	5	1
FFA	0,2	0,2	1	1
FLA	1	1	1	1

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan tujuan *financial deepening* (pendalaman keuangan)

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA							1							DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA						2								FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	1	2	7
DLA	1	1	5	2
FFA	0,5	0,2	1	1
FLA	0,1429	0,5	1	1

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA				4										FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	4	3	4
DLA	0,25	1	3	1
FFA	0,3333	0,3333	1	4
FLA	0,25	1	0,25	1

Lampiran C

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan *financial inclusion* dengan *financial deepening*: *Domestic Financial Asset (DFA)*

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	3	5
DLA	0,2	1	3	5
FFA	0,333333	0,333333	1	1
FLA	0,2	0,2	1	1

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA													7	FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA	7													FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	7	7
DLA	0,142857	1	0,14286	1
FFA	0,142857	7	1	7
FLA	0,142857	1	0,14286	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA					3									FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	7	7
DLA	0,2	1	1	1
FFA	0,142857	1	1	3
FLA	0,142857	1	0,333333	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA		6												DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA				4										FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA				4										FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	6	7	4
DLA	0,166667	1	3	4
FFA	0,142857	0,3333333	1	4
FLA	0,25	0,25	0,25	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial inclusion* dengan *financial deepening*: *Domestic Financial Asset (DFA)*

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	7	7
DLA	0,2	1	5	7
FFA	0,142857	0,2	1	1
FLA	0,142857	0,1428571	1	1

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA			5											FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	7	7
DLA	0,142857	1	7	7
FFA	0,142857	0,1428571	1	5
FLA	0,142857	0,1428571	0,2	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial inclusion* dengan *financial deepening*: *Domestic Financial Asset (DFA)*

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA		6												FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA		6												FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	4	6	4
DLA	0,25	1	6	3
FFA	0,166667	0,166667	1	1
FLA	0,25	0,333333	1	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA						2								DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA							1							FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	2	1	1
DLA	0,5	1	2	1
FFA	1	0,5	1	1
FLA	1	1	1	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial inclusion* dengan *financial deepening*: *Domestic Financial Asset (DFA)*

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA				4										FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	5	5
DLA	0,2	1	4	2
FFA	0,2	0,25	1	1
FLA	0,2	0,5	1	1

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA						2								FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA						2								FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	3	2	3
DLA	0,333333	1	1	1
FFA	0,5	1	1	2
FLA	0,333333	1	0,5	1

Lampiran D

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan *financial inclusion* dengan *financial deepening: Domestic Liabilities (DLA)*

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA													7	DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	0,1428571	5	5
DLA	7	1	5	3
FFA	0,2	0,2	1	1
FLA	0,2	0,3333333	1	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA		6												FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA													7	FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA	7													FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	6	7
DLA	0,14286	1	0,14286	1
FFA	0,16667	7	1	7
FLA	0,14286	1	0,14286	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial inclusion dengan financial deepening: Domestic Liabilities (DLA)

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA							1							DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA					3									FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	1	5	5
DLA	1	1	1	3
FFA	0,2	1	1	3
FLA	0,2	0,333333	0,333333	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA												6		DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA				4										FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA					3									FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	0,166667	4	5
DLA	6	1	5	4
FFA	0,25	0,2	1	3
FLA	0,2	0,25	0,333333	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial inclusion dengan financial deepening: Domestic Liabilities (DLA)

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	7	7
DLA	0,2	1	5	7
FFA	0,14286	0,2	1	1
FLA	0,14286	0,142857	1	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA			5											FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	7	7
DLA	0,14286	1	7	7
FFA	0,14286	0,142857	1	5
FLA	0,14286	0,142857	0,2	1

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan *financial inclusion* dengan *financial deepening: Domestic Liabilities (DLA)*

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	7	7
DLA	0,14286	1	5	5
FFA	0,14286	0,2	1	1
FLA	0,14286	0,2	1	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA		6												DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA		6												FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA				4										FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	6	6	4
DLA	0,16667	1	4	2
FFA	0,16667	0,25	1	1
FLA	0,25	0,5	1	1

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan *financial inclusion* dengan *financial deepening: Domestic Liabilities (DLA)*

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	5	5
DLA	0,2	1	3	1
FFA	0,2	0,33333	1	1
FLA	0,2	1	1	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	4	3
DLA	0,2	1	2	1
FFA	0,25	0,5	1	1
FLA	0,33333	1	1	1

Lampiran E

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan *financial inclusion* dengan *financial deepening*: *Foreign Financial Asset (FFA)*

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA							1							DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA													7	FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA											5			FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA													7	FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA											5			FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA			5											FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	1	0,142857	0,2
DLA	1	1	0,142857	0,2
FFA	7	7	1	5
FLA	5	5	0,2	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA													7	FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							2							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA	7													FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	7	7
DLA	0,14286	1	0,14286	0,5
FFA	0,14286	7	1	7
FLA	0,14286	2	0,14286	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial inclusion dengan financial deepening: Foreign Financial Asset (FFA)

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA					3									FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	7	5
DLA	0,2	1	1	1
FFA	0,14286		1	3
FLA	0,2	1	0,33333	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA									3					FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA								2						FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA									3					FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA											5			FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA										4				FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	0,33333	0,5
DLA	0,2	1	0,33333	0,2
FFA	3	3	1	0,25
FLA	2	5	4	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial inclusion* dengan *financial deepening*: *Foreign Finacial Asset (FFA)*

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	7	7
DLA	0,2	1	3	3
FFA	0,14286	0,33333	1	1
FLA	0,14286	0,33333	1	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA			5											FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	7	7
DLA	0,14286	1	7	7
FFA	0,14286	0,14286	1	5
FLA	0,14286	0,14286	0,2	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial inclusion dengan financial deepening: Foreign Financial Asset (FFA)

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	5	7
DLA	0,14286	1	5	1
FFA	0,2	0,2	1	1
FLA	0,14286	1	1	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA						2								FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	4	4	4
DLA	0,25	1	3	2
FFA	0,25	0,33333	1	2
FLA	0,25	0,5	0,5	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial inclusion dengan financial deepening: Foreign Finacial Asset (FFA)

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA						2								DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA						2								FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA						2								FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA						2								FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	2	2	2
DLA	0,5	1	2	2
FFA	0,5	0,5	1	2
FLA	0,5	0,5	0,5	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	3	5
DLA	0,2	1	3	1
FFA	0,33333	0,33333	1	1
FLA	0,2	1	1	1

Lampiran F

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan *financial inclusion* dengan *financial deepening: Foreign Liabilites (FLA)*

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA											5			FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA													7	FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA											5			FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA											5			FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA													7	FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	3	0,2	0,1428571
DLA	0,333333	1	0,2	0,2
FFA	5	5	1	0,1428571
FLA	7	5	7	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA													7	FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA	7													FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	7	7
DLA	0,142857	1	0,14286	2
FFA	0,142857	7	1	7
FLA	0,142857	0,5	0,14286	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial inclusion dengan financial deepening: Foreign Liabilites (FLA)

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	7	7
DLA	0,2	1	5	3
FFA	0,142857	0,2	1	1
FLA	0,142857	0,33333	1	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA									3					FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA								2						FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA									3					FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA											5			FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA										4				FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	0,33333	0,5
DLA	0,2	1	0,33333	0,2
FFA	3	3	1	0,25
FLA	2	5	4	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial inclusion dengan financial deepening: Foreign Liabilites (FLA)

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA			5											FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA					3									FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	7	7
DLA	0,142857	1	5	5
FFA	0,142857	0,2	1	3
FLA	0,142857	0,2	0,33333	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA	7													FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA	7													FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA			5											FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	7	7
DLA	0,142857	1	7	7
FFA	0,142857	0,14286	1	5
FLA	0,142857	0,14286	0,2	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial inclusion dengan financial deepening: Foreign Liabilites (FLA)

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA			5											DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA					3									FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA					3									FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA					3									FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	5	3	3
DLA	0,2	1	3	3
FFA	0,333333	0,333333	1	3
FLA	0,333333	0,333333	0,333333	1

Kiri	Skala AHP												Kanan	
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA						2								DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	2	4	4
DLA	0,5	1	2	1
FFA	0,25	0,5	1	1
FLA	0,25	1	1	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial inclusion dengan financial deepening: Foreign Liabilites (FLA)

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA						2								DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA						2								FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA						2								FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA						2								FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA							1							FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	2	2	2
DLA	0,5	1	2	1
FFA	0,5	0,5	1	1
FLA	0,5	1	1	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA	7													DLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA		6												FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DFA				4										FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FFA
	7		5		3		1		3		5		7	
DLA							1							FLA
	7		5		3		1		3		5		7	
FFA						2								FLA

	DFA	DLA	FFA	FLA
DFA	1	7	6	4
DLA	0,142857	1	1	1
FFA	0,166667	1	1	2
FLA	0,25	1	0,5	1

Lampiran G

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan tujuan *financial inclusion* (inklusi keuangan)

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,1429	0,1429	0,1429
ABS	7	1	0,2	0,2
UCD	7	5	1	1
UCH	7	5	1	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE												6		UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,2	0,1667	0,2
ABS	5	1	0,2	0,2
UCD	6	5	1	1
UCH	5	5	1	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan tujuan financial inclusion (inklusi keuangan)

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									3					ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5		7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,3333	0,2	0,3333
ABS	3	1	0,2	0,1429
UCD	5	5	1	1
UCH	3	7	1	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											6			ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											6			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											6			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD									3					UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,1667	0,1667	0,1667
ABS	6	1	0,2	0,2
UCD	6	5	1	0,3333
UCH	6	5	3	1

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan tujuan *financial inclusion* (inklusi keuangan)

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD											5			UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,1429	0,1429	0,1429
ABS	7	1	0,2	0,2
UCD	7	5	1	0,2
UCH	7	5	5	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD											5			UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,1429	0,1429	0,1429
ABS	7	1	0,1429	0,1429
UCD	7	7	1	0,2
UCH	7	7	5	1

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan tujuan *financial inclusion* (inklusi keuangan)

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE										4				ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE										4				UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE										4				UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS												6		UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS												6		UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,25	0,25	0,25
ABS	4	1	0,1667	0,1667
UCD	4	6	1	1
UCH	4	6	1	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE							1							ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									3					UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD									3					UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	1	0,3333	0,3333
ABS	1	1	0,2	0,2
UCD	3	5	1	0,3333
UCH	3	5	3	1

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan tujuan *financial inclusion* (inklusi keuangan)

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE							1							ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE							1							UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE							1							UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS							1							UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD									3					UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	1	1	1
ABS	1	1	1	0,3333
UCD	1	1	1	0,3333
UCH	1	3	3	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE												6		ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE												6		UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									4					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									4					UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS							1							UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,1667	0,1667	0,25
ABS	6	1	0,25	1
UCD	6	4	1	1
UCH	4	1	1	1

Lampiran H

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan *financial deepening* dengan *financial inclusion: Banking Penetration (BPE)*

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE	7													ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	7	0,142857	0,142857
ABS	0,1428571	1	0,2	0,2
UCD	7	5	1	1
UCH	7	5	1	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									4					ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE												6		UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE												6		UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,25	0,166667	0,166667
ABS	4	1	0,2	0,2
UCD	6	5	1	1
UCH	6	5	1	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial deepening dengan financial inclusion: Banking Penetration (BPE)

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS			5											UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS			5											UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD											5			UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,14286	0,2	0,2
ABS	7	1	5	5
UCD	5	0,2	1	0,2
UCH	5	0,2	5	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE					3									ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE						2								UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE			5											UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS										4				UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD											5			UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	3	2	5
ABS	0,3333333	1	0,2	0,25
UCD	0,5	5	1	0,2
UCH	0,2	4	5	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial deepening dengan financial inclusion: Banking Penetration (BPE)

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE			5											ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE					3									UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE			5											UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS			5											UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS	7													UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD	7													UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	5	3	5
ABS	0,2	1	5	7
UCD	0,3333333	0,2	1	7
UCH	0,2	0,14286	0,142857	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD										5				UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,14286	0,142857	0,142857
ABS	7	1	0,142857	0,142857
UCD	7	7	1	0,2
UCH	7	7	5	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial deepening dengan financial inclusion: Banking Penetration (BPE)

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,2	0,142857	0,142857
ABS	5	1	0,333333	0,333333
UCD	7	3	1	1
UCH	7	3	1	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS							1							UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,142857	0,2	0,2
ABS	7	1	0,2	1
UCD	5	5	1	1
UCH	5	1	1	1

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan *financial deepening* dengan *financial inclusion: Banking Penetration (BPE)*

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE							1							ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE							1							UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD													7	UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	1	1	0,25
ABS	1	1	0,25	0,25
UCD	1	4	1	0,142857
UCH	4	4	7	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD													7	UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,142857	0,142857	0,142857
ABS	7	1	0,2	0,142857
UCD	7	5	1	0,142857
UCH	7	7	7	1

Lampiran I

Matriks *pairwise comparison* sehubungan dengan *financial deepening* dengan *financial inclusion: Availability of Banking Service (ABS)*

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE	7													ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									4					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	7	0,2	0,2
ABS	0,1428571	1	0,2	0,25
UCD	5	5	1	1
UCH	5	4	1	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									4					ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									4					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									4					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,25	0,14286	0,142857
ABS	4	1	0,25	0,25
UCD	7	4	1	1
UCH	7	4	1	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial deepening dengan financial inclusion: Availability of Banking Service (ABS)

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE			5											UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE			5											UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS	7													UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS	7													UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD											5			UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,14286	5	5
ABS	7	1	7	7
UCD	0,2	0,14286	1	0,2
UCH	0,2	0,14286	5	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									4					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									4					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD			5											UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,2	0,2	0,25
ABS	5	1	0,25	0,333333
UCD	5	4	1	5
UCH	4	3	0,2	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial deepening dengan financial inclusion: Availability of Banking Service (ABS)

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE			5											ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE					3									UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE			5											UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS			5											UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS			5											UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD	7													UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	5	3	5
ABS	0,2	1	5	5
UCD	0,3333333	0,2	1	7
UCH	0,2	0,2	0,14286	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD											5			UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,14286	0,14286	0,142857
ABS	7	1	0,14286	0,142857
UCD	7	7	1	0,2
UCH	7	7	5	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial deepening* dengan *financial inclusion: Availability of Banking Service (ABS)*

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									3					ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE								2						UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE								2						UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,33333	0,5	0,5
ABS	3	1	0,33333	0,33333
UCD	2	3	1	1
UCH	2	3	1	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,14286	0,2	0,2
ABS	7	1	0,33333	0,33333
UCD	5	3	1	1
UCH	5	3	1	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial deepening* dengan *financial inclusion: Availability of Banking Service (ABS)*

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE												6		ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE												6		UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE												6		UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD													7	UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,16667	0,16667	0,16667
ABS	6	1	0,14286	0,14286
UCD	6	7	1	0,14286
UCH	6	7	7	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									3					UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD									3					UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,2	0,33333	0,2
ABS	5	1	0,2	0,33333
UCD	3	5	1	0,33333
UCH	5	3	3	1

Lampiran J

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial deepening dengan financial inclusion: Usage Credit and Deposito to Private Sector (UCD)

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE							1							ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD	7													UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	1	0,142857	0,2
ABS	1	1	0,142857	0,2
UCD	7	7	1	7
UCH	5	5	0,142857	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									3					ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											6			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,333333	0,142857	0,142857
ABS	3	1	0,166667	0,2
UCD	7	6	1	1
UCH	7	5	1	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial deepening* dengan *financial inclusion: Usage Credit and Deposito to Private Sector (UCD)*

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE			5											UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE			5											UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS	7													UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS	7													UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD							1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,142857	5	5
ABS	7	1	7	7
UCD	0,2	0,142857	1	1
UCH	0,2	0,142857	1	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE												6		ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS										4				UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS				4										UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD		6												UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,166667	0,2	0,333333
ABS	6	1	0,25	4
UCD	5	4	1	6
UCH	3	0,25	0,166667	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial deepening* dengan *financial inclusion: Usage Credit and Deposito to Private Sector (UCD)*

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE			5											UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE	7													UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS			5											UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS			5											UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD					3									UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,2	5	7
ABS	5	1	5	5
UCD	0,2	0,2	1	3
UCH	0,142857	0,2	0,333333	1

Kiri	Skala AHP										Kanan			
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD											5			UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,142857	0,142857	0,142857
ABS	7	1	0,142857	0,142857
UCD	7	7	1	0,2
UCH	7	7	5	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial deepening dengan financial inclusion: Usage Credit and Deposito to Private Sector (UCD)

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD											5			UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,2	0,2	0,2
ABS	5	1	0,2	0,2
UCD	5	5	1	0,2
UCH	5	5	5	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE													7	ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									3					UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS													7	UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD													7	UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,14286	0,33333	0,33333
ABS	7	1	0,33333	0,14286
UCD	3	3	1	0,14286
UCH	3	7	7	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan financial deepening dengan financial inclusion: Usage Credit and Deposito to Private Sector (UCD)

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE							1							ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE							1							UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE							1							UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS									3					UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD											5			UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	1	1	1
ABS	1	1	0,33333	0,33333
UCD	1	3	1	0,2
UCH	1	3	5	1

Kiri	Skala AHP											Kanan		
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											6			ABS
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
BPE											5			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											6			UCD
	7		5		3		1		3		5		7	
ABS											6			UCH
	7		5		3		1		3		5		7	
UCD											6			UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,16667	0,2	0,2
ABS	6	1	0,16667	0,16667
UCD	5	6	1	0,16667
UCH	5	6	6	1

Lampiran K

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial deepening* dengan *financial inclusion: Usage Credit and Deposito to Households (UCH)*

Kiri	Skala AHP										Kanan		
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE						1							ABS
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE										5		7	UCD
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE												7	UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS										5		7	UCD
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS												7	UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
UCD												7	UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	1	0,2	0,1429
ABS	1	1	0,2	0,1429
UCD	5	5	1	0,1429
UCH	7	7	7	1

Kiri	Skala AHP										Kanan		
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE								3					ABS
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE												7	UCD
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE												7	UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS										5		7	UCD
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS										5		7	UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
UCD						1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,3333	0,1429	0,1429
ABS	3	1	0,2	0,2
UCD	7	5	1	1
UCH	7	5	1	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial deepening* dengan *financial inclusion: Usage Credit and Deposito to Households (UCH)*

Kiri	Skala AHP										Kanan	
	7		5	3		1		3		5	7	
BPE											7	ABS
	7		5	3		1		3		5	7	
BPE			5									UCH
	7		5	3		1		3		5	7	
BPE			5									UCH
	7		5	3		1		3		5	7	
ABS	7											UCH
	7		5	3		1		3		5	7	
ABS	7											UCH
	7		5	3		1		3		5	7	
UCH						1						UCH

	BPE	ABS	UCH	UCH
BPE	1	0,1429	5	5
ABS	7	1	7	7
UCH	0,2	0,1429	1	1
UCH	0,2	0,1429	1	1

Kiri	Skala AHP										Kanan	
	7		5	3		1		3		5	7	
BPE										5		ABS
	7		5	3		1		3		5	7	
BPE							2					UCH
	7		5	3		1		3		5	7	
BPE								3				UCH
	7		5	3		1		3		5	7	
ABS								3				UCH
	7		5	3		1		3		5	7	
ABS							2					UCH
	7		5	3		1		3		5	7	
UCH								3				UCH

	BPE	ABS	UCH	UCH
BPE	1	0,2	0,5	0,3333
ABS	5	1	0,3333	0,5
UCH	2	3	1	0,3333
UCH	3	2	3	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial deepening* dengan *financial inclusion: Usage Credit and Deposito to Households (UCH)*

Kiri	Skala AHP										Kanan		
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE										5			ABS
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE			5										UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE			5										UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS								3					UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS				3									UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
UCH						1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,2	5	5
ABS	5	1	0,3333	3
UCD	0,2	3	1	1
UCH	0,2	0,3333	1	1

Kiri	Skala AHP										Kanan		
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE												7	ABS
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE												7	UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE												7	UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS												7	UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS												7	UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
UCH										5			UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,1429	0,1429	0,1429
ABS	7	1	0,1429	0,1429
UCD	7	7	1	0,2
UCH	7	7	5	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial deepening* dengan *financial inclusion: Usage Credit and Deposito to Households (UCH)*

Kiri	Skala AHP										Kanan		
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE										5			ABS
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE								3					UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE								3					UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS										5			UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS										5			UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
UCD												7	UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,2	0,3333	0,33333
ABS	5	1	0,2	0,2
UCD	3	5	1	0,14286
UCH	3	5	7	1

Kiri	Skala AHP										Kanan		
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE						1							ABS
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE								3					UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE						1							UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS								3					UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS												7	UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
UCD												7	UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	1	0,3333	1
ABS	1	1	0,3333	0,14286
UCD	3	3	1	0,14286
UCH	1	7	7	1

Matriks pairwise comparison sehubungan dengan *financial deepening* dengan *financial inclusion: Usage Credit and Deposito to Households (UCH)*

Kiri	Skala AHP										Kanan		
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE										5		ABS	
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE										5		UCH	
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE												7	UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS						1							UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS						1							UCH
	7		5	3		1		3		5		7	
UCH												7	UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,2	0,2	0,14286
ABS	5	1	1	1
UCD	5	1	1	0,14286
UCH	7	1	7	1

Kiri	Skala AHP										Kanan		
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE										5		ABS	
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE										5		UCH	
	7		5	3		1		3		5		7	
BPE										5		UCH	
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS										5		UCH	
	7		5	3		1		3		5		7	
ABS										5		UCH	
	7		5	3		1		3		5		7	
UCH						1							UCH

	BPE	ABS	UCD	UCH
BPE	1	0,2	0,2	0,2
ABS	5	1	0,2	0,2
UCD	5	5	1	1
UCH	5	5	1	1